



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KKP
2025

LAPORAN KINERJA

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL

TAHUN 2025



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

pangan.biru

LEMBAR PENGESAHAN



LAPORAN KINERJA (LKI)

TAHUN 2025 PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL

Tual, 13 Januari 2026

Disetujui oleh :

Disusun Oleh :

**Penanggung Jawab
Kepala PPN Tual**

Tim Penyusun Laporan Kinerja



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Recky Pangemanan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas terselesaikannya Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual Tahun 2025. Mengacu pada RPJMN 2020-2025 dan RKT Tahun 2025. Pelabuhan perikanan Nusantara Tual senantiasa mengupayakan seluruh rencana aksi yang ada dilaksanakan secara optimal, efektif dan efisien, sebagaimana mestinya dengan harapan target indikator kinerja yang terdapat pada RPJMN dan RKT dapat tercapai dengan maksimal dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual Tahun 2025 disusun sebagai bahan pertanggungjawaban yang memuat ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Laporan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual menyajikan informasi rinci atas pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan pada target kinerja jangka pendek sekaligus sebagai alat pertanggungjawaban Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual kepada publik secara akuntabel dan transparan.

Informasi capaian kinerja yang disajikan diharapkan dapat menjadi kontrol bersama bagi seluruh pihak dan upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan disusunnya laporan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual Tahun 2025 diharapkan dapat dijadikan ukuran keberhasilan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual pada akhir periode pelaksanaan kinerja dan menjadi bahan evaluasi kinerja internal sehingga penyempurnaan kinerja pada waktu mendatang dapat terealisasi.

Semoga laporan yang disajikan dapat menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi pencapaian pencapaian sasaran/tujuan organisasi serta menjadi masukan kepada seluruh pihak terkait dalam memahami proses pelaksanaan tugas di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual.

Tual, 13 Januari 2026
Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Tual,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Recky Pangemanan, S.St.Pi., M.Si

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	5
Indeks Profesionalitas ASN.....	8
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	9
BAB I PENDAHULUAN	11
1.1 LATAR BELAKANG	11
1.2 TUGAS DAN FUNGSI.....	13
1.3 SUMBER DAYA MANUSIA PPN TUAL	15
1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	14
2.1 Rencana Strategis 2025 – 2029.....	14
2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	15
2.3 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN.....	17
2.4 PERJANJIAN KINERJA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL TAHUN 2025	19
2.5 RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL TAHUN 2025.....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	26
3.2 EVALUASI DAN ANALISA PENCAPAIAN KINERJA	29
3.2.1 Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Rp. Juta).....	29
3.2.2 Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Ton).....	36
3.2.3 Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/ atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	44
3.2.4 Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Nilai)	51
3.2.5 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	59
3.2.6 Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	68
3.2.7 Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Nilai)	75
3.2.8 Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	83
3.2.9 Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan	90
3.2.10 Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	100
3.2.11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk	

Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	106
3.2.12 Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	112
3.2.13 Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Indeks) 119	
3.2.14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Persen)	126
3.2.15 Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual ..	130
3.2.16 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	135
3.2.17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Nilai).....	140
3.2.18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Indeks)	144
3.3 REALISASI ANGGARAN	150
BAB IV PENUTUP	152
4.1 KESIMPULAN.....	152
4.2 SARAN.....	154
4.3 REKOMENDASI TINDAK LANJUT	155

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Progres Capaian Indikator Kinerja	6
Tabel 2 Rekapitulasi SDM PPN Tual Tahun 2025	16
Tabel 3 Rencana Kinerja PPN Tual Tahun 2025	17
Tabel 4 Komposisi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2025	19
Tabel 5 Perjanjian Kinerja PPN Tual Tahun 2025	20
Tabel 6 Komposisi Target dan Realisasi Pagu Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan TA 2025	22
Tabel 7 Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025	23
Tabel 8 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PPN Tual Tahun 2025	26
Tabel 9 Target dan Realisasi IKU Penerimaan PNBP Non SDA PPN Tual Tahun 2025 ..	29
Tabel 10 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	30
Tabel 11 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional /satker lain ..	31
Tabel 12 capaian indikator kinerja nilai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) non SDA	33
Tabel 13 Target dan Realisasi IKU Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Tual Tahun 2025	37
Tabel 14 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Triwulan Tahun Sebelumnya	38
Tabel 15 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan	39
Tabel 16 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan	40
Tabel 17 capaian penghitungan lebih detail terkait efisiensi penggunaan anggaran	42
Tabel 18 Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun berjalan.	44
Tabel 19 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya atau dengan beberapa tahun terakhir	45
Tabel 20 Perbandingan antara realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	46
Tabel 21 Perbandingan antara realisasi tahun berjalan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di kementerian	46
Tabel 22 capaian penghitungan lebih detail terkait efisiensi penggunaan anggaran	49
Tabel 23 Target dan Realisasi IKU Tingkat Kinerja PPN Tual Tahun 2025	52
Tabel 24 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya atau dengan beberapa tahun terakhir	53
Tabel 25 Perbandingan antara realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	53
Tabel 26 Perbandingan antara realisasi tahun berjalan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di kementerian	54
Tabel 27 capaian penghitungan lebih detail terkait efisiensi penggunaan anggaran	57
Tabel 28 Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun berjalan.	60
Tabel 29 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya atau dengan beberapa tahun terakhir	60
Tabel 30 Perbandingan antara realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	61
Tabel 31 Perbandingan antara realisasi tahun berjalan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di kementerian	61
Tabel 32 capaian penghitungan lebih detail terkait efisiensi penggunaan anggaran	64
Tabel 33 Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun berjalan.	68
Tabel 34 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya atau dengan beberapa tahun terakhir	69
Tabel 35 Perbandingan antara realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan	

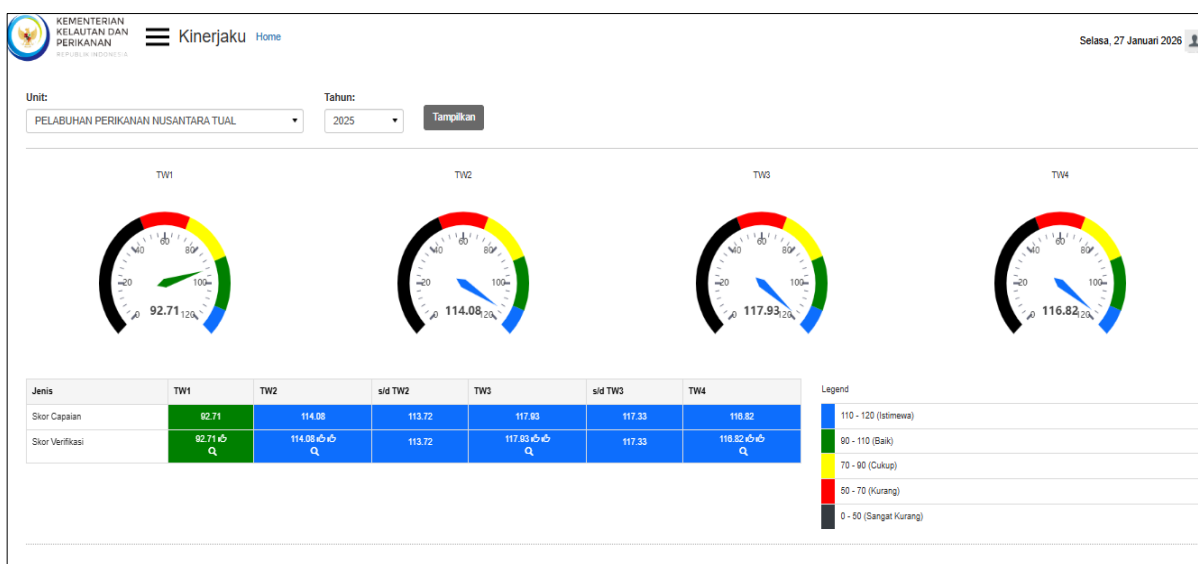
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	69
Tabel 36 Perbandingan antara realisasi tahun berjalan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di kementerian.....	70
Tabel 37 capaian penghitungan lebih detail terkait efisiensi penggunaan anggaran	72
Tabel 38 Target dan Realisasi IKU Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Tual tahun 2025	76
Tabel 39 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	76
Tabel 40 Perbandingan antara realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	77
. Tabel 41 Perbandingan antara realisasi tahun berjalan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di kementerian.....	78
Tabel 42 capaian penghitungan lebih detail terkait efisiensi penggunaan anggaran	80
Tabel 43 Target dan Realisasi IKU Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2025	83
Tabel 44 Perbandingan Realisasi dengan dengan triwulan tahun sebelumnya	84
Tabel 45 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra.....	84
Tabel 46 Perbandingan antara realisasi tahun berjalan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di kementerian.....	85
Tabel 47 capaian penghitungan lebih detail terkait efisiensi penggunaan anggaran	88
Tabel 48 Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun berjalan.	91
Tabel 49 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya atau dengan beberapa tahun terakhir	92
Tabel 50 Perbandingan antara realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	92
Tabel 51 Perbandingan antara realisasi tahun berjalan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di kementerian.....	93
Tabel 52 capaian penghitungan lebih detail terkait efisiensi penggunaan anggaran	97
Tabel 53 Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun berjalan	101
Tabel 54 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya atau dengan beberapa tahun terakhir	101
Tabel 55 Perbandingan antara realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	102
Tabel 56 Perbandingan antara realisasi tahun berjalan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di kementerian.....	103
Tabel 57 capaian penghitungan lebih detail terkait efisiensi penggunaan anggaran	104
Tabel 58 Target dan Realisasi IKU Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Tahun 2025	107
Tabel 59 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	108
Tabel 60 Perbandingan antara realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	108
Tabel 61 Perbandingan antara realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.	109
Tabel 62 capaian penghitungan lebih detail terkait efisiensi penggunaan anggaran	110
Tabel 63 Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun berjalan.	113
Tabel 64 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya atau dengan beberapa tahun terakhir	113
Tabel 65 Perbandingan antara realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	114
Tabel 66 Perbandingan antara realisasi tahun berjalan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di kementerian.....	114

Tabel 67 capaian penghitungan lebih detail terkait efisiensi penggunaan anggaran	117
Tabel 68 Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja tahun berjalan	120
Tabel 69 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya atau dengan beberapa tahun terakhir	120
Tabel 70 Perbandingan antara realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	121
Tabel 71 Perbandingan antara realisasi tahun berjalan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di kementerian.....	121
Tabel 72 capaian penghitungan lebih detail terkait efisiensi penggunaan anggaran	123
Tabel 73 Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun berjalan.	126
Tabel 74 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya atau dengan beberapa tahun terakhir	126
Tabel 75 Perbandingan antara realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	127
Tabel 76 Perbandingan antara realisasi tahun berjalan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di kementerian.....	127
Tabel 77 capaian penghitungan lebih detail terkait efisiensi penggunaan anggaran	128
Tabel 78 Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun berjalan.	131
Tabel 79 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya atau dengan beberapa tahun terakhir	131
Tabel 80 Perbandingan antara realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	132
Tabel 81 Perbandingan antara realisasi tahun berjalan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di kementerian.....	132
Tabel 82 capaian penghitungan lebih detail terkait efisiensi penggunaan anggaran	133
Tabel 83 Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun berjalan.	135
Tabel 84 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya atau dengan beberapa tahun terakhir	136
Tabel 85 Perbandingan antara realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	136
Tabel 86 Perbandingan antara realisasi tahun berjalan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di kementerian.....	137
Tabel 87 capaian penghitungan lebih detail terkait efisiensi penggunaan anggaran	139
Tabel 88 Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun berjalan.	140
Tabel 89 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya atau dengan beberapa tahun terakhir	141
Tabel 90 Perbandingan antara realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	141
Tabel 91 Perbandingan antara realisasi tahun berjalan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di kementerian.....	142
Tabel 92 capaian penghitungan lebih detail terkait efisiensi penggunaan anggaran	143
Tabel 93 Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun berjalan	145
Tabel 94 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya atau dengan beberapa tahun terakhir.....	145
Tabel 95 Perbandingan antara realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	146
Tabel 96 Perbandingan antara realisasi tahun berjalan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di kementerian.....	147
Tabel 97 capaian penghitungan lebih detail terkait efisiensi penggunaan anggaran	148
Tabel 98 Realisasi Penyerapan Anggaran Untuk Pelaksanaan Kegiatan PPN Tual Tahun 2025	150
Tabel 99 Realisasi Penyerapan Anggaran Untuk Pelaksanaan Kegiatan PPN Tual Tahun	

2025	151
------------	-----

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual Tahun 2025 menyajikan capaian strategis organisasi yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan dukungan anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 9.418.599.000,- dengan capaian realisasi sebesar Rp. 9.105.194.459,- atau mencapai 96.67 % (sumber: Aplikasi OM-SPAN). Sedangkan secara kinerja dengan hasil capaian sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dan dapat memenuhi target dengan Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditambahkan dengan Nilai Indikator Kinerja (IK) sebesar 116.82 % sesuai dashboard Kinerja pada gambar berikut.



Dari hasil pengukuran kinerja PPN Tual tahun 2025 melalui pencapaian target indikator kinerja yang diinput ke dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan KINERJAKU. Hasil dari 18 IKU yang telah ditetapkan telah terealisasi pada tahun 2025 diantaranya terdapat 16 IKU yang capaiannya melampaui target dan 2 IKU yang capaiannya dibawa target.

Progres Capaian Indikator Kinerja

Pada Tahun 2025, Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual telah melaksanakan dan merealisasikan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum, seluruh indikator tersebut menunjukkan tingkat capaian yang baik. Rincian target dan realisasi masing-masing indikator disajikan pada Tabel 1 berikut sebagai dasar analisis kinerja lebih lanjut.

Tabel 1 Progres Capaian Indikator Kinerja

NO	IDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	1 Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Rp. Juta)	480.597	907.183	188.76%
2	2 Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Ton)	4900	6408.27	130.8%
3	3 Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/ atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	100	100	100%
4	4 Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	84	91	108,3%
5	5 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	81	94.6	116.7%
6	6 Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	40	50.62	126.55%
7	7 Nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Nilai)	30.10	81.35	270.26%
8	8 Kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	690	857	124.20%

9	9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan	0,26	0.56	215%
10	10	Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	45.5	72.57	159.5%
11	11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Persen)	85%	100%	117,65%
12	12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	88	88.00	100.91
13	13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Indeks)	87	86.8	99,77
14	14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Persen)	76	100	131,58%
15	15	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	95%	97.5%	102,63%
16	16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	92	91.85	99.84
17	17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	71,5	86.57	121.08%
18	18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Indeks)	88,50	96.39	108,92%

Berdasarkan hasil pada tabel progres capaian Indikator Kinerja Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) indikator yang realisasi capaiannya belum melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu **Indeks Profesionalitas ASN** dan **Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)** pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual.

Meskipun kedua indikator tersebut belum melampaui target, realisasinya tetap menunjukkan kinerja yang relatif baik. Namun demikian, kondisi ini perlu menjadi perhatian sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya manusia serta optimalisasi pelaksanaan anggaran pada tahun berikutnya.

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa tidak tercapainya target kinerja Tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang bersifat internal maupun teknis administratif.

Indeks Profesionalitas ASN

Tidak tercapainya target Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2025 disebabkan oleh beberapa faktor pada masing-masing dimensi penilaian sebagai berikut:

- **Dimensi Kualifikasi Pendidikan**
Masih terdapat beberapa pegawai yang tingkat pendidikannya belum memenuhi bobot nilai maksimal sesuai dengan standar jabatan yang diduduki, sehingga mempengaruhi akumulasi nilai akhir indeks profesionalitas.
- **Dimensi Kompetensi**
Nilai yang diperoleh sebesar 86,8. Capaian ini dipengaruhi oleh rendahnya tingkat partisipasi pegawai dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat), kursus, maupun program pengembangan kompetensi lainnya, baik secara klasikal maupun daring.
- **Dimensi Kinerja**
Nilai yang diperoleh sebesar 99,77%. Meskipun tergolong tinggi, masih terdapat beberapa pegawai dengan predikat kinerja “Butuh Perbaikan”, sehingga berdampak terhadap nilai agregat profesionalitas ASN.

Tidak optimalnya capaian pada ketiga dimensi tersebut menyebabkan masih terdapat pegawai dengan predikat profesionalitas “Rendah” dan “Sangat Rendah”.

Selain faktor tersebut, penurunan nilai rekonsiliasi kinerja PPN Tual pada Tahun 2025 juga dipengaruhi oleh keterlambatan penyusunan laporan kinerja, sehingga berdampak pada tidak terpenuhinya ketepatan waktu penginputan dokumen LAKIP 2024 pada aplikasi ESR Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Tidak tercapainya target Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual disebabkan oleh beberapa faktor teknis dalam pengelolaan anggaran, antara lain:

- Perhitungan dan pengelolaan Halaman III DIPA yang belum dilakukan secara optimal, sehingga menimbulkan deviasi yang cukup tinggi antara rencana dan realisasi penarikan dana.
- Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang mengalami keterlambatan dalam proses revolving, sehingga mempengaruhi ketepatan waktu pertanggungjawaban dan berdampak pada penurunan nilai akhir IKPA.
- Kurangnya ketepatan dalam perencanaan kas serta pengendalian pelaksanaan anggaran pada periode tertentu, khususnya dalam penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Secara keseluruhan, meskipun kedua indikator tersebut belum melampaui target, capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual Tahun 2025 tetap menunjukkan tren yang positif. Evaluasi atas faktor-faktor penyebab ini menjadi dasar dalam penyusunan langkah-langkah perbaikan dan penguatan manajemen kinerja serta pengelolaan anggaran pada tahun berikutnya, guna mewujudkan peningkatan kualitas akuntabilitas dan tata kelola yang lebih optimal.



BAB 1

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja. Sistem Kinerja Instansi Pemerintah juga bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya, meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk memperoleh informasi kinerja penting yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan perbaikan akuntabilitas kinerja.

Sebagai wujud akuntabilitas dan kinerja, Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Pemenuhan kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun, dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai.

Program pengelolaan perikanan dan kelautan dilaksanakan melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2025 yang pertanggungjawabannya harus dilakukan secara akuntabel dan merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran berbentuk laporan yang berisi penerapan manajemen kinerja dan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulanan dan tahunan). Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang

menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual merupakan salah satu dari 22 (dua puluh dua) Pelabuhan Perikanan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan. Guna mencapai tujuan pembangunan perikanan tangkap, pada tahun 2025 Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual melaksanakan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

- Pengelolaan Kepelabuhanan Perikanan
- Pengelolaan Sumber Daya Ikan
- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang bersih (clean governance) dan bertanggung jawab (good governance) diperlukan pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa segala pelaksanaan pembangunan oleh instansi pemerintah agar dilaporkan secara akuntabel sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi pertanggungjawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dihasilkan, kegagalan pelaksanaan serta permasalahan – permasalahan yang dihadapi yang disertai dengan tindak lanjut pelaksanaan di tahun mendatang. Tujuan dari pelaporan kinerja ini yakni: (1) untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai, (2)

sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Wujud pelaporan kinerja dimaksud adalah Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual yang disusun secara periodik (setiap Triwulan dan Tahun).

Berkaitan dengan hal tersebut, Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual Tahun 2025 disusun untuk mengukur pencapaian indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tahun 2025 dalam mewujudkan misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini adalah salah satu bentuk media pertanggungjawaban kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan terhadap kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (good governance) bisa diwujudkan.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, bahwa Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

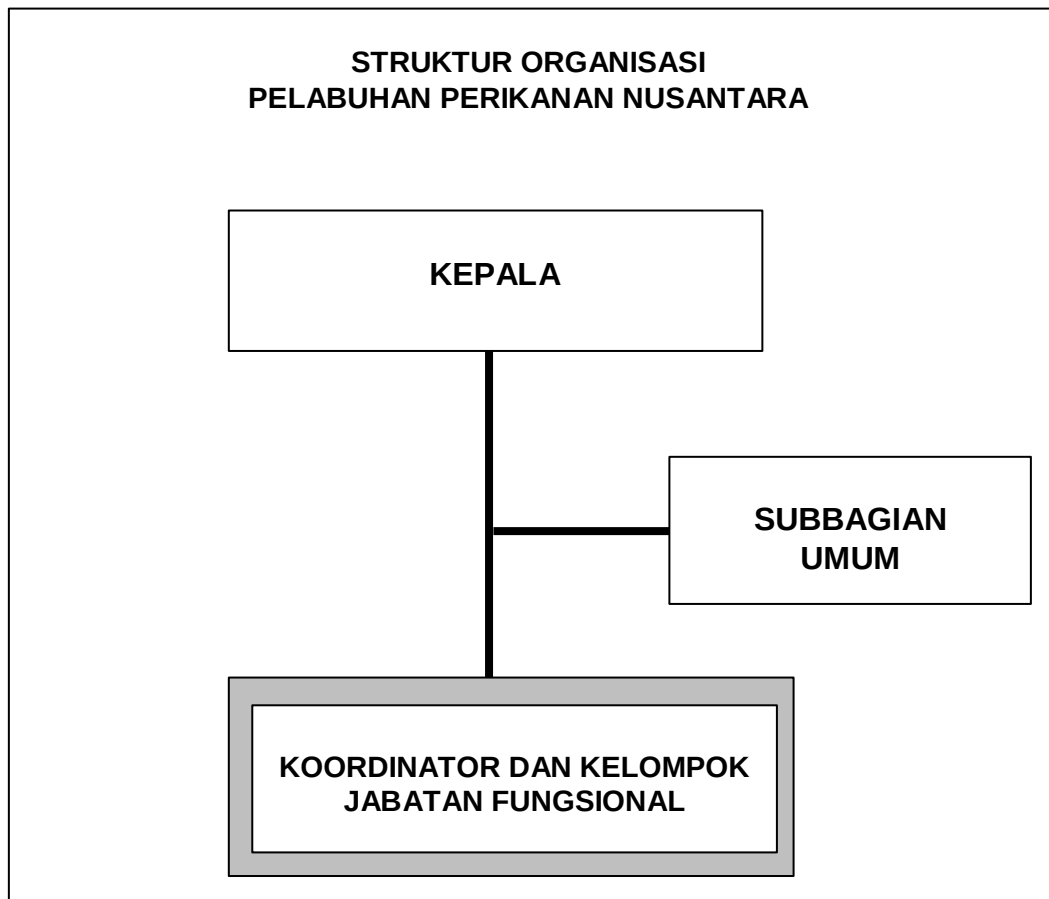
- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pelabuhan perikanan;
- b. pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
- c. pelaksanaan pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
- d. pelaksanaan pemeriksaan logbook penangkapan ikan;
- e. pelaksanaan pelayanan penerbitan persetujuan berlayar;
- f. pelaksanaan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
- g. pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- h. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan prasarana;
- i. pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah

- pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran, dan distribusi hasil perikanan;
- j. pelayanan jasa, pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha;
 - k. pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;
 - l. pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik;
 - m. pelaksanaan inspeksi pengendalian mutu hasil perikanan pada kegiatan penangkapan ikan;
 - n. pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan; dan
 - o. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan, Pelabuhan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Pelabuhan. Struktur organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara pada Peraturan tersebut dijelaskan pada BAB II, Bagian Ketiga, Pasal 12 ayat (2), dimana susunan organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara terdiri atas :

1. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara
2. Subbagian Umum
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelabuhan perikanan tersebut, maka disusun struktur organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan, sebagaimana gambar berikut.



Gambar Struktur Organisasi PPN Tual

1.3 SUMBER DAYA MANUSIA PPN TUAL

Sumber daya manusia (SDM) adalah orang-orang yang bekerja dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya. SDM merupakan aset penting yang tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi. Sumber daya manusia di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara dan pegawai non Aparatur Sipil Negara.

Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) secara nasional. Sedangkan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Selain dari PNS dan PPPK dikategorikan sebagai tenaga non ASN.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 69 orang yang terdiri dari 51 orang pegawai Aparatur Sipil Negara (PNS 29 orang dan PPPK Penuh Waktu 22 orang), PPPK Paruh Waktu sebanyak 1 orang dan outsourcing sebanyak 17 orang. Seluruh SDM di pelabuhan perikanan ini berasal dari berbagai bidang keahlian dan keterampilan dan merupakan aset untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual yang telah ditetapkan. Rincian alokasi sumber daya manusia di PPN Tual dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2 Rekapitulasi SDM PPN Tual Tahun 2025

No.	Bagian	PNS				PPPK			Jumlah
		I	II	III	IV	V	VII	IX	
1	Kepala Pelabuhan				1				1
2	Kepala Subbagian Umum			1					1
3	Subbagian Umum		4	3		5	1	1	14
4	Kelompok Jabatan Fungsional		3	7	1	6	1	5	23
5	Kelompok Jabatan Pelaksana		2	7		4			13
6	Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan (PJLP)								-
7	Lainnya (Outsourcing)								17
Total		0	9	18	2	15	2	6	69

1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Ringkasan Eksekutif

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut sertakendala- kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk

menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada triwulan mendatang.pencapaiannya.

2. Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini disajikan informasi umum tentang Laporan Kinerja yang menjadi tanggung jawab sebuah instansi pemerintah, penjelasan secara umum suatu organisasi serta bagan organisasi dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan capaian kinerja selama waktu tertentu (waktu pelaporan).

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bagian ini menjelaskan gambaran singkat mengenai visi, misi, dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja, dan targetnya) dalam Rencana Jangka Menengah (RPJM/Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan Penetapan Kinerja (PK) pada periode triwulan tertentu.

4. Bab III Akuntabilitas

Pada bagian ini menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran / tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

5. Bab IV Penutup

Pada bagian ini diuraikan kesimpulan secara umum tentang capaian kinerja organisasi, tindak lanjut rekomendasi periode sebelumnya, serta rekomendasi tindak lanjut yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

6. Lampiran

Isi dari pada lampiran merupakan kumpulan dari Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Pelabuhan dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.



BAB 2

PERENCANAAN

KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2025 – 2029

Indonesia, sebagai salah satu negara maritim terbesar dunia, memiliki potensi kelautan dan perikanan yang melimpah. Hal tersebut merupakan modal dasar yang sangat besar untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju, berdaulat, adil, dan makmur serta sebagai sebuah bangsa yang tangguh dalam hal politik, keamanan sosial, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia menuju Indonesia Emas 2045 sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.

Kegiatan pembangunan subsektor perikanan tangkap di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) merupakan salah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan dan sejalan dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029 “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, serta mendukung pencapaian delapan misi Asta Cita sebagai agenda prioritas nasional untuk mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi 8%, penurunan tingkat kemiskinan 0%, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, dengan fokus pada misi Asta Cita ke-2: Swasembada pangan dan ekonomi biru.

Untuk menjalankan peran strategis tersebut, visi visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap adalah “Terwujudnya Tata Kelola Perikanan Tangkap yang Partisipatif, Berkelanjutan, dan Menyejahterakan Nelayan” untuk mewujudkan “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut merupakan prinsip utama yang selanjutnya diterjemahkan kedalam misi, strategi, dan upaya-

Upaya pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap melaksanakan misi Asta Cita sebagai agenda prioritas nasional untuk mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi 8%, penurunan tingkat kemiskinan 0%, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan dengan fokus misi Asta Cita ke-2: Swasembada pangan dan ekonomi biru.

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka tujuan pembangunan perikanan tangkap adalah:

- Menjamin kelestarian sumber daya ikan melalui penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan pengawasan berbasis wilayah pengelolaan;
- Meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha penangkapan ikan melalui pemanfaatan teknologi, modernisasi armada, dan integrasi sistem logistik hasil tangkapan;
- Mengembangkan infrastruktur pelabuhan perikanan sebagai simpul layanan terpadu dan pusat pertumbuhan ekonomi kelautan;
- Memperkuat kelembagaan, perlindungan, dan pemberdayaan nelayan, termasuk nelayan kecil, perempuan, dan pemuda untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing;
- Meningkatkan tata kelola perikanan tangkap yang transparan dan akuntabel, melalui penguatan regulasi, perizinan, pemantauan, serta sistem data dan informasi perikanan.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pembangunan perikanan tangkap, Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual menerapkan strategi dengan menetapkan Sasaran Kegiatan yang dapat digunakan sebagai acuan selama lima tahun sebagai suatu outcome/impact dari program kegiatan yang dilaksanakan. Sasaran Kegiatan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual merupakan bagian dari Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam operasional organisasi, dengan pengukuran dan penilaian kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). Sasaran Kegiatan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dengan masing-masing Indikator Kinerja sebagai berikut:

1. **Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual**, yaitu untuk mendukung Sasaran Program Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap secara Berkelanjutan dengan Indikator Kinerja: Penerimaan PNBPN Non-SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual;

2. **Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual meningkat**, yaitu untuk mendukung Sasaran Program Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap secara Berkelanjutan, dengan Indikator Kinerja: Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual.
3. **Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual yang optimal dan bertanggung jawab**, yaitu untuk mendukung Sasaran Program Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap secara Berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja :
 - a. Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual
 - b. Tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual
 - c. Tingkat pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual
 - d. Persentase pengendalian pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual
 - e. Nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual
4. **Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual**, yaitu untuk mendukung Sasaran Program Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap secara Berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja:
 - a. Kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan
 - b. Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan
5. **Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual**, yaitu untuk mendukung Sasaran Program Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap secara Berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja:
 - a. Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual
 - b. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk

Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual

- c. Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual
- d. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual
- e. Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual
- f. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual
- g. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pelabuhan Perikanan Nusantara Tual
- h. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual

2.3 TARGET KINERJA DAN ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pembangunan perikanan tangkap secara terukur, PPN Tual telah menetapkan target – target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merujuk pada IKU Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Target – target tersebut tertuang pada Perjanjian Kinerja PPN Tual Tahun 2025 sebagai dengan tabel 4 dibawah ini.

Tabel 3 Rencana Kinerja PPN Tual Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Rp. Juta)	480.597
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Ton)	4900
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual yang optimal dan bertanggung jawab	3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Persen)	100
		4	Tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Nilai)	84

		5	Tingkat pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Persen)	81
		6	Persentase pengendalian pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Persen)	40
		7	Nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Nilai)	30.10
4	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	8	Kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	690
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (nilai)	0.26
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	10	Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Nilai)	45.5
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Persen)	85
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Nilai)	88
		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Indeks)	87
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Persen)	76
		15	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Persen)	95
		16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Nilai)	92

		17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Nilai)	71.5
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Indeks)	88.5

Untuk mengukur realisasi dan rencana strategis, Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai sehingga lebih terarah dan terkendali. Target ini dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2025. Hal ini ditetapkan untuk setiap indikator kinerja baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja tingkat kegiatan yang merupakan penjabaran dari program-program yang telah disusun sebelumnya, guna pencapaian sasaran yang sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun Rencana kinerja tahunan 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4 Komposisi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2025

Kode	Program/kegiatan	Pagu Anggaran 2025 (Rp)
A.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	9,418,599,000
2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	172,165,000
2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	5,385,000
2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	9,241,049,000

2.4 PERJANJIAN KINERJA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL TAHUN 2025

Penetapan Kinerja yang telah disusun oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan serta Sasaran Strategis yang telah disusun dalam rangka mendukung visi dan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2021-2025.

Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) PPN Tual pada tahun 2025, untuk semua sasaran strategis berjumlah 7 SS dan 18 IKU. Sasaran strategis ini merupakan suatu panel instrumen yang memetakan sasaran strategis

ke dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi PPN Tual. Sasaran strategis ini berfungsi untuk memudahkan PPN Tual untuk mengkomunikasikan keseluruhan strateginya dalam rangka mensukseskan pencapaian visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai oleh PPN Tual sasaran strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2025 yang disusun pada awal tahun 2025 berdasarkan *Balanced Scorecard* (BSC) PPN Tual, dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5 Perjanjian Kinerja PPN Tual Tahun 2025

	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Rp. Juta)	480.597
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Ton)	4900
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual yang optimal dan bertanggung jawab	3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Persen)	100
		4	Tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Nilai)	84
		5	Tingkat pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Persen)	81
		6	Persentase pengendalian pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Persen)	40
		7	Nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Nilai)	30.10

4	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	8	Kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	690
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (nilai)	0.26
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	10	Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Nilai)	45.5
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Persen)	85
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Nilai)	88
		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Indeks)	87
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Persen)	76
		15	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Persen)	95
		16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Nilai)	92
		17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Nilai)	71.5
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Indeks)	88.5

Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual pada tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 9.418.599.000,- sesuai dengan DIPA PPN Tual Tangkap TA. 2025 Nomor: SP DIPA-032.03.2.622475/2025 Tanggal 26 November 2024 dan

alokasi anggaran tersebut untuk 3 (tiga) kegiatan yakni (1) Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, (2) Pengelolaan Sumber Daya Ikan, (3) Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Blokir anggaran s/d Desember 2025 sebesar Rp.283.928.000, sehingga Total Anggaran bersih yang dapat di kelola PPN Tual adalah **Rp. 9.134.671.000**. Realisasi Anggaran tahun 2025 adalah sebesar **Rp.9.105.195.375** atau sebesar **99,68%** dan Sisa Anggaran **Rp.29.475.625 (0,32%)**. Adapun pagu anggaran yang terdapat pada RKA-KL untuk tahun 2025 dapat dikomposisikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 6 Komposisi Target dan Realisasi Pagu Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan TA 2025

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS		PAGU ANGGARAN 2025 (Rp.)	REALISASI	% REALISASI
A		Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual			9.134.671.000	9.105.195.375	99,68
1	2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	2338. BGA.002	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar	81.112.000	80.923.350	99,77
2	2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	2341. QGA.001	Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional	2.600.000	2.599.000	99.96
			2341. QKB.001	Laporan data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	2.785.000	2.785.000	100,00
5	2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	2342. CAN.955	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	61.890.000	61.878.380	99,98
			2342. EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.500.000	1.500.000	100,00
			2342. EBA.963	Layanan Data dan Informasi	2.000.000	2.000.000	100,00

			2342. EBA.994	Layanan Perkantoran	8.276.187.000	8.248.341.985	99,66
			2342. EBB.951	Layanan Sarana Internal	578.625.000	577.440.000	99,80
			2342. EBB.971	Layanan Prasarana Internal	89.000.000	88.905.800	99,89
			2342. EBC.954	Layanan Manajemen SDM	3.500.000	3.499.500	99,99
			2342. EBD.952	Layanan Perencanaan dan Panganggaran	7.100.000	6.950.500	97,89
			2342. EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3.800.000	3.800.000	100,00
			2342. EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	24.572.000	24.571.860	100,00

2.5 RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL TAHUN 2025

Rencana aksi penetapan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari target – target yang telah disusun dan ditetapkan pada dokumen penetapan kinerja. Dokumen rencana aksi digunakan sebagai alat monitor secara berkala (triwulan) terhadap pencapaian indikator output dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dilakukan upaya – upaya tindak lanjut guna mengeliminir permasalahan pada triwulan berikutnya. Rencana aksi penetapan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 7 Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI
1	Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Rp. Juta)	Terlaksananya kegiatan yang dibiayai dari PNBPN
2	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Ton)	Terlaksananya pelaksanaan tata kelola dan operasional PIPP di pelabuhan perikanan

3	Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Persen)	Terlaksananya sosialisasi Pengusahaan Pelabuhan Perikanan
4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Nilai)	Terlaksananya pelaksanaan Tata Kelola dan Operasional Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) di Pelabuhan Perikanan; pelaksanaan tata kelola dan operasional cara penanganan ikan yang baik (CPIB) dan Inspeksi Pembongkaran ikan di pelabuhan perikanan; pelaksanaan tata kelola dan operasional perusahaan di pelabuhan perikanan; pelaksanaan tata kelola dan operasional K5 di Pelabuhan Perikanan
5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Persen)	Terlaksananya pelaksanaan tata kelola dan operasional kesyahbandaran di pelabuhan perikanan; STBLKK, SPB dan SHTI
6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Persen)	Terlaksananya perkerasan jalan dermaga, Pengadaan dan perbaikan prasarana pelayanan, Pelaksanaan reviu WKOPP Pelabuhan
7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Nilai)	Terlaksananya gerakan bersih pantai
8	Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	Terlaksananya pelaksanaan pemeriksaan kelaikan/pengukuran/pengujian/inspeksi kapal perikanan
9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (nilai)	Terlaksananya sosialisasi dan asistensi pelayanan buku pelaut bagi awak kapal perikanan dan e-pkl (pelaksanaan dalam kantor/balai nelayan/pemerintah)
10	Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Nilai)	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KKP

11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Persen)	Terselesainya temuan LHP BPK di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual
12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Nilai)	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran
13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Indeks)	Pengembangan, Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional
14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Persen)	Pelaporan keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
15	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Persen)	Pelaporan keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Nilai)	Gaji dan Tunjangan
17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Nilai)	Operasional dan Pemeliharaan Kantor
18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Indeks)	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran



BAB 3

AKUNTABILITAS

KINERJA



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan PPN Tual diukur melalui 18 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terbagi ke dalam 7 (tujuh) sasaran strategis. Pencapaian Indikator Kinerja PPN Tual pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PPN Tual Tahun 2025

NO	IDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	1 Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Rp. Juta)	480.597	907.183	188.76%
2	2 Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Ton)	4900	6408.27	130.8%
3	3 Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/ atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	100	100	100%
4	4 Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	84	91	108,3%
5	5 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	81	94.6	116.7%
6	6 Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	40	50.62	126.55%
7	7 Nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Nilai)	30.10	81.35	270.26%

8	8	Kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	690	857	124.20%
9	9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan	0,26	0.56	215%
10	10	Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	45.5	72.57	159.5%
11	11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Persen)	85%	100%	117,65%
12	12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	88	88.00	100.91
13	13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Indeks)	87	86.8	99,77
14	14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Persen)	76	100	131,58%
15	15	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	95%	97.5%	102,63%
16	16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	92	91.85	99.84
17	17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	71,5	86.57	121.08%
18	18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Indeks)	88,50	96.39	108,92%

Berdasarkan tabel tersebut, dari 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan untuk Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual pada Tahun 2025, seluruh IKU telah terealisasi. Hasil pengukuran kinerja PPN Tual Tahun 2025 dilakukan melalui pencapaian target indikator kinerja yang diinput ke dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KINERJAKU).

Dari 18 IKU yang ditetapkan, sebanyak 16 IKU menunjukkan capaian melampaui target yang telah ditentukan, sedangkan 2 IKU lainnya terealisasi namun capaian kinerjanya masih berada di bawah target yang ditetapkan.

Pembahasan masing – masing indikator akan dicantumkan pada sub bab berikut sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 sebagai berikut :

1. **Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun berjalan.**
2. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya atau dengan beberapa tahun terakhir.**
3. **Membandingkan antara realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**
4. **Membandingkan antara realisasi tahun berjalan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di kementerian (jika ada)**
5. **Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**
6. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.**
7. **Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

3.2 EVALUASI DAN ANALISA PENCAPAIAN KINERJA

3.2.1 *Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Rp. Juta)*

Indikator Kinerja Utama dari nilai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Non SDA merupakan ukuran kinerja utama yang digunakan untuk menilai efektivitas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari sumber selain Sumber Daya Alam (SDA). PNBP Non SDA mencakup penerimaan dari jasa layanan publik, perizinan, kerjasama pemanfaatan aset, sewa, maupun pelayanan lain yang diberikan KKP. Indikator ini mencerminkan kemampuan KKP dalam mengoptimalkan potensi pendapatan, meningkatkan kualitas layanan, serta mendukung pembiayaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan tanpa mengandalkan eksploitasi sumber daya alam secara langsung.

Perhitungan capaian kinerja nilai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) non SDA menggunakan formula perhitungan nilai triwulan I = capaian TW I; nilai triwulan II = capaian TW I+TW II; triwulan IV = capaian TW I+TW II+TW IV; triwulan IV = capaian TW I+TW II+TW IV+TW IV dengan satuan nilai Juta Rupiah.

1. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun berjalan

Tabel 9 Target dan Realisasi IKU Penerimaan PNBP Non SDA PPN Tual Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian
Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan (Rp. Juta)	480.597	907.183	188,76 %

Capaian indikator kinerja ini didapat melalui realisasi atas penerimaan negara bukan pajak (PNBP) non SDA sesuai pelaksanaan tugas dan fungsi pelabuhan perikanan. Pada periode bulan januari sampai dengan desember tahun 2025 realisasi capaian PNBP Non SDA sebesar Rp. 907.183.302 juta. Adapun target indikator kinerja nilai PNBP non SDA pada tahun 2025 adalah Rp. 480.597 juta. Jika dibandingkan antara target dan capaian yang telah diperoleh

maka dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja tahun 2025 telah mencapai target dengan persentase capaian sebesar 88,76%.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya atau dengan beberapa tahun terakhir

Tabel 10 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Capaian	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian
Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan (Rp. Juta)	602.150	843.848	140%	480.597	907.183	188,76%

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2025 dengan tahun sebelumnya, indikator kinerja ini mengalami peningkatan dari segi capaian, pada tahun 2024 realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp. 843.848 juta dibandingkan dengan realisasi tahun 2025 penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp. 907.183 juta. Peningkatan capaian ini didukung oleh jumlah stakeholder yang beraktifitas di kawasan pelabuhan perikanan seperti jumlah kunjungan kapal; pemanfaatan lahan; pemanfaatan BMN; jumlah pas masuk kendaraan; jumlah penyaluran air bersih; lelang BMN; dan pendapatan dari rumah dinas.

3. Membandingkan antara realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdpat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Berdasarkan penelaahan terhadap Draft Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, indikator kinerja Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) belum tercantum secara eksplisit sebagai indikator kinerja utama maupun indikator kinerja pendukung. Oleh karena itu, capaian kinerja indikator Nilai PNBP tidak dapat dilakukan perbandingan secara langsung dengan target Renstra yang telah ditetapkan. Dengan demikian, meskipun tidak tercantum sebagai indikator dalam Renstra, capaian Nilai PNBP dapat digunakan sebagai indikator kinerja pendukung (*supporting indicator*) yang menggambarkan

kontribusi unit kerja terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi, terutama dalam aspek penguatan akuntabilitas keuangan negara dan peningkatan kualitas layanan publik.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional /satker lain

Tabel 11 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional /satker lain

PPN Tual			PPN Ambon		
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
480.597	907.183	188,76 %	1.411.020	3.315.770	234,99%

Jika dibandingkan dengan capaian indikator kinerja nilai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) PPN Tual dengan PPN Ambon, persentase nilai PNBP PPN Ambon lebih tinggi dibandingkan PPN Tual baik secara persentase maupun nilai capaian. Meskipun demikian, capaian PPN Tual tetap menunjukkan kinerja yang sangat positif karena mampu melampaui target secara signifikan. Hal ini menandakan efektivitas pengelolaan layanan, optimalisasi pemungutan PNBP, serta komitmen unit kerja dalam meningkatkan kinerja penerimaan negara. Dengan mempertimbangkan karakteristik dan potensi masing-masing satuan kerja, capaian PPN Tual dapat dinilai kompetitif dan selaras dengan upaya peningkatan kinerja nasional di sektor pelabuhan perikanan.

5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP) non sumber daya alam (non-SDA) di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual, terdapat beberapa program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan. Setiap kegiatan memiliki peran penting yang dapat berkontribusi terhadap keberhasilan maupun berpotensi menjadi penyebab kegagalan apabila tidak dijalankan secara optimal.

Upaya peningkatan minat investor merupakan langkah penting dalam memperluas basis ekonomi dan memperkuat penerimaan negara bukan pajak. Keberhasilan dari kegiatan ini sangat bergantung pada efektivitas promosi potensi daerah, kejelasan regulasi, serta dukungan pemerintah. Apabila promosi dilakukan secara intensif dan informatif misalnya melalui forum investasi, publikasi potensi perikanan, atau kerja sama antar lembaga maka peluang investasi baru akan terbuka lebih luas. Kemudahan proses perizinan, jaminan hukum, serta dukungan infrastruktur juga menjadi faktor penentu keberhasilan yang dapat meningkatkan kepercayaan investor. Selain itu rancangan revisi PP 85 Tahun 2021 perihal jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Kementerian Kelautan dan Perikanan diharapkan dapat mendorong peningkatan nilai PNBP non SDA di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Apabila fasilitas pelabuhan, seperti dermaga, tambat labuh, pasokan air bersih, bahan bakar, serta layanan perbekalan kapal tersedia dengan baik, maka kapalkapal perikanan akan lebih tertarik untuk berpangkalan di PPN Tual. Koordinasi dengan otoritas perikanan, penyedia layanan, dan asosiasi nelayan juga dapat memperkuat jejaring kapal pengguna pelabuhan. Selain itu kunjungan kapal perikanan menjadi salah satu indikator penting dalam peningkatan PNBP karena aktivitas kapal berpengaruh langsung terhadap pendapatan pelabuhan, seperti biaya labuh, tambat, dan retribusi jasa lainnya.

Sebaliknya, kegagalan bisa muncul jika infrastruktur pelabuhan belum memadai atau layanan yang diberikan belum efisien. Kurangnya fasilitas pendukung seperti BBM, docking service, serta keterbatasan logistik akan membuat kapal lebih memilih pelabuhan lain yang memiliki layanan lebih lengkap. Persaingan dengan pelabuhan di wilayah sekitar juga menjadi tantangan tersendiri, terutama jika tarif dan waktu pelayanan di PPN Tual belum kompetitif.

Monitoring dan evaluasi (Monev) berfungsi sebagai mekanisme pengendalian untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan hasil yang optimal. Pelaksanaan Monev yang rutin dapat membantu mengidentifikasi permasalahan sejak dini serta memberikan rekomendasi perbaikan yang tepat. Hasil evaluasi juga menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan kebijakan berbasis data (evidence-

32 | Laporan Kinerja Tahun 2025

based policy) yang akan meningkatkan efektivitas pengelolaan PNBP.

Sumber daya manusia (SDM) memiliki peran krusial dalam sistem pengelolaan PNBP. Keberhasilan program peningkatan kapasitas SDM tercermin dari kemampuan pegawai dalam menghitung, mencatat, dan melaporkan penerimaan negara secara tepat waktu dan akurat. Pelatihan yang berkelanjutan mengenai sistem PNBP, regulasi terbaru, serta penggunaan aplikasi digital dapat mengurangi risiko kesalahan perhitungan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

- Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja nilai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 12 capaian indikator kinerja nilai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) non SDA

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AAROxCRO	(AAROxCRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(2)	(6)=(5)-(4)
480.597	907.183	188,76 %	1.411.020	3.315.770	234,99%

$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$	144 %
$Nilai Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= \frac{144\%}{20} + (20 \times 50)$	410 %

Realisasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung tercapainya IKU penerimaan negara bukan pajak (PNBP) non SDA di PPN Tual sebesar 11.477.350 atau 44,73% dengan nilai efisiensi penggunaan anggaran sebesar 410 %

- Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan dan pelayanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Non SDA di PPN Tual secara kuantitatif telah memadai dan terstruktur dengan baik. Komposisi SDM yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua Tim Kerja TKPU, 1 (satu) orang Bendahara Penerimaan, serta 11 (sebelas) orang Petugas Pelayanan dari Timja TKPU menunjukkan adanya pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Keberadaan Ketua Tim Kerja TKPU berperan strategis dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta melakukan pengendalian internal atas proses penerimaan PNBP. Bendahara penerimaan memiliki peran penting dalam menjamin tertib administrasi, akurasi pencatatan, dan akuntabilitas keuangan, sehingga mendukung terwujudnya tata kelola PNBP yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, petugas pelayanan berperan langsung dalam pelaksanaan layanan kepada pengguna jasa, yang berdampak pada kelancaran proses pemungutan PNBP dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Secara kualitas, SDM yang ada telah mampu menjalankan fungsi pelayanan dan pengelolaan PNBP Non SDA secara optimal sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, untuk menjaga dan meningkatkan capaian kinerja ke depan, diperlukan penguatan kompetensi SDM secara berkelanjutan melalui pelatihan teknis, peningkatan pemahaman regulasi PNBP, serta penguasaan sistem informasi pelayanan dan keuangan. Upaya tersebut akan semakin memperkuat peran SDM sebagai faktor kunci dalam optimalisasi penerimaan PNBP Non SDA dan peningkatan akuntabilitas kinerja unit kerja.

7. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tercapainya Indikator Kinerja Utama ini tentunya didukung oleh program atau kegiatan yang dilaksanakan seperti monitoring dan evaluasi capaian penerimaan negara bukan pajak dari sektor non sumber daya alam baik secara luring maupun daring.

Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung peningkatan PNBP. Dengan tersedianya peralatan modern seperti timbangan digital, sistem e-retribusi, serta pengelolaan cold storage yang efisien, maka proses pencatatan dan penagihan PNBP dapat dilakukan dengan lebih transparan dan akurat.

Pemeliharaan dan perawatan berkala juga penting untuk menjamin keberlanjutan operasional fasilitas agar tidak terjadi gangguan pelayanan. Dukungan anggaran, baik dari APBN maupun kerjasama dengan pihak ketiga, akan mempercepat proses pembangunan dan modernisasi infrastruktur pelabuhan.

Namun demikian, apabila alokasi anggaran tidak memadai atau manajemen aset belum tertata dengan baik, pembangunan fasilitas bisa terhambat dan berdampak pada turunnya kualitas pelayanan. Peralatan yang rusak atau tidak sesuai standar dapat mengakibatkan kehilangan potensi pendapatan. Selain itu, lemahnya koordinasi antar unit kerja dalam penggunaan dan pengelolaan fasilitas juga dapat menyebabkan inefisiensi serta duplikasi kegiatan.

Sumber daya manusia (SDM) memiliki peran krusial dalam sistem pengelolaan PNBP. Keberhasilan program peningkatan kapasitas SDM tercermin dari kemampuan pegawai dalam menghitung, mencatat, dan melaporkan penerimaan negara secara tepat waktu dan akurat. Pelatihan yang berkelanjutan mengenai sistem PNBP, regulasi terbaru, serta penggunaan aplikasi digital dapat mengurangi resiko kesalahan perhitungan.

Selain itu, pembagian tugas yang jelas dan adanya supervisi internal dapat meningkatkan akuntabilitas serta keandalan data penerimaan. Namun,

apabila pelatihan tidak dilakukan secara rutin atau rotasi pegawai berlangsung terlalu cepat tanpa proses transfer pengetahuan yang baik, maka kompetensi pegawai bisa menjadi tidak merata. Kurangnya pengawasan juga berpotensi menyebabkan kesalahan administrasi yang berdampak pada ketidaksesuaian data PNBP. Selain itu, resistensi terhadap penggunaan sistem digital baru atau kurangnya adaptasi terhadap perubahan regulasi dapat memperlambat kinerja unit kerja.

Monitoring dan evaluasi (Monev) berfungsi sebagai mekanisme pengendalian untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan hasil yang optimal. Pelaksanaan Monev yang rutin dapat membantu mengidentifikasi permasalahan sejak dini serta memberikan rekomendasi perbaikan yang tepat. Hasil evaluasi juga menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan kebijakan berbasis data (evidence-based policy) yang akan meningkatkan efektivitas pengelolaan PNBP.

Selain itu, pelaporan hasil evaluasi yang transparan turut memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara di sektor perikanan. Sebaliknya, apabila Monev dilakukan hanya sebagai formalitas administratif tanpa tindak lanjut yang nyata, maka rekomendasi perbaikan tidak akan berdampak signifikan terhadap peningkatan kinerja. Tidak tersedianya data yang akurat atau sistem informasi yang terintegrasi juga menjadi hambatan besar dalam melakukan analisis kinerja yang komprehensif. Lemahnya koordinasi antar unit dalam menindaklanjuti hasil evaluasi dapat menyebabkan permasalahan berulang dan menurunkan efektivitas pengawasan

3.2.2 Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Ton)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Volume Produksi Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual merupakan ukuran capaian kinerja organisasi dalam mendukung peningkatan produktivitas perikanan tangkap yang berpusat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual. Indikator ini menggambarkan jumlah hasil tangkapan ikan yang didaratkan, dicatat, dan dikelola melalui sistem pelayanan pelabuhan, sehingga mencerminkan intensitas aktivitas perikanan serta peran PPN Tual sebagai pusat pendaratan ikan di wilayah timur Indonesia.

Peningkatan volume produksi menjadi tolok ukur keberhasilan pelabuhan dalam:

1. Memfasilitasi kegiatan pendaratan ikan secara efektif dan efisien.
2. Menunjukkan daya dukung infrastruktur, layanan, dan sistem tata kelola pelabuhan.
3. Mendorong nilai tambah ekonomi bagi nelayan, pelaku usaha perikanan, dan masyarakat sekitar.

Dengan demikian, pencapaian indikator ini tidak hanya berorientasi pada kuantitas hasil produksi, tetapi juga pada keberlanjutan pemanfaatan sumber daya ikan serta kontribusi nyata terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat pesisir khususnya di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual.

Indikator kinerja ini merupakan indikator yang diukur dan dilaporkan setiap triwulan. Target IKU ini pada tahun 2025 yaitu sebanyak 4900 ton. Adapun penjelasan realisasi IKU ini dijelaskan di bawah ini.

1. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun berjalan

Tabel 13 Target dan Realisasi IKU Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Tual Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian
Volume produksi perikanan tangkap di PPN Tual (Ton)	4900	6408,27	130,8%

Capaian nilai pada indikator kinerja volume produksi perikanan tangkap diperoleh berdasarkan hasil pendataan dan pencatatan produksi yang dilaksanakan secara berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual selama periode Januari hingga Desember 2025. Data tersebut bersumber dari aktivitas pendaratan ikan oleh kapal perikanan yang beroperasi dan tercatat secara resmi di PPN Tual, sehingga mencerminkan kondisi riil produksi perikanan tangkap pada wilayah kerja pelabuhan. Untuk tahun 2025, PPN Tual menetapkan target volume produksi perikanan tangkap sebesar 4.900 ton sebagai tolok ukur kinerja yang harus dicapai oleh unit kerja.

Berdasarkan hasil pendataan tersebut, realisasi volume produksi perikanan tangkap yang berhasil dicapai selama tahun 2025 adalah sebesar 6.408,27 ton, atau setara dengan 130,8% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini

menunjukkan adanya peningkatan kinerja yang signifikan dibandingkan dengan target perencanaan, serta mencerminkan efektivitas pelaksanaan fungsi pelayanan kepelabuhanan dan dukungan terhadap aktivitas penangkapan ikan. Dengan memperhatikan formula penghitungan indikator kinerja dan hasil realisasi yang melampaui target, dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja volume produksi perikanan tangkap pada Unit Kerja PPN Tual Tahun 2025 telah tercapai dengan sangat baik.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya atau dengan beberapa tahun terakhir

Tabel 14 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Triwulan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Volume produksi perikanan tangkap di PPN Tual (Ton)	2023	2250	4106	182,79%
	2024	4229	4970,16	117,53%
	2025	4900	6408,27	130,8%

Berdasarkan data capaian volume produksi perikanan tangkap di PPN Tual selama periode tahun 2023 hingga 2025, terlihat adanya tren kinerja yang positif dan konsisten melampaui target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023, target volume produksi ditetapkan sebesar 2.250 ton, sementara realisasi yang dicapai mencapai 4.106 ton atau setara dengan 182,79% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat tinggi, dimana realisasi produksi hampir dua kali lipat dari target perencanaan yang telah ditetapkan pada tahun tersebut.

Selanjutnya, pada tahun 2024, target volume produksi meningkat secara signifikan menjadi 4.229 ton. Realisasi produksi yang tercatat sebesar 4.970,16 ton, dengan persentase capaian sebesar 117,53%. Meskipun persentase capaian lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, realisasi produksi tetap melampaui target dan menunjukkan peningkatan volume produksi secara absolut. Tren peningkatan kinerja ini berlanjut pada tahun 2025, dengan target produksi sebesar 4.900 ton dan realisasi mencapai 6.408,27 ton atau 130,8% dari target. Secara keseluruhan, capaian selama tiga tahun berturut-turut ini menunjukkan bahwa indikator kinerja volume produksi perikanan tangkap di PPN Tual tidak hanya tercapai, tetapi juga

melampaui target setiap tahunnya, mencerminkan peningkatan aktivitas perikanan dan efektivitas pengelolaan serta pelayanan kepelabuhanan di PPN Tual.

3. Membandingkan antara realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 15 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Target Renstra DJPT 2025	Realisasi PPN Tual 2025	% Capaian
Volume produksi perikanan tangkap di PPN Tual (Ton)	6.190.000	6408,27	0,10 %

Berdasarkan tabel tersebut, capaian volume produksi perikanan tangkap di PPN Tual pada tahun 2025 tercatat sebesar 6.408,27 ton. Capaian ini dibandingkan dengan target produksi DJPT (Eselon I) yang merupakan target nasional produksi perikanan tangkap sebesar $\pm 1,6$ juta ton, yang dihimpun dari kontribusi 524 pelabuhan perikanan di seluruh Indonesia. Dengan capaian tersebut, PPN Tual memberikan kontribusi sekitar 0,10% terhadap total target produksi nasional DJPT.

Persentase kontribusi tersebut menunjukkan bahwa PPN Tual merupakan salah satu pelabuhan pendukung dalam pencapaian target produksi perikanan tangkap nasional. Meskipun secara persentase relatif kecil, kontribusi PPN Tual tetap memiliki arti strategis, khususnya dalam mendukung pemerataan produksi perikanan di kawasan timur Indonesia. Capaian ini juga mencerminkan peran PPN Tual sebagai simpul aktivitas perikanan tangkap regional yang secara kolektif, bersama pelabuhan perikanan lainnya, berkontribusi terhadap pencapaian target nasional DJPT.

4. Membandingkan antara realisasi tahun berjalan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di kementerian (jika ada)

Tabel 16 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan

PPN Tual			PPN Kwandang		
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
4.900	6408,27	130,8 %	5.440	6430	118,2%

Perbandingan dengan satker lain dilakukan terhadap satker dengan klasifikasi/ kelas Pelabuhan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang sama. Jika dibandingkan dengan capaian volume produksi perikanan tangkap PPN Kwandang, capaian volume produksi PPN Tual lebih kecil dengan selisih 11,8 ton. Target PPN Tual dan PPN Kwandang berbeda tergantung pada kondisi pelabuhan masing-masing walaupun dengan klasifikasi/kelas Pelabuhan yang sama.

Berdasarkan tabel tersebut, capaian kinerja volume produksi pada PPN Tual dan PPN Kwandang menunjukkan hasil yang melampaui target yang telah ditetapkan. PPN Tual menetapkan target sebesar 4.900, dengan realisasi mencapai 6.408,27 atau sebesar 130,8 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa realisasi produksi PPN Tual jauh melebihi target, yang mengindikasikan tingginya aktivitas produksi perikanan tangkap serta efektivitas pengelolaan pelabuhan. Sementara itu, PPN Kwandang menetapkan target sebesar 5.440 dan berhasil merealisasikan produksi sebesar 6.430 atau setara dengan 118,2 persen dari target. Meskipun persentase capaian PPN Kwandang lebih rendah dibandingkan PPN Tual, hasil ini tetap mencerminkan kinerja yang sangat baik karena realisasi produksi berhasil melampaui target yang direncanakan. Secara keseluruhan, kedua pelabuhan menunjukkan kontribusi positif terhadap pencapaian target produksi perikanan.

5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

Tercapainya Indikator Kinerja Utama ini tentunya didukung oleh program atau kegiatan yang dilaksanakan seperti dilakukannya monitoring dan evaluasi rutin petugas pendataan baik baik melalui luring maupun daring, melakukan pengawasan langsung terhadap kapal yang melakukan aktivitas pembongkaran di dermaga Pelabuhan, melakukan validasi terhadap data produksi yang diinput melalui aplikasi Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP).

Adanya program TCG (Technical Cooperation Guidelines) juga diharapkan dapat menjadi katalis sehingga dapat meningkatkan volume produksi khususnya di wilayah Kota Tual dimana dengan adanya program tersebut dapat meningkatkan jumlah armada yang beroperasi di WPPNRI 718 dengan skema kerjasama dengan Tiongkok. Dalam pelaksanaannya perlu adanya saling berkomitmen untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara ketat dan kontinu agar sumber daya ikan dan lingkungan tetap terjaga dengan baik serta mencegah terjadinya kegiatan penangkapan ikan yang tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU Fishing).

Implementasi Penangkapan Ikan Terukur (PIT) secara penuh juga diharapkan dapat meningkatkan produksi perikanan tangkap di wilayah perairan PPN Tual yang akan berdampak pula terhadap peningkatan ekonomi di wilayah timur. Program tersebut akan mendorong kapal penangkap yang beroperasi di wilayah perairan laut Arafura / WPPNRI 718 untuk melakukan aktivitas pembongkaran sesuai dengan zona daerah penangkapan ikan nya. Hal ini akan mendorong multiplier effect. Efek ekonomi berganda (multiplier effect) penangkapan ikan terukur (PIT) merujuk pada dampak positif yang meluas di luar sektor perikanan tangkap, mencakup pertumbuhan investasi, penciptaan lapangan kerja, perkembangan industri pendukung seperti pelabuhan dan pengolahan ikan, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan ini bertujuan menciptakan perputaran uang yang signifikan dengan mengelola sumber daya ikan secara berkelanjutan, memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati sebesar-besarnya bagi masyarakat.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

- Penggunaan Anggaran

Dukungan anggaran dalam pemenuhan Indikator Kinerja ini adalah pada Program, Pelaksanaan tata kelola dan operasional PIPP di pelabuhan perikanan. Berikut penghitungan lebih detail terkait efisiensi penggunaan anggaran ini :

Tabel 17 capaian penghitungan lebih detail terkait efisiensi penggunaan anggaran

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AAROxCRO	(AAROxCRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(2)	(6)=(5)-(4)
Volume Produksi Perikanan Tangkap PPN Tual	130,8 %	2.000.000	2.000.000	2.616.000	616.000

$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$	30,8%
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$	127%

Realisasi anggaran Tahun 2025 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp2,000,000,- atau 100% yang digunakan untuk menunjang dalam tercapainya indikator volume produksi perikanan tangkap. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 127%, hal ini menunjukkan

tingkat efisiensi penggunaan anggarannya sangat baik dan perlu dipertahankan di Tahun 2026.

- Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian IKU Volume produksi perikanan tangkap di PPN Tual, didukung oleh 6 (enam) orang enumerator, 4 (empat) operator PIPP dan 1 (satu) orang petugas statistik. Kegiatan pendaratan ikan di PPN Tual cenderung kondusif dan aman, karena dalam hal pendataan dilakukan sistem shift pegawai untuk mengoptimalkan pencatatan volume produksi yang didaratkan.

7. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tercapainya Indikator Kinerja Utama ini tentunya didukung oleh program atau kegiatan yang dilaksanakan dari bulan Januari hingga Desember di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual. Untuk meningkatkan volume produksi perikanan tangkap pada periode selanjutnya rekomendasi dan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut :

- 1) Mengimplementasikan SOP proses bisnis level 3 dengan cara melakukan penimbangan ikan di setiap kapal yang melakukan proses bongkar di PPN Tual
- 2) Melakukan pendataan di seluruh kapal perikanan baik di kapal izin pusat, izin daerah maupun kapal-kapal motor tempel yang melakukan pembongkaran di PPN Tual
- 3) Mengawal setiap proses pembongkaran kapal untuk meminimalisir kesalahan data
- 4) Mengarahkan kapal yang beroperasi di WPPNRI 718 yang berpangkalan di PPN Tual untuk melakukan aktivitas pembongkaran ikan hasil tangkapan di PPN Tual

Beberapa program/kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja IKU Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual diantaranya:

- 1) Telah dilakukan pendataan seluruh kapal yang masuk di PPN Tual baik kapal ukuran < 30 GT maupun kapal ukuran > 30 GT.

- 2) Proses validasi hasil pendataan enumerator maupun petugas lapangan untuk melihat kesesuaian alat tangkap, kesesuaian volume pendataan berdasarkan ukuran kapal, jenis ikan dan harga produksi ikan.
- 3) Terdapat pelaksanaan inovasi Dashboard Online Pelabuhan Perikanan Tual (Dolpint), dapat diakses pada laman bit.ly/dataharianppntual untuk melihat data realtime hasil pendataan ikan di PPN Tual sehingga dapat menjadi kontrol maupun pengawasan terhadap tercapainya target produksi di tahun 2025.
- 4) Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Enumerator Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan di Jakarta pada tanggal 5-8 Agustus 2025 yang bertujuan untuk meningkatkan proses pendataan dan pelaporan operasional Pelabuhan di masing-masing Pelabuhan Perikanan.

3.2.3 Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/ atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual

Capaian Indikator Kinerja Utama Permohonan Perusahaan yang dianalisis dan/atau dievaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan perizinan perusahaan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh permohonan perusahaan yang masuk telah dilakukan proses analisis dan evaluasi secara administratif maupun teknis dengan mengacu pada regulasi serta standar operasional prosedur yang ditetapkan.

Selain itu, kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap permohonan perusahaan turut berkontribusi dalam menjaga kualitas hasil analisis dan memastikan kesesuaian kegiatan perusahaan dengan rencana tata ruang, ketentuan pemanfaatan Barang Milik Negara, serta potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

1. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun berjalan.

Tabel 18 Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun berjalan.

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian
Persentase Permohonan Perusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di PPN Tual	100	100	100%

Capaian indikator kinerja ini diperoleh melalui usulan permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi. Nilai capaian indikator kinerja PPN Tual pada tahun ini adalah 100%. Adapun target yang telah ditetapkan adalah 100%. Pada tahun 2025 terdapat 4 usulan permohonan perusahaan yang masuk ke PPN Tual diantaranya adalah PT. IAMBEU Mina Utama, Koperasi Nelayan Nam Ngil, PT. Sinergi Multi Persada dan PT. Sinar Pesona Laut. Jika dibandingkan antara target dan capaian yang telah diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja ini telah mencapai target dengan persentase sebesar 100%.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya atau dengan beberapa tahun terakhir.

Tabel 19 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya atau dengan beberapa tahun terakhir

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Permohonan Perusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di PPN Tual	2024	100	100	100%
	2025	100	100	100%

Jika dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja yang sama pada tahun 2024 dengan nilai persentase permohonan perusahaan tahun 2025, maka terdapat tren capaian yang sama, artinya bahwa setiap usulan permohonan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh petugas pelayanan jasa pemanfaatan BMN di PPN Tual.

3. Membandingkan antara realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 20 Perbandingan antara realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indikator Kinerja	Target Renstra DJPT 2025	Realisasi PPN Tual 2025	% Capaian
Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di PPN Tual	-	100	-

Indikator Kinerja Persentase Permohonan Pengusahaan di Pelabuhan merupakan IKU turunan dari DJPT yaitu Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan (Persen), dimana indikator kinerja tingkat pelayanan di pelabuhan perikanan dengan target untuk DJPT tahun 2025 sebesar 49%. PPN Tual berdasarkan data hasil capaian persentase pengembangan fasilitas pada tahun 2025 tercapai 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan permohonan pengusahaan di pelabuhan perikanan telah dilaksanakan secara efektif, serta proses analisis dan/atau evaluasi permohonan berjalan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan tercapainya IKU tersebut maka PPN Tual telah memberikan kontribusi positif dan signifikan dalam mendukung pencapaian target IKU DJPT tahun 2025, khususnya pada aspek peningkatan kualitas dan efektivitas pengelolaan pelabuhan perikanan.

4. Membandingkan antara realisasi tahun berjalan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di kementerian (jika ada)

Tabel 21 Perbandingan antara realisasi tahun berjalan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di kementerian

PPN Tual			PPN Ambon		
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
100	100	100%	100	100	100%

Jika dibandingkan dengan standar nasional/satuan kerja lain, yaitu PPN Ambon, realisasi kinerja indikator persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan dievaluasi di PPN Tual menunjukkan capaian yang setara. Kedua satuan kerja sama-sama menetapkan target sebesar 100 dan berhasil merealisasikannya secara penuh, sehingga tingkat pencapaian kinerja masing-masing mencapai 100%. Dengan capaian yang sama dengan PPN Ambon, PPN Tual dapat dikatakan telah mampu menjaga kualitas kinerja, efektivitas proses pelayanan, serta konsistensi dalam memenuhi target yang ditetapkan.

5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Target persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Tual tercapai sesuai target Tahun 2025 yaitu 100%. Pada tahun 2025 terdapat perubahan regulasi tentang mekanisme permohonan penggunaan tanah dan/atau bangunan di pelabuhan perikanan yang sebelumnya merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 85 Tahun 2021, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 79 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor PER.08/MEN/2012, sekarang merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 115/PMK.06/2020 yang mengatur tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.

Hambatan tercapainya indikator ini adalah akibat peralihan regulasi sehingga proses permohonan sampai dengan penandatanganan perjanjian kontrak memakan waktu yang lebih lama antara 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan. Selain itu kepatuhan pengusaha dalam hal progres pembangunan fisik bangunan juga menjadi kendala, sehingga PPN Tual harus berupaya terus melakukan koordinasi terkait hal tersebut.

Adapun beberapa upaya yang dilakukan adalah memastikan semua proses permohonan pengusahaan dilakukan dengan cepat dan tepat dengan memperhatikan seluruh kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan sehingga tidak ada kendala dalam pengusulan permohonan ke jenjang Eselon I Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan seterusnya.

Meskipun capaian kinerja menunjukkan tren positif, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian dalam meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di PPN Tual sehingga perlu beberapa langkah yang akan dilakukan diantaranya yaitu :

- Penguatan pemahaman dan implementasi Peraturan Menteri Keuangan nomor 115/PMK.06/2020 melalui sosialisasi internal dan pembahasan teknis secara berkala. Hal ini bertujuan agar seluruh proses analisa dan evaluasi permohonan perusahaan dapat dilaksanakan secara seragam, tepat, dan sesuai ketentuan yang berlaku kepada stakeholder di PPN Tual.
- Penyesuaian dan penyempurnaan SOP permohonan perusahaan tanah dan/atau bangunan di lingkungan PPN Tual agar selaras dengan regulasi terbaru, sehingga alur proses menjadi lebih jelas, efisien, dan dapat meminimalisir keterlambatan.
- Peningkatan kualitas layanan administrasi melalui mekanisme verifikasi awal kelengkapan dokumen permohonan untuk memastikan seluruh persyaratan terpenuhi sebelum diusulkan ke jenjang Eselon I Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi waktu perbaikan dokumen dan mempercepat proses persetujuan.
- Koordinasi yang lebih intensif dan berkelanjutan dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap serta unit terkait lainnya akan terus dilakukan guna mempercepat proses evaluasi dan penandatanganan perjanjian kontrak perusahaan.
- Peningkatan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres pembangunan fisik oleh pengusaha sesuai perjanjian yang telah disepakati. Apabila ditemukan keterlambatan atau ketidaksesuaian, akan dilakukan pembinaan serta penegasan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

- Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja presentasi pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 22 capaian penghitungan lebih detail terkait efisiensi penggunaan anggaran

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AAROxCRO	(AAROxCRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(2)	(6)=(5)-(4)
Persentase Permohonan Perusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di PPN Tual	100%	25.656.000	11.477.350	25.656.000	14.178.650

$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 1$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$	55,26 %
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{55,26}{20} \times 50 \right)$	188,16 %

Realisasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung tercapainya IKU persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di pelabuhan perikanan sebesar 11.477.350 atau 44,73% dengan nilai efisiensi penggunaan anggaran sebesar 188,16%.

- Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung tercapainya indikator kinerja persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Tual didukung oleh sumber daya manusia yang berjumlah 9 orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua tim kerja TKPU, 1 (satu) orang operator layanan, 1 (satu) orang bendahara penerimaan dan 7 (tujuh) orang anggota timja

TKPU. Kegiatan permohonan perusahaan telah didukung dengan jumlah SDM yang memadai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing SDM. Komposisi dan pembagian tugas SDM tersebut dinilai telah memadai dan proporsional dalam mendukung pelaksanaan proses permohonan perusahaan, mulai dari penerimaan berkas, verifikasi administrasi dan teknis, analisis dan evaluasi permohonan, hingga penatausahaan penerimaan negara. Dengan dukungan SDM yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, pelaksanaan layanan permohonan perusahaan di PPN Tual dapat berjalan secara efektif, tepat waktu, dan akuntabel, sehingga berkontribusi positif terhadap pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

7. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program atau kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/ atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual adalah sebagai berikut :

1) Pelayanan Perizinan dan Perusahaan Pelabuhan Perikanan

Program ini merupakan program utama yang secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja dimaksud. Melalui kegiatan penerimaan, verifikasi, analisis, dan evaluasi permohonan perusahaan (pemanfaatan lahan, bangunan, dan fasilitas pelabuhan), PPN Tual mampu memproses sebagian besar permohonan yang masuk secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

2) Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Perusahaan

ketersediaan dan penerapan SOP perusahaan pelabuhan menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran analisis dan evaluasi permohonan.

3) Koordinasi Internal dan Eksternal

Koordinasi yang baik antara seksi teknis, tata usaha, serta pihak eksternal (pelaku usaha dan instansi terkait) turut menunjang pencapaian indikator kinerja.

Adapun beberapa faktor yang Menjadi Faktor Penghambat (Kegagalan) diantaranya adalah :

1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Teknis

Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM yang secara khusus menangani perusahaan pelabuhan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi optimalisasi pencapaian kinerja

2) Kelengkapan Dokumen Permohonan dari Pemohon

Sebagian permohonan perusahaan yang masuk belum memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai ketentuan.

3) Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pendukung

Keterbatasan fasilitas kerja dan sistem pendukung administrasi turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan analisis dan evaluasi permohonan.

Secara umum, pencapaian pernyataan kinerja Persentase permohonan perusahaan yang dianalisis dan/atau dievaluasi di PPN Tual didukung oleh program pelayanan perusahaan pelabuhan, penerapan SOP, serta koordinasi yang efektif. Namun demikian, masih terdapat faktor penghambat berupa keterbatasan SDM, ketidaklengkapan dokumen permohonan, dan keterbatasan sarana prasarana yang perlu menjadi perhatian untuk peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

3.2.4 *Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Nilai)*

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pengelolaan pelabuhan secara menyeluruh, mencakup aspek pelayanan, pemanfaatan fasilitas, tata kelola administrasi, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara definisi IKU ini merupakan upaya untuk menilai tingkat kinerja operasional yang didasarkan atas ketentuan kriteria teknis dan operasional kelas pelabuhan perikanan (sesuai SK Dirjen Perikanan Tangkap No 20/KEP-DJPT/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan, perubahan atas SK Dirjen Perikanan Tangkap No. 432/DPT.3/ OT.220.D3/I/2008). Sebagai bagian dari kegiatan manajemen untuk menilai kinerja Pelabuhan Perikanan. Acuan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perikanan. Ruang lingkup meliputi : 1) administrasi dan sistem informasi; 2) fasilitas pelabuhan

perikanan; 3) pelayanan umum; 4) investasi dan industri.

Pencapaian indikator ini mencerminkan:

1. Tingkat pemanfaatan sarana dan prasarana pelabuhan yang mendukung kelancaran aktivitas perikanan tangkap.
2. Kualitas pelayanan pelabuhan kepada nelayan, pelaku usaha perikanan, dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Tata kelola pelabuhan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip pengelolaan pelabuhan perikanan berkelanjutan.
4. Kontribusi pelabuhan terhadap peningkatan daya saing sektor perikanan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Dengan demikian, IKU ini menjadi tolok ukur strategis dalam menilai keberhasilan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual dalam melaksanakan pengelolaan yang profesional, berdaya guna, dan bertanggung jawab, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan perikanan secara nasional.

Indikator kinerja ini merupakan penilaian kegiatan operasional Pelabuhan perikanan sesuai dengan keputusan Dirjen No.20/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan yang ada pada aplikasi PIPP. Sesuai dengan perjanjian kinerja “Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual” di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual ini dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual melalui aplikasi PIPP. Penilaian terhadap terpenuhinya penyediaan data Operasional Pelabuhan dengan indikator sebanyak 27 (dua puluh tujuh) jenis data yang harus diinput melalui aplikasi PIPP. Indikator kinerja ini diukur dan dilaporkan setiap triwulan. Target IKU ini pada tahun 2025 yaitu sebesar 84. Adapun penjelasan realisasi IKU ini dijelaskan di bawah ini.

1. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun berjalan

Tabel 23 Target dan Realisasi IKU Tingkat Kinerja PPN Tual Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian
Tingkat Kinerja PPN Tual (Nilai)	84	86,94	103,5%

Berdasarkan target Tingkat Kinerja PPN Tual Periode Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebesar 84, telah terealisasi dengan rata-rata 86,94 atau persentase capaiannya 103,5% dari target.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya atau dengan beberapa tahun terakhir.

Tabel 24 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya atau dengan beberapa tahun terakhir

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Tingkat Kinerja PPN Tual (Nilai)	2023	83	74,94	90,29%
	2024	84	75,67	90,08%
	2025	84	86,94	103,5%

Berdasarkan target Tingkat Kinerja PPN Tual Periode Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebesar 84, telah terealisasi dengan rata-rata 86,94 atau persentase capaiannya 103,5%. Target Tingkat kinerja tersebut merupakan perhitungan rata-rata dari nilai evaluasi kinerja setiap bulan. Jika mengacu hasil capaian periode triwulan ini maka target tahunan sebesar 84% tercapai.

3. Membandingkan antara realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 25 Perbandingan antara realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indikator Kinerja	Target Renstra DJPT 2025	Realisasi PPN Tual 2025	% Capaian
Tingkat Kinerja PPN Tual (Nilai)	16 %	86,94 %	543,38%

Indikator Kinerja Tingkat Kinerja PPN Tual merupakan IKU turunan dari DJPT dimana yaitu Persentase Pelabuhan Perikanan dengan tingkat kinerja baik (Persen), dimana target pada tahun 2025 yaitu sebesar 16%. PPN Tual berdasarkan data hasil capaian Tingkat kinerja tahun 2025 tercapai 86,94% sehingga masuk pada Pelabuhan dengan kategori Tingkat kinerja Sangat Baik (86-100). Dengan tercapainya IKU tersebut maka PPN Tual turut andil

berkontribusi dalam tercapainya target IKU DJPT meningkatkan persentase Pelabuhan perikanan yang memiliki Tingkat kinerja baik.

4. Membandingkan antara realisasi tahun berjalan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di kementerian (jika ada)

Tabel 26 Perbandingan antara realisasi tahun berjalan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di kementerian

PPN Tual			PPN Ambon		
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
84	86,94	103,5%	84	94	111,9%

Berdasarkan tabel di atas, tingkat kinerja PPN Tual lebih kecil jika dibandingkan dengan PPN Kwandang yang merupakan salah satu pelabuhan perikanan UPT Ditjen Perikanan Tangkap. Beberapa parameter yang di evaluasi pada kinerja pelabuhan diantaranya yaitu frekuensi pengiriman data, frekuensi kunjungan kapal, penyaluran logistik perbekalan kapal (BBM, air bersih, es), sarana prasarana penunjang kegiatan operasional pelabuhan dll. Berdasarkan data evaluasi kinerja tahunan, kategori kinerja PPN Tual termasuk kedalam kategori sangat baik dengan range penilaian (66 - 85) sedangkan untuk tingkat kinerja PPN Kwandang termasuk kedalam kategori sangat baik juga dengan nilai 94.

5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tingkat Kinerja PPN Tual pada Tahun 2025 yaitu 86,94 dari target 84 dengan persentase capaian sebesar 103,5%% (Mencapai target). Jika dibandingkan dengan tingkat kinerja pada tahun sebelumnya PPN Tual mengalami peningkatan sebesar 11,27 atau secara persentase meningkat sebesar 14,89% dari tahun lalu. Hasil identifikasi penyebab tercapainya target kinerja pada tahun 2025 yaitu dipengaruhi oleh beberapa parameter yang mengalami peningkatan. Beberapa komponen tingkat kinerja pelabuhan dengan penilaian tinggi yaitu diantaranya :

- a. Frekuensi pengiriman data (PIPP)

- b. Realisasi Penyerapan Anggaran
- c. Pendapatan Pelabuhan
- d. Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan
- e. Penyaluran logistik (Air Bersih, Es, BBM
- f. Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan
- g. Ketersediaan Lahan Pelabuhan
- h. Pelayanan Tambat Labuh

Sedangkan untuk parameter dengan penilaian yang masih perlu ditingkatkan yaitu :

- a. Kapasitas Daya Tampung Kolam Pelabuhan
- b. Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di WKOPP
- c. Produksi Perikanan
- d. Fasilitasi Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, Perkarantinaan Ikan, Publikasi
- e. Penerbitan STBLKK

Jumlah kunjungan kapal dan produksi harian sangat berperan dalam mendukung terhadap tingkat kinerja operasional pelabuhan. Semakin tinggi jumlah kunjungan, semakin besar ukuran kapal (GT) dan ikan yang didaratkan (>30 ton/hari) akan menunjang terhadap penilaian kinerja operasional pelabuhan. Evaluasi terhadap pelaksanaan tingkat kinerja operasional pada tahun 2025 diantaranya yaitu kegiatan yang berupa sosialisasi, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan sudah diinput di aplikasi PIPP sehingga penilaian pada kriteria tersebut menjadi tinggi.

Selain itu, dengan diterbitkannya peraturan mengenai PP Tual sebagai pelabuhan pangkalan maka penginputan frekuensi aktivitas kapal, produksi perikanan, frekuensi pengiriman data, penyaluran logistik di PP Tual menjadi terpisah dengan PPN Tual. Hal ini berdampak kepada menurunnya penilaian di beberapa kriteria pada tingkat kinerja operasional Pelabuhan.

Berdasarkan data tingkat operasional pada bulan Desember merupakan penilaian tingkat kinerja tertinggi pada tahun 2025 sebesar 92,75% (Sangat Baik) sedangkan bulan Februari merupakan penilaian tingkat kinerja terendah di PPN Tual dengan nilai 72. Jika kedua periode tersebut dibandingkan perbedaan nilai tersebut disebabkan oleh beberapa parameter diantaranya yaitu perbedaan jumlah kunjungan kapal antara 2 bulan tersebut,

produksi perhari, jumlah kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis, dan penyaluran perbekalan / logistik. Parameter kinerja yang sudah memiliki nilai maksimal yaitu pada kriteria logbook, aplikasi spb-online, SHTI, Realisasi penyerapan anggaran, pendapatan pelabuhan, kapasitas daya tampung kolam pelabuhan, panjang dermaga, kedalaman kolam, ketersediaan lahan pelabuhan, pelayanan tambat labuh, frekuensi kunjungan kapal, pelaksanaan K5, pemanfaatan lahan Pelabuhan.

Pencapaian yang optimal pada Tahun 2025 merupakan hasil sinergi dari berbagai faktor internal maupun eksternal yang saling mendukung. Secara rinci, beberapa komponen yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai kinerja pelabuhan antara lain:

- Peningkatan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) kepada pelaku usaha perikanan dan pengguna jasa pelabuhan, yang berdampak pada peningkatan pemahaman terhadap tata kelola pelabuhan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
- Fasilitasi penyuluhan dan pendampingan teknis dalam pengelolaan usaha perikanan, yang memperkuat kapasitas pelaku usaha serta meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi di kawasan pelabuhan.
- Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan (SDI) secara lebih intensif dan terarah, yang turut menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan memastikan aktivitas penangkapan ikan dilakukan secara bertanggung jawab.
- Peningkatan kegiatan perkarantina ikan dan mutu hasil perikanan, yang berkontribusi terhadap kelancaran arus barang serta menjaga standar kualitas produk perikanan yang keluar dari pelabuhan.
- Optimalisasi publikasi dan diseminasi informasi, termasuk laporan kegiatan, capaian produksi, serta promosi potensi pelabuhan yang mendorong transparansi dan meningkatkan citra positif PPN Tual di mata mitra kerja dan investor.
- Kelancaran penyaluran logistik pelabuhan, khususnya dalam penyediaan kebutuhan vital seperti BBM, air bersih, dan es, yang mendukung kegiatan operasional kapal dan kelancaran aktivitas bongkar muat hasil tangkapan.

- Meningkatnya minat dan partisipasi investor baru, yang menunjukkan bahwa iklim investasi di PPN Tual semakin kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi kelautan dan perikanan di wilayah Maluku Tenggara.

6. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan Anggaran

Dukungan anggaran dalam pemenuhan Indikator Kinerja ini adalah pada Program, Pelaksanaan tata kelola dan operasional PIPP di pelabuhan perikanan, Pelaksanaan Tata kelola dan Operasional kesyahbandaran di pelabuhan perikanan. Berikut penghitungan lebih detail terkait efisiensi penggunaan anggaran ini :

Tabel 27 capaian penghitungan lebih detail terkait efisiensi penggunaan anggaran

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AAROxCRO	(AAROxCRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(2)	(6)=(5)-(4)
Tingkat Kinerja PPN Tual (Nilai)	103,5 %	10.578.000	0	10.948.230	10.948.230

$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$	103,5%
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \frac{(103,5\% \times 50)}{20}$	308,75%

Realisasi anggaran Tahun 2025 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp.10.578.000,-. Tidak ada realisasi anggaran yang digunakan untuk menunjang dalam tercapainya indikator Tingkat kinerja PPN Tual. Hal ini dikarenakan hingga akhir tahun 2025 anggaran tersebut di blokir sehingga tidak bisa digunakan. walaupun demikian tanpa ada dukungan anggaran IKU Tingkat Kinerja ini dapat tercapai hingga 103,5%. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 308,75%, hal ini menunjukkan tingkat efisiensi penggunaannya sudah sangat baik dan perlu ditingkatkan di Tahun 2026.

Prngguna SDM

Dalam mendukung pencapaian IKU Tingkat Kinerja di PPN Tual, didukung oleh 6 (enam) orang enumerator, 4 (empat) operator PIPP, 9 (sembilan) orang Petugas Syahbandar dan 1 (satu) orang petugas statistik.

7. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Meskipun capaian kinerja menunjukkan tren positif, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian, seperti keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional, fluktuasi jumlah kunjungan kapal akibat faktor cuaca dan musim penangkapan, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan teknis di lapangan. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya, PPN Tual akan mengoptimalkan beberapa strategi utama, antara lain:

1. Meningkatkan jumlah kunjungan kapal melalui kerja sama dan koordinasi dengan pelaku usaha, asosiasi perikanan, serta instansi terkait agar aktivitas bongkar muat dan produksi harian dapat meningkat secara signifikan.
2. Memperkuat sistem pelayanan terpadu berbasis digital guna mempercepat proses administrasi dan mempermudah akses layanan bagi pengguna jasa pelabuhan.
3. Mendorong peningkatan kapasitas SDM pelabuhan melalui pelatihan teknis, peningkatan kompetensi pengawasan, serta penguatan fungsi pelayanan publik.

4. Mengembangkan program kolaboratif dengan pemerintah daerah dan pihak swasta, terutama dalam penyediaan fasilitas pendukung seperti cold storage, dermaga tambahan, dan sistem logistik terpadu.
5. Meningkatkan kegiatan promosi dan publikasi potensi pelabuhan untuk menarik minat investor dan memperluas jaringan mitra kerja di bidang perikanan tangkap dan industri pengolahan hasil laut.

Dengan pelaksanaan strategi-strategi tersebut secara konsisten dan berkelanjutan, diharapkan tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual dapat terus meningkat, mendukung pengelolaan pelabuhan yang optimal, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan produktivitas sektor perikanan nasional.

3.2.5 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual

Indikator Kinerja Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan utama kesyahbandaran di pelabuhan perikanan. Indikator ini menggambarkan sejauh mana layanan kesyahbandaran dapat dilaksanakan secara optimal dalam mendukung keselamatan operasi penangkapan dan pengangkutan ikan, ketertiban administrasi kapal, dan kepatuhan pengguna jasa.

Perhitungan indikator ini didasarkan pada tiga jenis layanan utama, yaitu:

1. Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan, dengan bobot 40%;
2. Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLK) yang diterbitkan, dengan bobot 40%; dan
3. Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) yang diterbitkan, dengan bobot 20%.

Nilai tingkat pelayanan diperoleh dari penjumlahan capaian masing-masing komponen, yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah layanan yang diterbitkan dengan jumlah kapal yang beraktivitas di pelabuhan. Dengan demikian, indikator ini mencerminkan kinerja pelayanan kesyahbandaran secara menyeluruh selama Tahun 2025.

1. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun berjalan.

Tabel 28 Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun berjalan.

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian
Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran	81	94,6	116,7%

Indikator Kinerja Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran pada Tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat baik. Dengan target sebesar 81, realisasi yang dicapai adalah 94,6, sehingga persentase capaian mencapai 116,7%. Capaian ini menandakan bahwa kinerja pelayanan kesyahbandaran telah berjalan secara efektif dan mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

Perhitungan capaian indikator ini didasarkan pada kinerja pelayanan penerbitan dokumen kesyahbandaran, khususnya Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SHTI), surat Persetujuan Berlayar (SPB), dan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK) yang diterbitkan selama tahun berjalan.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya atau dengan beberapa tahun terakhir.

Tabel 29 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya atau dengan beberapa tahun terakhir

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran	2024	81	93,7	115,7 %
	2025	81	94,6	116,7 %

Indikator Kinerja Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran menunjukkan kinerja yang konsisten dan meningkat. Pada Tahun 2024, realisasi sebesar 93,7 berhasil melampaui target 81, dengan persentase capaian 115,7%. Pada Tahun 2025, dengan target yang sama yaitu 81, realisasi meningkat menjadi 94,6, sehingga persentase capaian juga naik menjadi 116,7%.

Capaian ini menunjukkan adanya konsistensi dan peningkatan kualitas pelayanan kesyahbandaran dari tahun ke tahun, serta mencerminkan efektivitas pelaksanaan layanan dalam memenuhi dan melampaui target kinerja yang telah ditetapkan.

3. Membandingkan antara realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdpat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 30 Perbandingan antara realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdpat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indikator Kinerja	Target Renstra DJPT 2025	Realisasi PPN Tual 2025	% Capaian
Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran	79	94,6	119,7

Indikator Kinerja Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran pada Tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat baik. Nilai capaian tahun 2025 sebesar 94,6 telah melampaui target menengah dalam Renstra DJPT sebesar 79, dengan persentase capaian mencapai 119,7%. Hasil ini mencerminkan bahwa pelaksanaan pelayanan kesyahbandaran telah berjalan secara efektif dan konsisten, serta mampu melampaui target strategis yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah.

4. Membandingkan antara realisasi tahun berjalan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di kementerian (jika ada)

Tabel 31 Perbandingan antara realisasi tahun berjalan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di kementerian

PPN Tual			PPN Ambon		
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
81	94,6	116,7	70	98,3	140,4

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran menunjukkan hasil yang sangat baik. PPN Tual berhasil

mencapai realisasi sebesar 94,6 dari target 81, atau setara dengan 116,7%, yang menandakan bahwa pelayanan kesyahbandaran telah berjalan efektif dan melampaui target yang ditetapkan. Sementara itu, PPN Ambon mencatat realisasi sebesar 98,3 dari target 70, dengan persentase capaian 140,4%. Capaian ini menunjukkan kinerja pelayanan yang sangat optimal dan konsisten sepanjang tahun.

Secara keseluruhan, hasil tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan pelayanan kesyahbandaran pada kedua UPT telah berjalan dengan baik dan mampu memenuhi bahkan melampaui target kinerja yang ditetapkan pada Tahun 2025.

5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja kesyahbandaran, target kinerja yang ditetapkan sebesar 81 telah berhasil dilampaui dengan capaian realisasi sebesar 94,6. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum kinerja pelayanan kesyahbandaran di wilayah kerja PPN Tual melampaui ekspektasi yang telah ditetapkan.

Keberhasilan utama pencapaian indikator kinerja kesyahbandaran tidak terlepas dari karakteristik aktivitas kapal di wilayah kerja PPN Tual. Kapal-kapal yang dominan beroperasi merupakan kapal skala industri perikanan, yang secara administratif dan operasional telah memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap ketentuan keselamatan dan kelengkapan dokumen. Kapal-kapal industri tersebut secara konsisten mengajukan dan menerbitkan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI), Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK), serta Surat Persetujuan Berlayar (SPB), yang menjadi dasar utama dalam perhitungan indikator kinerja kesyahbandaran.

Selain itu, jumlah kapal kecil atau nelayan kecil yang beroperasi di wilayah kerja PPN Tual relatif sedikit. Kondisi ini memberikan dampak positif terhadap capaian kinerja karena proses pelayanan terhadap kapal skala industri cenderung lebih tertib, terpantau, serta memiliki kelengkapan persyaratan yang lebih baik dibandingkan kapal kecil. Dengan demikian, tingkat keberhasilan layanan SHTI, STBLKK, dan SPB dapat dicapai secara optimal dan berkontribusi signifikan terhadap nilai realisasi indikator kinerja.

Meskipun capaian kinerja tergolong sangat baik, masih terdapat beberapa aspek yang dapat dikategorikan sebagai keterbatasan atau potensi kegagalan. Tingginya capaian indikator kinerja saat ini sangat dipengaruhi oleh dominasi kapal skala industri, sehingga indikator belum sepenuhnya mencerminkan tantangan pelayanan kesyahbandaran secara menyeluruh, khususnya terhadap kapal kecil atau nelayan tradisional.

Kapal kecil pada umumnya masih menghadapi keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis, yang berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan dan berdampak pada kualitas pelayanan kesyahbandaran apabila jumlahnya meningkat (adanya potensi migrasi nelayan kecil – pancing ulur tuna). Selain itu, indikator kinerja yang bersumber dari pelayanan SHTI, STBLKK, dan SPB juga memerlukan dokumen penyerta dalam hal ini perlu dikoordinasikan lintas instansi (Pas kecil, Surat Ukur, BKP, dll).

Secara keseluruhan, capaian realisasi indikator kinerja kesyahbandaran sebesar 94,6 menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam pelaksanaan pelayanan utama kesyahbandaran di PPN Tual. Namun demikian, keberhasilan ini masih bersifat struktural, ditopang oleh kepatuhan kapal skala industri yang tinggi. Ke depan, diperlukan penguatan strategi pembinaan dan pendampingan terhadap kapal kecil agar capaian kinerja tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan kesyahbandaran secara inklusif dan berkelanjutan.

1) Penguatan Pendampingan Administratif

Pendampingan administratif tetap menjadi faktor penting, khususnya bagi kapal kecil atau nelayan tradisional yang jumlahnya terbatas namun berpotensi meningkat. Pendampingan ini tidak dimaksudkan untuk melonggarkan persyaratan, melainkan sebagai upaya preventif agar pemilik kapal memahami alur dan kewenangan lintas instansi dalam pengurusan Pas Kecil, Surat Ukur, dan BKP, sehingga ketika mengajukan layanan SHTI, STBLKK, dan SPB, seluruh persyaratan telah terpenuhi secara sah.

Untuk meningkatkan inklusivitas pelayanan kesyahbandaran, perlu dilakukan pendampingan khusus terhadap kapal kecil atau nelayan tradisional yang masih mengalami keterbatasan dalam pemenuhan administrasi. Pendampingan dapat berupa:

Sosialisasi persyaratan Pas Kecil, Surat Ukur, dan BKP;

Bantuan teknis pengelolaan dokumen lintas instansi;

Pemetaan kapal yang belum memiliki dokumen lengkap sebagai dasar intervensi kebijakan.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan kapal kecil serta memperluas basis capaian indikator kinerja secara berkelanjutan.

2) Penguatan Peran Kesyahbandaran sebagai Koordinator Pelayanan

Kesyahbandaran perlu memperkuat perannya tidak hanya sebagai penerbit layanan, tetapi juga sebagai koordinator administratif yang menjembatani pemilik kapal dengan instansi terkait. Peran ini penting untuk memastikan bahwa hambatan administratif lintas instansi tidak menjadi faktor penghambat penerbitan SHTI, STBLKK, dan SPB.

6. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya.

- Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja tingkat pelayanan kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 32 capaian penghitungan lebih detail terkait efisiensi penggunaan anggaran

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AAROxCRO	(AAROxCRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(2)	(6)=(5)-(4)
Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran	116 %	56.560.000	29.957.000	65.609.600	35.652.600

$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AAROI \times CROI) - RAROI)}{\sum_{i=1}^n (AAROI)} \times 1$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$	63%
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{63\%}{20} \times 50 \right)$	207,5%

Berdasarkan hasil analisis efisiensi anggaran pada Rincian Output (RO) Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran, capaian kinerja Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar 116%, yang menunjukkan bahwa output yang direncanakan telah tercapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Nilai efisiensi sebesar 207,5% menggambarkan bahwa pelaksanaan kegiatan mampu menghasilkan kinerja yang tinggi meskipun realisasi anggaran terhambat akibat adanya blokir anggaran. Kondisi tersebut tidak mengurangi kualitas pelayanan kesyahbandaran karena kegiatan tetap dilaksanakan melalui optimalisasi perencanaan, pemanfaatan sumber daya internal, serta penguatan mekanisme kerja yang telah berjalan secara efektif dan efisien.

- Sumber Daya Manusia

Dari aspek sumber daya manusia, pelaksanaan pelayanan kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual pada Tahun Anggaran 2025 didukung oleh dinamika komposisi SDM yang cukup signifikan. Pada awal tahun, jumlah syahbandar yang bertugas tercatat sebanyak 3 orang. Selanjutnya, pada pertengahan tahun dilakukan pengangkatan 1 orang syahbandar baru guna memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi kesyahbandaran.

Seiring dengan penerapan sistem rotasi dan mutasi pegawai, terdapat 2 orang syahbandar yang dirotasi ke UPT lain dan 2 orang syahbandar baru yang masuk sebagai penggantian. Dari keseluruhan

syahbandar yang bertugas, 1 orang merupakan Kepala Pelabuhan yang sekaligus menjalankan fungsi syahbandar. Dengan demikian, total syahbandar yang menjadi SDM pegawai di PPN Tual saat ini berjumlah 4 orang, termasuk 1 orang yang menjabat sebagai Kepala Pelabuhan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas di wilayah kerja, 2 orang syahbandar ditugaskan pada pelabuhan binaan, yaitu PP Dobo dan PP Ukurlaran.

Selain syahbandar, jumlah petugas kesyahbandaran aktif secara keseluruhan tercatat sebanyak 7 orang. Untuk mendukung keberlanjutan pelayanan, terdapat tambahan 4 orang petugas yang pada tahun 2025 telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar kesyahbandaran sekaligus syahbandar, namun belum dilantik secara resmi sebagai syahbandar. Keberadaan petugas ini tetap menjadi potensi penguatan SDM ke depan apabila proses pelantikan dapat segera dilaksanakan.

Namun demikian, saat ini 2 orang petugas aktif juga digeser penugasannya ke PP Ukurlaran, sehingga diperlukan pengaturan jadwal, pembagian tugas, serta optimalisasi peran petugas yang tersedia agar pelayanan kesyahbandaran tetap berjalan efektif dan berkesinambungan.

Secara keseluruhan, kondisi SDM kesyahbandaran menunjukkan adanya upaya peningkatan kapasitas melalui diklat dan penataan personel, meskipun masih terdapat keterbatasan dari sisi jumlah syahbandar definitif yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

7. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

program/kegiatan yang menunjang keberhasilan Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual

1) Program Pelayanan Kesyahbandaran

Program pelayanan kesyahbandaran merupakan program utama yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian tingkat pelayanan kesyahbandaran di PPN Tual. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kapal perikanan, penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB), pengawasan kelaiklautan kapal, serta pengendalian keselamatan pelayaran telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

2) Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan

Kesyahbandaran

Penerapan SOP pelayanan kesyahbandaran secara konsisten menjadi faktor pendukung utama dalam menjaga mutu dan keseragaman pelayanan.

3) Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi Terkait

Koordinasi yang baik antara PPN Tual dengan instansi terkait untuk mendukung pengawasan dan penegakan keselamatan pelayaran dan Memperlancar proses pemeriksaan kapal dan penerbitan SPB.

Program/Kegiatan yang Menjadi Faktor Penghambat Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual

1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesyahbandaran

Keterbatasan jumlah serta kompetensi SDM kesyahbandaran menjadi salah satu faktor penghambat dalam peningkatan tingkat pelayanan, khususnya pada saat terjadi lonjakan aktivitas kapal.

2) Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pendukung

Kondisi sarana prasarana penunjang pelayanan kesyahbandaran yang belum sepenuhnya memadai turut mempengaruhi kualitas pelayanan.

3) Tingkat Kepatuhan Pengguna Jasa

Masih terdapat pengguna jasa yang belum sepenuhnya memenuhi persyaratan administrasi dan teknis kesyahbandaran.

Pencapaian pernyataan kinerja Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran di PPN Tual secara umum didukung oleh pelaksanaan program pelayanan kesyahbandaran, penerapan SOP, serta koordinasi lintas instansi yang berjalan baik. Namun demikian, keterbatasan SDM, sarana prasarana, serta kepatuhan pengguna jasa masih menjadi faktor penghambat yang perlu ditindaklanjuti guna meningkatkan kualitas dan konsistensi pelayanan kesyahbandaran pada periode berikutnya

3.2.6 Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual

Indikator Kinerja Utama Persentase Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran operasional kepelabuhanan, peningkatan kualitas pelayanan, serta optimalisasi aktivitas perikanan tangkap dan distribusi hasil perikanan.

Kegiatan pengembangan meliputi pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan fungsi fasilitas pokok, fasilitas fungsional, serta fasilitas penunjang pelabuhan perikanan. Pelaksanaan kegiatan tersebut didukung oleh perencanaan teknis yang memadai, koordinasi lintas unit kerja, serta ketersediaan anggaran yang relatif mencukupi.

1. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun berjalan.

Tabel 33 Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun berjalan.

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian
Presentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPN Tual (%)	40	50.62	126.55 %

Capaian indikator kinerja ini diperoleh melalui kegiatan pengembangan fasilitas sesuai pelaksanaan tugas dan fungsi pelabuhan perikanan dengan formulasi perhitungannya adalah nilai pengembangan fasilitas eksisting (ha) dibagi dengan nilai luas pelabuhan perikanan sesuai masterplan (ha) dikali dengan 100%. Nilai capaian indikator kinerja PPN Tual pada tahun ini adalah 50,62. Adapun target yang telah ditetapkan adalah 40. Jika dibandingkan antara target dan capaian yang telah diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja ini telah melebihi target dengan presenante sebesar 126,55%.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya atau dengan beberapa tahun terakhir.

Tabel 34 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya atau dengan beberapa tahun terakhir

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Presentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPN Tual (%)	2024	37,80	50,62	133,9%
	2025	40	50,62	126,55%

Jika dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja yang sama pada tahun 2024 dengan nilai pengembangan fasilitas tahun 2025, maka tren capaian cenderung menurun karena tidak ada pengembangan fasilitas pelabuhan yang signifikan, akan tetapi jika dibandingkan dengan target tahunan maka telah melebihi target dengan capaian 126,55%.

3. Membandingkan antara realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdpat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 35 Perbandingan antara realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdpat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indikator Kinerja	Target Renstra DJPT 2025	Realisasi PPN Tual 2025	% Capaian
Presentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPN Tual (%)	6,1	50,62	829,84%

Indikator Kinerja Presentase Pengembangan Fasilitas Pelabuhan merupakan IKU turunan dari DJPT yaitu Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan (Persen), dimana taget untuk DJPT tahun 2025 sebesar 6,1%. PPN Tual berdasarkan data hasil capaian presentase pengembangan fasilitas pada tahun 2025 tercapai 50,62%. Pelaksanaan program pengembangan fasilitas pelabuhan berjalan efektif dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Dengan tercapainya IKU tersebut maka PPN Tual turut berkontribusi dalam tercapainya target IKU DJPT.

4. Membandingkan antara realisasi tahun berjalan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di kementerian (jika ada)

Tabel 36 Perbandingan antara realisasi tahun berjalan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di kementerian

PPN Tual			PPN Ambon		
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
40	50,62	126,55 %	45	83,76	186,13%

Jika dibandingkan dengan capaian indikator kinerja nilai presentase pengembang fasilitas PPN Ambon, presentse nilai pengembangan fasilitas PPN Ambon lebih tinggi dibandingkan PPN Tual baik secara presentase maupun nilai capaian, hal ini disebabkan karena perbedaan target tahunan yang telah ditetapkan selain itu luasan dari kedua pelabuhan ini sangat jauh berbeda. PPN Ambon dengan luasan area sebesar 3,5 Ha tidak dapat dibandingkan dengan PPN Tual dengan luasan area sebesar 16 Ha, Dengan luasan yang lebih besar, pengembangan fasilitas di PPN Tual membutuhkan perencanaan yang lebih kompleks, waktu pelaksanaan yang lebih panjang, serta dukungan anggaran yang lebih besar agar dapat direalisasikan secara bertahap sesuai dengan masterplan pengembangan yang telah ditetapkan.

5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Persentase pengendalian pengembangan fasilitas PPN Tual tercapai sesuai target Tahun 2025 yaitu sebesar 50,62 %. Capaian ini menunjukkan bahwa pengendalian terhadap pengembangan fasilitas telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan pelabuhan. Indikator kinerja ini akan tercapai jika terdapat pengembangan fasilitas yang dilaksanakan sesuai dengan masterplan pelabuhan perikanan dengan mempertimbangan ketersediaan lahan yang memadai.

Pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan mengacu pada perencanaan sesuai dengan RKA K/L. Sehingga sangat penting pada saat penyusunan RKA K/L kegiatan pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan untuk dianggarkan. Pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan juga dapat dikembangkan oleh pihak ketiga dengan cara berinvestasi di pelabuhan perikanan.

Di sisi lain kendala yang di hadapi pada tahun 2025 adalah adanya kebijakan pemotongan dan blokir anggaran, sehingga berdampak secara langsung pada IKU ini, namun demikian ada beberapa kegiatan pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan yang di lakukan pada akhir tahun di antaranya berupa kegiatan rehabilitasi sejumlah fasilitas pelabuhan perikanan diantaranya rehab talud, rehab pos security, penambahan lampu penerangan jalan dan dermaga, rehab fasilitas rumah dinas, rehabilitasi rumah ibadah, rehab gerbang dan bangunan pas masuk pelabuhan perikanan.

Persentase capaian pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dan efisien, baik dari sisi waktu, mutu, maupun kesesuaian output dengan kebutuhan operasional pelabuhan. Fasilitas yang telah dikembangkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas layanan pelabuhan, kenyamanan dan keselamatan pengguna jasa, serta mendukung peningkatan produktivitas kegiatan perikanan di wilayah kerja pelabuhan.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, antara lain keterbatasan waktu pelaksanaan akibat faktor cuaca, proses administrasi pengadaan, serta penyesuaian terhadap perubahan kebijakan atau regulasi. Kendala tersebut dapat diantisipasi melalui penguatan perencanaan awal, percepatan proses administrasi, serta peningkatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait.

Untuk meningkatkan capaian Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPN Tual pada periode selanjutnya, diperlukan langkah-langkah tindak lanjut sebagai berikut :

- 1) Penyusunan prioritas pengembangan fasilitas berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap operasional pelabuhan.
- 2) Penguatan perencanaan anggaran, termasuk pengusulan kebutuhan pendanaan secara lebih terukur dan berkelanjutan.

- 3) Peningkatan intensitas monitoring dan evaluasi, baik secara administratif maupun teknis, guna memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana.
- 4) Penguatan koordinasi lintas sektor, khususnya dengan instansi terkait perizinan dan pengelolaan infrastruktur.
- 5) Peningkatan kapasitas SDM, melalui pelatihan dan pendampingan teknis dalam
- 6) pengawasan dan pengendalian pembangunan fasilitas pelabuhan.
- 7) Optimalisasi pemanfaatan fasilitas yang telah terbangun, sehingga manfaat pengembangan dapat dirasakan secara maksimal oleh pengguna jasa pelabuhan

6. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya

- Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja presentase pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 37 capaian penghitungan lebih detail terkait efisiensi penggunaan anggaran

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	$AARO \times CRO$	$(AARO \times CRO) - RARO$
(1)	(2)	(3)	(4)	$(5)=(3) \times (2)$	$(6)=(5)-(4)$
Presentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPN Tual (%)	126,5 %	465.726.000	464.532.300	589.376.253	10 124.843.953

$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARoi \times CROI) - RARoi)}{\sum_{i=1}^n (AARoi)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$	26.80%
$Nilai Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{26,80\%}{20} \times 50 \right)$	117%

Realisasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung tercapainya IKU presentase pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan sebesar 464.532.300 atau 99,7% yang digunakan untuk menunjang dalam tercapainya Indikator Kinerja Utama Presentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual dengan nilai efisiensi penggunaan anggaran sebesar 117%.

- Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung tercapainya indikator kinerja presentase pengendalian pengembangan fasilitas di PPN Tual didukung oleh sumber daya manusia yang berjumlah 15 orang yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Operator keuangan dan 9 (sembilan) orang tim kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha. Kegiatan pengembangan fasilitas telah didukung dengan jumlah SDM yang memadai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing SDM. Komposisi SDM tersebut telah mencerminkan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, khususnya dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan kegiatan pengembangan fasilitas.

Tim kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha berperan penting dalam pengawasan teknis, koordinasi pelaksanaan di lapangan, serta pemantauan capaian kegiatan agar sesuai dengan target yang telah

ditetapkan. Secara keseluruhan, jumlah dan kualitas SDM yang tersedia dinilai memadai untuk mendukung pengendalian pengembangan fasilitas di PPN Tual.

7. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual

1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelabuhan

Program pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan merupakan program utama yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian indikator persentase pengendalian pengembangan fasilitas di PPN Tual. Pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pembangunan serta pemeliharaan fasilitas pelabuhan telah dilakukan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.

2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kegiatan Fisik

Kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pengembangan fasilitas menjadi faktor penting dalam memastikan capaian pengendalian pembangunan.

3) Koordinasi dengan Unit Teknis dan Penyedia Jasa

Koordinasi yang baik antara pengelola pelabuhan, unit teknis terkait, serta penyedia jasa konstruksi turut menunjang efektivitas pengendalian pengembangan fasilitas.

Program/Kegiatan yang Menjadi Faktor Penghambat Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual

1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesyahbandaran

Keterbatasan anggaran serta adanya penyesuaian kebijakan penganggaran berdampak pada optimalisasi pengendalian pengembangan fasilitas pelabuhan.

2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Teknis

Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM teknis yang menangani

pengendalian pengembangan fasilitas turut mempengaruhi kualitas pengendalian kegiatan.

3) Kendala Teknis dan Kondisi Lapangan

Faktor teknis dan kondisi lapangan, termasuk cuaca dan akses lokasi, turut menjadi hambatan dalam pelaksanaan dan pengendalian pengembangan fasilitas.

Secara umum, pencapaian pernyataan kinerja Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas di PPN Tual didukung oleh pelaksanaan program pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana, kegiatan monitoring dan evaluasi, serta koordinasi lintas unit yang berjalan baik. Namun demikian, keterbatasan anggaran, SDM teknis, serta kendala teknis di lapangan masih menjadi faktor penghambat yang perlu mendapat perhatian untuk peningkatan kinerja pengendalian pengembangan fasilitas pada periode berikutnya.

3.2.7 Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Nilai)

Kegiatan perikanan tangkap di pelabuhan perikanan memiliki potensi dampak terhadap kualitas lingkungan baik di kawasan maupun perairan dan ekosistem pesisir. Untuk itu, diperlukan upaya pengendalian lingkungan agar aktivitas penangkapan ikan tetap produktif namun tidak merusak keseimbangan ekosistem pesisir dan laut.

SELARASKAN merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang di update berkala dan dicantumkan dalam bentuk skore Pelabuhan.

Formula perhitungan nilai SELARASKAN yaitu Skor Indikator Program (60%) + Skor Indikator Hasil (40%). Indikator Program adalah Program Mandatori (Program Wajib yang diupdate) dan Voluntary (Program tidak wajib yang berjalan di Pelabuhan Perikanan. Sementara Indikator Hasil adalah indikator Kebersihan Pelabuhan, pengelolaan sampah, kualitas udara, kualitas air, penggunaan listrik, penggunaan air, pengelolaan limbah B3 dan kepatuhan regulasi.

1. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun berjalan

Tabel 38 Target dan Realisasi IKU Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Tual tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian
Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Tual (Nilai)	30,10	77,89	258,7 %

Capaian indikator kinerja ini didapat melalui hasil penilaian dari aplikasi SELARASKAN periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2025 dengan menghitung nilai rata-rata dari setiap bulannya. Adapun target untuk indikator kinerja ini adalah 30,10 dan berlaku untuk seluruh Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan di bawah Direktorat Jenderal PerikananTangkap. Berdasarkan target yang telah ditetapkan, Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual telah melebihi target dengan capaian sebesar 77,89 dengan presentase 258,7%.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya

Tabel 39 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Capaian	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian
Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Tual (Nilai)	30.10	54,67	181,62%	30,10	77,89	258,7 %

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Indikator kinerja ini mengalami peningkatan dari segi nilai, pada tahun 2024 realisasi SELARASKAN sebesar 64,94 dibandingkan dengan realisasi SELARASKAN tahun 2025 realisasi SELARASKAN sebesar 77,89 peningkatan capaian nilai ini diperoleh dari pelaksanaan semua program yang mendukung pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan. Dari nilai perbandingan tahun 2024 dan tahun 2025 ada peningkatan sebesar 43%. Kenaikan capaian tersebut diperoleh dari optimalisasi pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mendukung pengendalian

lingkungan, mulai dari peningkatan kepatuhan terhadap standar lingkungan, penguatan pengawasan operasional pelabuhan, hingga peningkatan koordinasi antar unit kerja terkait. Implementasi program yang lebih efektif dan berkelanjutan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan pelabuhan.

3. Membandingkan antara realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 40 Perbandingan antara realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indikator Kinerja	Target Renstra DJPT 2025	Realisasi PPN Tual 2025	% Capaian
Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Tual (Nilai)	-	30,10	-

Indikator Kinerja Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Tual merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) turunan dari DJPT, yaitu Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan (Persen). Dalam dokumen Renstra DJPT, indikator kinerja rencana pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan dengan target untuk DJPT tahun 2025 sebesar 4 dokumen. indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan pengelolaan pelabuhan perikanan yang berwawasan lingkungan secara nasional.

Nilai pengendalian lingkungan PPN Tual pada tahun 2025 berdasarkan hasil penilaian SELARASKAN mencapai 77,89, yang menunjukkan kinerja pengelolaan lingkungan berada pada kategori baik. Dengan tercapainya IKU tersebut maka PPN Tual telah memberikan kontribusi positif dan signifikan dalam mendukung pencapaian target IKU DJPT tahun 2025, khususnya pada aspek peningkatan kualitas dan efektivitas pengelolaan pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan.

4. Membandingkan antara realisasi tahun berjalan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di kementerian (jika ada)

. Tabel 41 Perbandingan antara realisasi tahun berjalan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di kementerian

PPN Tual			PPN Ambon		
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
30,10	77,89	258,7%	30,10	80,52	267 %

Jika dibandingkan dengan capaian nilai Pengendalian Lingkungan (SELARASKAN) di PPN Ambon. Capaian PPN Tual lebih rendah dibandingkan dengan capaian PPN Ambon dengan presentase selisih capaian sebesar 8,3%, Hal ini mencerminkan perbedaan intensitas dan cakupan pelaksanaan program SELARASKAN. Capaian PPN Ambon yang lebih tinggi disebabkan oleh lebih banyaknya program dan kegiatan pengendalian lingkungan yang dilaksanakan secara konsisten dan terintegrasi sepanjang tahun berjalan. Meskipun demikian, capaian PPN Tual yang telah melebihi target menunjukkan bahwa kinerja pengendalian lingkungan di PPN Tual telah berjalan dengan sangat baik dan efektif. PPN Tual diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan program serta optimalisasi pelaksanaan kegiatan SELARASKAN sehingga diharapkan dapat semakin memperkecil kesenjangan capaian kinerja dengan satker lain serta mendorong peningkatan kinerja yang lebih berkelanjutan.

5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual pada tahun berjalan secara umum menunjukkan keberhasilan yang sangat baik. Hal ini tercermin dari capaian nilai kinerja yang melampaui target yang telah ditetapkan, yang mengindikasikan bahwa program dan kegiatan pengendalian lingkungan telah dilaksanakan secara efektif dan terukur. Keberhasilan ini juga menunjukkan adanya komitmen kuat dari seluruh unsur pelaksana dalam mendukung terwujudnya lingkungan pelabuhan yang bersih, tertib, aman, dan berkelanjutan.

Faktor utama yang mendorong keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain adalah konsistensi pelaksanaan program pengendalian lingkungan, peningkatan koordinasi antar unit kerja, serta optimalisasi peran sumber daya manusia yang terlibat. Selain itu, penerapan pengawasan rutin, kegiatan kebersihan lingkungan pelabuhan, pengelolaan limbah, serta peningkatan kesadaran para pengguna jasa pelabuhan turut berkontribusi secara signifikan terhadap capaian kinerja yang optimal.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang berpotensi menjadi faktor penghambat dan perlu menjadi perhatian ke depan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran, yang berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan seluruh kegiatan pengendalian lingkungan secara menyeluruh. Beberapa kegiatan yang membutuhkan dukungan pembiayaan tambahan harus disesuaikan dengan skala prioritas, sehingga terdapat potensi penundaan atau pengurangan frekuensi pelaksanaan kegiatan tertentu.

Sebagai bentuk mitigasi terhadap kendala tersebut, PPN Tual telah menerapkan berbagai alternatif solusi, antara lain melalui strategi efisiensi dan optimalisasi penggunaan anggaran yang tersedia, pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal, serta peningkatan sinergi dengan pemangku kepentingan terkait. Langkah-langkah ini terbukti mampu menjaga stabilitas kinerja dan memastikan bahwa target IKU Pengendalian Lingkungan tetap tercapai bahkan melampaui target.

Secara keseluruhan, keberhasilan pencapaian IKU Pengendalian Lingkungan di PPN Tual menunjukkan bahwa meskipun terdapat keterbatasan dan tantangan, unit kerja tetap mampu mengelola sumber daya secara efektif. Ke depan, diperlukan penguatan perencanaan, dukungan anggaran yang lebih memadai, serta inovasi berkelanjutan agar kinerja pengendalian lingkungan dapat terus ditingkatkan dan dipertahankan secara berkesinambungan.

6. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya.

- Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian Indikator Kinerja Pengendalian Lingkungan (SELARASKAN) Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 42 capaian penghitungan lebih detail terkait efisiensi penggunaan anggaran

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AAROxCRO	(AAROxCRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(2)	(6)=(5)-(4)
Nilai pengendalian lingkungan di PPN Tual	258,7 %	35.439.000	21.833.000	91.680.693	69.847.693

$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$	197%
$Nilai Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ Nilai Efisiensi = 50% + $\frac{(197\% \times 50)}{20}$	542,2%

Realisasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung tercapainya IKU pengendalian lingkungan sebesar Rp. 21.833.000 atau 61,60% yang digunakan untuk menunjang dalam tercapainya Indikator Kinerja Utama Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual dengan nilai efisiensi penggunaan anggaran sebesar 542,2%.

- Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual, unit kerja didukung oleh 28 (dua puluh delapan) orang sumber daya manusia dengan pembagian tugas yang jelas dan terstruktur. Komposisi SDM tersebut terdiri dari 4 (empat) orang petugas yang bertanggung jawab melakukan pembaruan data dan pelaporan pada aplikasi SELARASKAN, 9 (sembilan) orang yang berasal dari Tim Kerja TKPU dan Tim Kerja Kesyahbandaran yang berperan dalam pengawasan, pengendalian, serta pelaksanaan kegiatan pengendalian lingkungan di kawasan pelabuhan. Selain itu, terdapat 6 (enam) orang petugas kebersihan yang secara rutin melaksanakan kegiatan pembersihan di area perkantoran, dermaga, dan kawasan pelabuhan perikanan, serta 9 (sembilan) orang petugas.

Ketersediaan dan keterlibatan SDM dengan pembagian peran yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing telah memberikan kontribusi signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan pengendalian lingkungan. Sinergi antar petugas operasional, pengawasan, kebersihan, dan pengamanan menjadi faktor pendukung utama dalam menjaga kebersihan, ketertiban, serta keberlanjutan lingkungan pelabuhan, sehingga capaian IKU Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Tual dapat tercapai secara optimal. Pengamanan yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas lingkungan pelabuhan.

7. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tercapainya Indikator Kinerja Utama Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual merupakan bagian dari komitmen terhadap pelaksanaan prinsip pembangunan perikanan yang berkelanjutan, dengan menitikberatkan pada upaya menjaga kualitas lingkungan di kawasan pelabuhan agar tetap mendukung aktivitas perikanan tangkap secara optimal. Pelaksanaan program ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait pengelolaan lingkungan hidup serta kebijakan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap melalui aplikasi SELARASKAN sebagai instrumen utama pengendalian dan pemantauan lingkungan di kawasan pelabuhan.

Dalam upaya mencapai keberhasilan pelaksanaan program ini, telah dirumuskan beberapa rencana tindak lanjut strategis sebagai berikut:

1. Menjalankan seluruh program dalam aplikasi SELARASKAN (mandatory maupun voluntary); Pelaksanaan seluruh kegiatan yang tercantum dalam aplikasi SELARASKAN menjadi langkah fundamental dalam menjaga konsistensi penerapan standar pengendalian lingkungan. Program yang bersifat mandatory memastikan kepatuhan terhadap regulasi nasional, sementara program voluntary memperkuat komitmen internal dan partisipasi aktif seluruh pihak di lingkungan pelabuhan. Kepatuhan terhadap kedua jenis program ini diharapkan dapat meningkatkan nilai kinerja lingkungan dan menciptakan ekosistem pelabuhan yang lebih bersih, sehat, dan produktif.
2. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program SELARASKAN; Ketersediaan anggaran merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi pengendalian lingkungan. Dengan pengalokasian anggaran yang memadai, kegiatan seperti pemantauan kualitas air, pengelolaan limbah, dan perbaikan infrastruktur lingkungan dapat berjalan optimal. Hal ini menunjukkan komitmen nyata PPN Tual terhadap keberlanjutan program, bukan hanya sebatas administratif, tetapi juga operasional dan berkelanjutan.
3. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada stakeholder; Partisipasi stakeholder, termasuk nelayan, pengusaha perikanan, dan masyarakat sekitar pelabuhan, sangat penting dalam mendukung upaya pengendalian lingkungan. Melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis, pemahaman mereka terhadap pentingnya menjaga lingkungan pelabuhan akan meningkat, sehingga tercipta sinergi dan kesadaran kolektif untuk bersama-sama mengelola lingkungan secara bertanggung jawab.
4. Melakukan tindak lanjut monitoring dan evaluasi secara triwulanan; Monitoring dan evaluasi berkala menjadi instrumen penting dalam mengukur efektivitas pelaksanaan program SELARASKAN. Evaluasi triwulanan memungkinkan identifikasi dini terhadap kendala, serta menjadi dasar perbaikan dan penyusunan strategi lanjutan agar program tetap berada pada jalur yang benar. Hasil evaluasi juga menjadi bahan pelaporan

kinerja yang transparan dan akuntabel kepada pihak berwenang.

3.2.8 Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)

Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) merupakan instrumen utama dalam mengukur Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan, karena mencerminkan tingkat kepatuhan kapal perikanan terhadap persyaratan teknis dan administratif kelaikan kapal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencapaian IKU ini diukur berdasarkan jumlah penerbitan SKKP yang diterbitkan oleh unit kerja sesuai kewenangan, dengan mekanisme perhitungan dilakukan secara kumulatif, yaitu merupakan akumulasi penerbitan SKKP pada tahun-tahun sebelumnya serta capaian pada setiap triwulan berjalan dalam tahun penilaian.

1. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun berjalan

Tabel 43 Target dan Realisasi IKU Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian
Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	690	857	124,2

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan diukur berdasarkan jumlah penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP). Pada tahun 2025, dari target sebesar 690, realisasi penerbitan SKKP mencapai 857 atau sebesar 124,2%. Capaian ini dihitung secara kumulatif, yaitu merupakan akumulasi penerbitan SKKP dari capaian tahun 2023 dan 2024, serta capaian Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV tahun 2025. Mekanisme perhitungan tersebut mencerminkan tingkat kepatuhan kapal perikanan izin daerah terhadap ketentuan kelaikan kapal sekaligus konsistensi kinerja pelayanan.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya atau dengan beberapa tahun terakhir.

Tabel 44 Perbandingan Realisasi dengan dengan triwulan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Capaian	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian
Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	505	625	120	690	857	124,2

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan diukur berdasarkan jumlah penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP). Pada tahun 2024, realisasi penerbitan SKKP mencapai 625 sertifikat dari target 505, dengan capaian sebesar 120%, yang menunjukkan tingginya tingkat kepatuhan kapal perikanan izin daerah terhadap ketentuan kelaikan kapal. Pada tahun 2025, kinerja ini kembali meningkat dengan realisasi sebanyak 857 sertifikat dari target 690 atau mencapai 124,2%. Capaian ini mencerminkan peningkatan kepatuhan pemilik kapal perikanan izin daerah serta optimalnya pelaksanaan layanan penerbitan SKKP oleh Tim Petugas Pemeriksa Kapal Perikanan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 45 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Indikator Kinerja	Target Renstra DJPT 2025	Realisasi PPN Tual 2025	% Capaian
Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	-	857	-

Perbandingan antara realisasi kinerja hingga tahun berjalan dengan target jangka menengah pada prinsipnya dilakukan untuk menilai tingkat ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Rencana

Strategis (Renstra). Namun demikian, berdasarkan hasil penelaahan terhadap dokumen Renstra yang saat ini masih dalam status draft, belum terdapat penetapan target jangka menengah secara eksplisit untuk IKU Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan.

Ketiadaan penjabaran target kuantitatif tersebut menyebabkan IKU dimaksud belum dapat dilakukan analisis perbandingan antara realisasi kinerja dengan target jangka menengah. Oleh karena itu, capaian kinerja pada periode pelaporan ini hanya dapat disajikan dalam bentuk realisasi tahunan tanpa disandingkan dengan sasaran jangka menengah.

4. Membandingkan antara realisasi tahun berjalan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di kementerian (jika ada)

Tabel 46 Perbandingan antara realisasi tahun berjalan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di kementerian

PPN Tual			PPN Ambon		
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
690	857	124,2	885	1734	195,3

Berdasarkan data capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan, baik PPN Tual maupun PPN Ambon menunjukkan kinerja yang melampaui target yang telah ditetapkan. PPN Tual mencatat realisasi penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) sebesar 857 dari target 690, atau mencapai 124,2%. Sementara itu, PPN Ambon mencatat capaian yang lebih tinggi dengan realisasi sebesar 1.734 dari target 885, atau mencapai 195,3%. Capaian ini menunjukkan intensitas layanan dan volume penerbitan SKKP yang sangat tinggi, yang dipengaruhi oleh karakteristik wilayah operasional, jumlah kapal aktif, serta frekuensi permohonan layanan kelaikan kapal.

5. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian IKU Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan tidak terlepas dari optimalnya pelaksanaan layanan penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) yang menjadi dasar perhitungan indikator ini. Penting untuk digarisbawahi bahwa IKU ini khusus mengukur kapal perikanan dengan izin daerah, yang secara kewenangan berbeda dengan kapal perikanan izin pusat, sehingga fokus pelayanan dan cakupan pengawasannya lebih spesifik dan terukur.

Salah satu faktor utama keberhasilan adalah diberlakukannya Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2541/MEN-KP/XII/2024, yang memberikan kemudahan dalam penerbitan SKKP melalui mekanisme pembaruan, yaitu penerbitan sertifikat tanpa dilakukan pemeriksaan fisik langsung oleh petugas. Kebijakan ini secara signifikan mempercepat proses layanan, mengurangi beban administrasi, serta meningkatkan jumlah kapal izin daerah yang dapat dilayani dalam waktu yang lebih efisien, tanpa mengabaikan aspek kepatuhan, karena mekanisme ini hanya berlaku bagi kapal yang telah dilakukan pemeriksaan fisik pada tahun sebelumnya.

Selain itu, keberhasilan juga didukung oleh penyebaran dan penguatan jumlah personel pemeriksa kapal perikanan yang telah diakomodir pada beberapa unit kerja, yaitu PPN Tual, PP Tual, PP Dobo, dan PP Ukurlaran. Distribusi personel ini memungkinkan pelayanan SKKP dilakukan lebih merata, mendekatkan layanan kepada pemilik kapal, serta mengurangi ketergantungan pada satu lokasi pelayanan utama. Dengan dukungan tersebut, capaian penerbitan SKKP dapat terus meningkat dan melampaui target yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, terdapat beberapa aspek yang berpotensi menjadi faktor kegagalan atau risiko ke depan. Salah satu hal krusial adalah ketidakjelasan batas masa berlaku Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2541/MEN-KP/XII/2024. Hingga saat ini, surat edaran tersebut tidak mencantumkan batas waktu berlaku secara tegas, sehingga terdapat potensi bahwa pada tahun 2026 kebijakan ini tidak lagi dapat digunakan.

Apabila diskresi penerbitan SKKP tanpa pemeriksaan fisik langsung

tersebut tidak diperpanjang, maka seluruh proses penerbitan SKKP akan kembali bergantung pada pemeriksaan fisik kapal oleh petugas. Kondisi ini berpotensi menurunkan capaian IKU, mengingat keterbatasan jumlah personel, jangkauan wilayah pelayanan yang luas, serta peningkatan beban kerja lapangan.

Selain itu, meskipun saat ini penyebaran personel telah mengakomodir beberapa pelabuhan perikanan, ke depan terdapat rencana atau kemungkinan perluasan pelayanan ke PP Tiakur, Moa. Namun demikian, potensi pelayanan penerbitan SKKP di lokasi tersebut masih perlu pendalaman lebih lanjut, baik dari sisi jumlah kapal izindaerah, kesiapan sumber daya manusia, maupun dukungan sarana dan prasarana. Ditambah dengan berkurangnya jumlah personal Petugas Pemeriksa Kapal Perikanan yang berjumlah 2 orang dapat berpengaruh dalam kelancaran penerbitan SKKP. Apabila tidak diantisipasi dengan baik, perluasan wilayah pelayanan justru dapat menjadi tantangan tambahan terhadap pencapaian IKU.

Secara keseluruhan, keberhasilan pencapaian IKU sangat dipengaruhi oleh kebijakan kemudahan penerbitan SKKP melalui mekanisme pembaruan dan distribusi personel pelayanan yang merata. Namun demikian, keberlanjutan capaian IKU ke depan sangat bergantung pada kepastian kebijakan diskresi, kesiapan personel, serta perencanaan matang dalam pengembangan wilayah pelayanan baru.

Sebagai upaya menjaga keberlanjutan dan konsistensi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan, yang diukur berdasarkan penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP), diperlukan langkah tindak lanjut yang terencana dan adaptif. Capaian kinerja yang melampaui target perlu diimbangi dengan penguatan sistem, sumber daya manusia, serta kesiapan menghadapi perubahan kebijakan dan regulasi. Oleh karena itu, rekomendasi tindak lanjut berikut disusun untuk memastikan pelayanan penerbitan SKKP tetap efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

- **Penguatan SDM Pemeriksa Kapal Perikanan**

Menambah jumlah personel yang dibekali kompetensi dan dilantik sebagai Petugas Pemeriksa Kapal Perikanan, melalui pemetaan kebutuhan di PPN Tual, PP Tual, PP Dobo, dan PP Ukurlaran, serta antisipasi pelayanan di PP Tiakur Moa. Langkah ini penting untuk menjaga keberlanjutan IKU.

- **Optimalisasi Penerbitan Surat Ukur Dalam Negeri**

Mendorong percepatan penerbitan Surat Ukur Dalam Negeri bagi kapal perikanan izin daerah yang dapat diterbitkan di PPN Tual agar sejalan dan terintegrasi dengan penerbitan SKKP, sebagai satu kesatuan pemenuhan IKU Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan.

- Sosialisasi Perubahan PP Nomor 85 Tahun 2021

Menyiapkan sosialisasi dan penyesuaian layanan segera setelah perubahan PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang PNBP ditetapkan, agar petugas dan pemilik kapal memahami jenis dan tarif PNBP yang baru serta tidak menghambat pelayanan SKKP dan surat ukur.

6. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya

- Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 47 capaian penghitungan lebih detail terkait efisiensi penggunaan anggaran

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AAROxCRO	(AAROxCRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(2)	(6)=(5)-(4)
Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan	124 %	-	-	-	-

$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$	-
--	---

$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{80}}{20} \times 50 \right)$	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{-}{20} \times 50 \right)$	-

Efisiensi penggunaan anggaran dalam mendukung capaian indikator kinerja Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual Tahun 2025 tidak dapat dihitung, karena pada indikator kinerja tersebut tidak terdapat dukungan alokasi anggaran. Seluruh capaian kinerja yang dihasilkan merupakan hasil dari pelaksanaan tugas rutin dan optimalisasi sumber daya yang tersedia, tanpa didukung oleh anggaran khusus pada tahun berjalan.

- Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung pelaksanaan pemeriksaan dan penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) pada Tahun 2025 terdiri dari Petugas Pemeriksa Kapal Perikanan yang berperan langsung dalam pemenuhan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan. Pada awal Tahun 2025, jumlah Petugas Pemeriksa Kapal Perikanan yang aktif sebanyak 8 orang. Namun, pada pertengahan tahun terjadi pengurangan sebanyak 2 orang, dan hingga akhir Tahun 2025 terdapat penambahan kembali 1 orang, sehingga jumlah petugas aktif pada akhir tahun menjadi 7 orang.

Dari sisi sebaran penugasan, 2 orang petugas ditempatkan di luar instansi induk, masing-masing 1 orang di PP Dobo dan 1 orang di PP Ukurlaran, guna mendukung pelayanan pemeriksaan kapal perikanan di wilayah kerja tersebut. Sementara itu, 5 orang petugas berada di instansi induk, dengan 1 orang ditetapkan sebagai koordinator untuk memastikan konsistensi pelaksanaan pemeriksaan, pembagian tugas, serta pengendalian mutu layanan.

Dalam mekanisme pelayanan SKKP, peran verifikator disepakati dilaksanakan oleh 1 orang petugas, yang bertugas melakukan verifikasi administratif dan kesesuaian hasil pemeriksaan teknis. Selanjutnya, fungsi validator dilaksanakan oleh Kepala Pelabuhan (Kalabuh) sebagai pejabat yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan.

Secara umum, meskipun terjadi dinamika jumlah SDM selama tahun berjalan, pengaturan peran dan sebaran petugas yang proporsional serta

adanya koordinator, verifikator, dan validator yang jelas telah mendukung keberlangsungan pelayanan pemeriksaan kapal perikanan dan pencapaian IKU secara efektif dan terkendali.

7. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun beberapa upaya untuk mendukung melaksanakan kegiatan yang menunjang IKU Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi di wilayah kerja Pelabuhan perikanan Nusantara Tual sebagai berikut:

- Melanjutkan kegiatan sosialisasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi kesyahbandaran khususnya tentang kelaikan kapal perikanan di wilayah kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual kepada nelayan dan stakeholder.
- Perlunya penambahan jumlah SDM ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual yang memiliki kompetensi sebagai PPKP untuk mendukung jalannya indikator kinerja kelaikan kapal perikanan di wilayah kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual.
- Melanjutkan kegiatan sosialisasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi kesyahbandaran khususnya tentang kelaikan kapal perikanan di wilayah kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual kepada nelayan dan stakeholder

Perlunya penambahan jumlah SDM ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual yang didukung peningkatan kompetensi petugas SKKP untuk mendukung jalannya indikator kinerja kelaikan kapal perikanan di wilayah kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual.

3.2.9 Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan

Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan diukur berdasarkan kepatuhan pemilik kapal dan awak kapal perikanan dalam memenuhi persyaratan ketenagakerjaan sesuai dengan ukuran kapal (GT). Penilaian dilakukan melalui verifikasi terhadap dokumen awak kapal yang tercantum pada Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan, dengan mekanisme penilaian yang dibedakan berdasarkan klasifikasi GT kapal sebagai berikut:

1. Kapal perikanan sampai dengan 5 GT, dinyatakan memenuhi kepatuhan apabila nakhoda telah memiliki sertifikat SKN dan jaminan sosial (Jamsos), yang diverifikasi dari SPB yang diterbitkan.
2. Kapal perikanan berukuran lebih dari 5 GT sampai dengan 30 GT, dinyatakan memenuhi kepatuhan apabila awak kapal memenuhi persyaratan usia (KTP), Perjanjian Kerja Laut (PKL), jaminan sosial (Jamsos), surat keterangan sehat, serta sertifikat kompetensi, tanpa mensyaratkan Buku Pelaut (BPP) dan Sijil.
3. Kapal perikanan berukuran lebih dari 30 GT sampai dengan 100 GT, dinyatakan memenuhi kepatuhan apabila awak kapal memenuhi persyaratan usia (KTP), PKL, Jamsos, surat keterangan sehat, sertifikat kompetensi, dan Buku Pelaut (BPP), tanpa mensyaratkan Sijil.
4. Kapal perikanan berukuran ≥ 100 GT, dinyatakan memenuhi kepatuhan apabila awak kapal memenuhi persyaratan usia (KTP), PKL, Jamsos, surat keterangan sehat, sertifikat kompetensi, BPP, dan Sijil.
5. Kapal perikanan berukuran ≥ 300 GT, dinyatakan memenuhi kepatuhan apabila awak kapal memenuhi persyaratan usia (KTP), PKL, Jamsos, surat keterangan sehat berupa Medical Check Up (MCU), sertifikat kompetensi sesuai jabatan (endorsement), BPP, dan Sijil.

Melalui mekanisme penilaian tersebut, indikator ini mencerminkan tingkat kepatuhan ketenagakerjaan awak kapal perikanan yang disesuaikan dengan kompleksitas operasional dan tingkat risiko berdasarkan ukuran kapal, sehingga hasil pengukuran menjadi lebih proporsional dan akuntabel.

1. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun berjalan

Tabel 48 Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun berjalan.

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian
Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan	0,26	0,56	215%

Indikator Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan pada Tahun 2025 memiliki target 0,26 dengan realisasi 0,56, sehingga capaian kinerja mencapai 215%. Capaian ini menunjukkan bahwa pemenuhan

persyaratan awak kapal perikanan telah melampaui target yang ditetapkan, seiring dengan meningkatnya kepatuhan pemilik kapal dan awak kapal dalam memenuhi ketentuan yang diverifikasi melalui penerbitan SPB.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya atau dengan beberapa tahun terakhir

Tabel 49 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya atau dengan beberapa tahun terakhir

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan	2024	-	-	-
	2025	%	0,56	215%

Pada Tahun 2024, data Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan tidak tersedia dan tidak dapat dibandingkan karena indikator ini merupakan IKU baru pada Tahun 2025. Dengan demikian, tidak terdapat target maupun realisasi pada Tahun 2024.

IKU yang paling mendekati pada Tahun 2024 adalah Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan, dengan target sebesar 21 dan capaian sebesar 29,59. Namun demikian, IKU tersebut memiliki definisi dan metode pengukuran yang berbeda, sehingga hasilnya tidak dapat digunakan sebagai pembanding langsung.

3. Membandingkan antara realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdpat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 50 Perbandingan antara realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdpat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indikator Kinerja	Target Renstra DJPT 2025	Realisasi PPN Tual 2025	% Capaian
Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan	-	0.56	-

Capaian Indikator Kinerja Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan pada tahun 2025 sebesar 0,56 disajikan sebagai gambaran kondisi pelaksanaan pemenuhan persyaratan awak kapal perikanan untuk bekerja di kapal perikanan pada periode berjalan. Mengingat Renstra DJPT hingga saat ini masih berbentuk draft dan tidak menetapkan indikator kinerja yang identik, nilai capaian ini belum dapat dibandingkan secara kuantitatif dengan Target Menengah dalam Renstra DJPT.

Selain itu, indikator yang tercantum dalam draft Renstra DJPT, yaitu Persentase Pemenuhan Dokumen Awak Kapal Perikanan (persen), memiliki perbedaan substansial dengan indikator yang diukur pada tahun 2025. Perbedaan tersebut mencakup ruang lingkup pengukuran, definisi operasional, serta metode perhitungan, sehingga kedua indikator tersebut tidak dapat disepadankan secara langsung.

4. Membandingkan antara realisasi tahun berjalan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di kementerian (jika ada)

Tabel 51 Perbandingan antara realisasi tahun berjalan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di kementerian

PPN Tual			PPN Ambon		
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
0,26	0,56	215%	0,26	0,68	261%

Berdasarkan hasil pengukuran tahun 2025, PPN Tual dan PPN Ambon samasama menunjukkan capaian kinerja yang melampaui target yang ditetapkan, dengan target sebesar 0,26. Pada PPN Tual, realisasi mencapai 0,56 atau setara dengan 215% dari target, sedangkan PPN Ambon mencatat realisasi sebesar 0,68 atau 261% dari target.

Tingginya persentase capaian pada kedua pelabuhan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan berjalan lebih baik dari yang diproyeksikan, meskipun indikator yang digunakan

bersifat operasional dan berdiri sendiri. Perbedaan nilai realisasi antara PPN Tual dan PPN Ambon mengindikasikan adanya variasi kondisi lapangan, baik dari sisi intensitas pelayanan, karakteristik kapal dan awak kapal, maupun tingkat kepatuhan terhadap pemenuhan persyaratan bekerja.

Secara umum, capaian ini menggambarkan bahwa upaya pelayanan dan pengawasan pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan di kedua pelabuhan telah berjalan efektif, dengan PPN Ambon menunjukkan capaian relatif lebih tinggi dibandingkan PPN Tual.

5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan capaian Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan didukung oleh karakteristik IKU yang memiliki indikator khusus berdasarkan range GT kapal. Pada PPN Tual, struktur armada didominasi oleh kapal perikanan dengan ukuran di atas 100 GT, sehingga pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan relatif lebih terkontrol dan terstandar.

Selain itu, capaian ini masih terbantu oleh adanya kebijakan kemudahan pemenuhan persyaratan bekerja di atas kapal perikanan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2541/MEN-KP/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024, yang memberikan fleksibilitas dalam pemenuhan dokumen tertentu. Kebijakan tersebut berdampak positif terhadap meningkatnya tingkat kepatuhan pemilik kapal dan awak kapal perikanan dalam proses verifikasi dan penerbitan SPB.

Keberhasilan lainnya didukung oleh adanya penambahan jenis layanan, yaitu pelayanan penerbitan Buku Pelaut Perikanan, sehingga awak kapal perikanan yang telah memenuhi persyaratan dapat langsung difasilitasi penerbitan dokumen kepelautan, yang mendorong peningkatan kepatuhan administrasi secara berkelanjutan.

Di sisi lain, masih terdapat potensi kegagalan yang perlu menjadi perhatian, khususnya apabila terjadi penambahan jumlah armada perikanan dengan ukuran ≥ 300 GT yang beroperasi di wilayah PPN Tual. Pada range GT tersebut, tingkat pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan masih tergolong rendah, terutama karena kompleksitas persyaratan yang lebih tinggi, seperti kewajiban

Medical Check Up (MCU) dan sertifikat kompetensi sesuai jabatan (endorsement).

Keterbatasan fasilitas penunjang pemeriksaan kesehatan di wilayah PPN Tual dan sekitarnya juga menjadi kendala signifikan. Saat ini, fasilitas kesehatan masih dapat mengakomodasi pemeriksaan kesehatan biasa, namun pemeriksaan Medical Check Up (MCU) belum dapat dilayani, sehingga berpotensi menghambat pemenuhan persyaratan bagi awak kapal perikanan berukuran besar.

Selain itu, belum tersedianya fungsi PPN Tual sebagai lembaga penyedia pendidikan dan pelatihan untuk penerbitan sertifikat kompetensi dasar seperti BST Fisheries menjadi tantangan tersendiri. Kondisi ini menyebabkan awak kapal perikanan harus mengikuti pendidikan dan pelatihan di luar daerah, yang berdampak pada keterlambatan pemenuhan persyaratan dan menurunnya tingkat kepatuhan pada kapal dengan GT besar.

Sebagai tindak lanjut atas capaian indikator Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan serta mempertimbangkan hasil analisis keberhasilan dan kendala yang dihadapi, diperlukan langkah-langkah strategis dan terukur guna menjaga keberlanjutan capaian kinerja sekaligus mengantisipasi tantangan pemenuhan persyaratan pada kapal perikanan dengan ukuran GT besar. Rencana tindak lanjut ini disusun untuk memastikan peningkatan kualitas pelayanan, perlindungan awak kapal perikanan, serta kesiapan PPN Tual dalam menghadapi dinamika operasional ke depan.

- **Antisipasi Berakhirnya Kebijakan Relaksasi**

Mengingat kebijakan kemudahan pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2541/MEN-KP/XII/2024 tidak diketahui masa berlakunya, perlu dilakukan langkah antisipatif melalui peningkatan kesiapan pemenuhan persyaratan secara penuh. Upaya ini dilakukan dengan mendorong pemilik kapal dan perusahaan perikanan untuk secara bertahap memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan, sehingga apabila kebijakan relaksasi berakhir, pelayanan dan penerbitan SPB tetap dapat berjalan tanpa menghambat operasional kapal.

- **Peningkatan Layanan Buku Pelaut Perikanan**

Mengembangkan dan memperluas layanan penerbitan Buku Pelaut Perikanan bagi awak kapal perikanan yang telah memenuhi persyaratan,

sebagai instrumen penguatan kepatuhan administrasi dan perlindungan awak kapal perikanan.

- **Penguatan Fasilitas Pemeriksaan Kesehatan**

Mendorong kerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan di wilayah PPN Tual maupun daerah terdekat untuk pemenuhan pemeriksaan kesehatan, serta memfasilitasi penyediaan layanan Medical Check Up (MCU) guna mendukung pemenuhan persyaratan awak kapal perikanan pada kapal berukuran besar. Pengembangan Fungsi PPN Tual sebagai Pusat Pendidikan dan Pelatihan

- **Mengusulkan penambahan fungsi PPN Tual sebagai lembaga atau mitra penyedia pendidikan dan pelatihan sertifikat kompetensi awak kapal perikanan, khususnya BST Fisheries, melalui kerja sama dengan lembaga pelatihan yang berwenang.**

- **Antisipasi Penambahan Armada GT Besar**

Menyusun langkah antisipatif terhadap potensi peningkatan jumlah kapal perikanan ≥ 300 GT yang beroperasi di PPN Tual dengan memetakan kebutuhan dokumen awak kapal, kesiapan layanan, serta penyesuaian sumber daya manusia pelayanan.

- **Monitoring dan Evaluasi Berkala**

Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan guna memastikan capaian indikator kinerja tetap terjaga dan berkelanjutan.

6. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya.

- **Anggaran**

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja tingkat pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 52 capaian penghitungan lebih detail terkait efisiensi penggunaan anggaran

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AAROxCRO	(AAROxCRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(2)	(6)=(5)-(4)
Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan	215 %	53.775.000	27.172.000	115.616.250	88.444.250

$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$	164%
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{164\%}{20} \times 50 \right)$	460%

Berdasarkan Rincian Output (RO) pada indikator Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan, capaian kinerja mencapai 215% yang menunjukkan bahwa output yang dihasilkan melampaui target yang ditetapkan, dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 460%. Efisiensi tersebut terjadi karena hingga akhir Tahun 2025 anggaran pada rincian output masih dalam kondisi diblokir sehingga tidak dapat direalisasikan, namun keterbatasan tersebut tidak menghambat pelaksanaan kegiatan karena didukung oleh optimalisasi sumber daya internal dan mekanisme pelayanan yang telah berjalan baik.

- Sumber Daya Manusia

Petugas kesyahbandaran memiliki peran strategis sebagai petugas pemeriksa dalam pemenuhan persyaratan bekerja bagi awak kapal perikanan. Pemeriksaan ini menjadi bagian penting dalam proses pelayanan kesyahbandaran, khususnya sebagai prasyarat penerbitan Persetujuan Berlayar (SPB), guna memastikan bahwa setiap awak kapal telah memenuhi ketentuan administrasi dan keselamatan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dokumen yang diperiksa meliputi surat keterangan kesehatan, Perjanjian Kerja Laut (PKL), serta dokumen ketenagakerjaan lainnya.

Dalam pelaksanaan fungsi tersebut, jumlah dan ketersediaan SDM kesyahbandaran menjadi faktor yang sangat menentukan. Saat ini, jumlah petugas kesyahbandaran aktif di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual tercatat sebanyak 7 orang. Untuk mendukung penguatan kapasitas layanan, terdapat tambahan 4 orang petugas yang pada tahun 2025 telah mengikuti pendidikan dan pelatihan syahbandar, namun belum dilantik secara resmi sebagai syahbandar. Keempat petugas ini tetap berperan membantu proses pemeriksaan administrasi awak kapal di bawah koordinasi syahbandar.

Namun demikian, adanya penugasan sebagian petugas ke pelabuhan binaan, khususnya PP Ukurlaran, menyebabkan 2 orang petugas aktif harus digeser penugasannya, sehingga jumlah petugas yang melaksanakan pelayanan langsung di PPN Tual menjadi terbatas. Kondisi ini menuntut pengaturan pembagian tugas yang cermat agar proses pemeriksaan persyaratan bekerja awak kapal perikanan tetap berjalan efektif dan tidak menghambat penerbitan dokumen kesyahbandaran.

Secara keseluruhan, peran petugas kesyahbandaran sebagai petugas pemeriksa persyaratan bekerja awak kapal perikanan sangat bergantung pada kecukupan dan kompetensi SDM yang tersedia. Meskipun jumlah petugas relatif terbatas, pelaksanaan tugas pemeriksaan tetap dapat

berjalan dengan baik melalui optimalisasi peran petugas, pemanfaatan SDM yang telah mengikuti diklat, serta penguatan koordinasi internal.

7. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan

1) Pelayanan Penerbitan Dokumen Awak Kapal Perikanan

Pelaksanaan pelayanan penerbitan dokumen seperti Buku Pelaut, Sertifikat Keterampilan, Perjanjian Kerja Laut (PKL), dan dokumen kelengkapan lainnya secara tepat waktu dan sesuai standar berkontribusi besar terhadap terpenuhinya persyaratan bekerja awak kapal. Optimalisasi sistem pelayanan, pemanfaatan aplikasi pelayanan digital, serta peningkatan kapasitas petugas pelayanan turut mendukung peningkatan capaian kinerja.

2) Pengawasan dan Pemeriksaan Kelaiklautan Kapal Perikanan

Kegiatan pemeriksaan administrasi dan teknis terhadap kapal perikanan sebelum berlayar memastikan bahwa awak kapal yang bekerja telah memenuhi persyaratan kompetensi, kesehatan, serta kelengkapan dokumen. Pengawasan yang konsisten mampu menekan pelanggaran dan meningkatkan kepatuhan pengguna jasa.

3) Sosialisasi dan Pembinaan kepada Pemilik Kapal dan Awak Kapal

Pelaksanaan sosialisasi terkait regulasi ketenagakerjaan awak kapal perikanan, keselamatan kerja, serta standar kompetensi kerja membantu meningkatkan pemahaman stakeholder sehingga kepatuhan terhadap persyaratan kerja meningkat.

4) Peningkatan Kompetensi dan Pelatihan Awak Kapal

Program pelatihan Basic Safety Training (BST), ANKAPIN/ATKAPIN, maupun pelatihan keselamatan kerja berkontribusi dalam meningkatkan kualitas SDM awak kapal sehingga memenuhi standar kelayakan bekerja.

Selain faktor pendukung, terdapat beberapa kendala yang dapat menyebabkan tidak tercapainya target indikator kinerja, antara lain:

1) Rendahnya Kesadaran dan Kepatuhan Pengguna Jasa

Sebagian pemilik kapal maupun awak kapal masih kurang memahami pentingnya kelengkapan dokumen dan sertifikasi, sehingga masih ditemukan awak kapal yang bekerja tanpa memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

2) Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pelayanan

Keterbatasan fasilitas pelayanan, sistem aplikasi yang mengalami gangguan, serta keterbatasan peralatan pemeriksaan dapat memperlambat proses penerbitan dokumen awak kapal.

3) Faktor Efisiensi Anggaran

Pembatasan anggaran dapat berdampak pada berkurangnya kegiatan pembinaan, sosialisasi, serta pelatihan awak kapal sehingga mempengaruhi tingkat pemenuhan persyaratan kerja.

Pencapaian indikator Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan sangat dipengaruhi oleh optimalisasi pelayanan dokumen, pengawasan operasional kapal, peningkatan kompetensi awak kapal, serta koordinasi lintas sektor. Sementara itu, rendahnya kepatuhan pengguna jasa, keterbatasan sarana prasarana, SDM, serta anggaran menjadi faktor utama yang dapat menghambat pencapaian target kinerja.

3.2.10 Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual

Indikator Kinerja Nilai Capaian Pembangunan Zona integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual, Sasaran Kegiatan agar terwujud Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual. Merupakan penilaian pembangunan Zona Integritas menuju WBK di PPN Tual yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Formula Perhitungan Indikator Kinerja ini adalah jumlah nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK PPN Tual, yang terdiri dari Komponen pengungkit 60% (Manajemen Perubahan 5%; Penataan Tatalaksana 5%; Penataan Sistem Manajemen SDM 15%; Penguatan Akuntabilitas Kinerja 10%; Penguatan Pengawasan 15%; Penguatan Kualitas Pelayanan Publik 10%)

Komponen Hasil 40%.

Indikator Kinerja Nilai Capaian Pembangunan Zona integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual TA 2025. Sumber data yang akan digunakan sebagai data dukung berasal dari penilaian mandiri Lembar Kerja Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Indikator kinerja ini dilaporkan setiap tahunan, capaian realisasi dari indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun berjalan

Tabel 53 Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun berjalan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian
Nilai Capaian Pembangunan Zona integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	45,5	72,57	159,5

Berdasarkan data kinerja Tahun 2025, target Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual ditetapkan sebesar 45,5. Adapun realisasi kinerja yang dicapai mencapai 72,57 , sehingga menghasilkan tingkat capaian sebesar 159,5% . Hal ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja telah melampaui target yang ditetapkan , yang mengindikasikan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Zona Integritas secara efektif dan optimal.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya atau dengan beberapa tahun terakhir

Tabel 54 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya atau dengan beberapa tahun terakhir

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai Capaian Pembangunan Zona integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	2024	45,10	72,45	160,64
	2025	45,10	72,75	159,5

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual pada Tahun 2025 tercatat sebesar 72,75% , meningkat dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar 72,45% . Meskipun peningkatan realisasi relatif kecil, capaian kinerja tetap berada pada kategori sangat baik.

Dari sisi tingkat capaian terhadap target Tahun 2025 mencapai 159,5% , sedikit menurun dibandingkan capaian Tahun 2024 sebesar 160,64% . Penurunan ini disebabkan oleh adanya peningkatan target kinerja dari 45,10% pada Tahun 2024 menjadi 45,5% pada Tahun 2025, sementara realisasi kinerja relatif stabil. Secara keseluruhan, kinerja Tahun 2025 tetap menunjukkan konsistensi dan keberlanjutan peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.

3. Membandingkan antara realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 55 Perbandingan antara realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indikator Kinerja	Target Renstra DJPT 2025	Realisasi PPN Tual 2025	% Capaian
Nilai Capaian Pembangunan Zona integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	-	72.57	-

Capaian pada 2025 belum dapat dibandingkan karena renstra tahun 2025- 2029 belum ditetapkan.

4. Membandingkan antara realisasi tahun berjalan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di kementerian (jika ada)

Tabel 56 Perbandingan antara realisasi tahun berjalan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di kementerian

PPN Tual			PPN Ambon		
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
45,5	72,75	159,5%	45,5	58,72	129,05%

PPN Tual dan PPN Ambon memiliki target yang sama yaitu 45,5, namun realisasi dan capaian kinerja PPN Tual lebih tinggi. PPN Tual memperoleh realisasi sebesar 72,75 dengan capaian 159,5%, sedangkan PPN Ambon memperoleh realisasi sebesar 58,72 dengan capaian 129,05%. Dengan demikian, terdapat selisih realisasi sebesar 14,03 dan selisih capaian kinerja sebesar 30,45%.

5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual didukung oleh komitmen pimpinan dan pegawai, pelaksanaan rencana aksi yang terstruktur, serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala. Di sisi lain, penurunan tipis persentase capaian kinerja bukan disebabkan oleh menurunnya realisasi, melainkan oleh peningkatan target kinerja, keterbatasan waktu, serta meningkatnya kompleksitas pemenuhan indikator dan eviden. Secara umum, faktor pendukung lebih dominan dibandingkan kendala, sehingga kinerja tetap berada pada kategori sangat baik.

Kinerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual menunjukkan peningkatan dari sisi realisasi dibandingkan tahun sebelumnya, namun mengalami penurunan tipis pada persentase capaian akibat adanya peningkatan target kinerja. Kondisi ini mencerminkan bahwa pelaksanaan kinerja tetap berjalan konsisten dan berada pada kategori sangat baik, meskipun standar penilaian yang ditetapkan semakin tinggi.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual meliputi penguatan monitoring dan evaluasi secara berkala, penyesuaian rencana aksi terhadap peningkatan target kinerja, peningkatan koordinasi internal lintas fungsi, optimalisasi pemanfaatan sistem dan inovasi pelayanan, serta penguatan pemahaman dan kapasitas pegawai. Upaya tersebut efektif dalam mempertahankan peningkatan realisasi kinerja meskipun terjadi penyesuaian target yang berdampak pada persentase capaian.

6. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya

- Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Nilai capaian pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual” Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 57 capaian penghitungan lebih detail terkait efisiensi penggunaan anggaran

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AAROxCRO	(AAROxCRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(2)	(6)=(5)-(4)
Nilai Capaian Pembangunan Zona integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	159,5 %	1.500.000	1.500.000	2.392.500	892.500

$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$	59,5%
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \frac{(59,5\% \times 50)}{20}$	198,75%

Realisasi anggaran Tahun 2025 untuk mendukung tercapainya IKM ini sebesar Rp 1.500.000,- atau 100% yang digunakan untuk menunjang dalam tercapainya IKM ini. Nilai efisiensi penggunaan anggaran sebesar 198,75 %, hal ini menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan anggarannya tinggi dan perlu dipertahankan atau ditingkatkan di tahun 2026.

- Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian IKM.10 Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di PPN Tual, didukung oleh 40 (empat puluh) orang anggota tim kerja WBK, yang terbagi dari 7 (tujuh) Kelompok Kerja. Terlaksananya kegiatan ini dengan dipenuhinya dokumen area perubahan dan melakukan penilaian mandiri menggunakan LKE di akhir tahun, untuk tercapainya IKM ini dibutuhkan komitmen dari masing-masing tim kerja untuk memberikan data dukung WBK secara tepat waktu.

7. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian pernyataan kinerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah, antara lain penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi Zona Integritas, pemenuhan eviden pada seluruh area perubahan, penguatan monitoring dan evaluasi internal, serta penerapan inovasi pelayanan publik yang

meningkatkan kualitas dan akuntabilitas layanan. Program dan kegiatan tersebut berkontribusi signifikan terhadap peningkatan realisasi kinerja dan konsistensi capaian pada kategori sangat baik.

Namun demikian, terdapat beberapa kegiatan yang belum optimal dalam mendukung capaian kinerja, seperti keterbatasan waktu pelaksanaan untuk pemenuhan seluruh indikator secara maksimal, intensitas pendampingan teknis yang belum merata, serta meningkatnya kompleksitas standar penilaian Zona Integritas. Kondisi tersebut berdampak pada penurunan tipis persentase capaian kinerja meskipun realisasi kinerja meningkat. Secara keseluruhan, program dan kegiatan yang dilaksanakan lebih dominan mendukung keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja, sementara kendala yang ada bersifat teknis dan dapat diatasi melalui perbaikan berkelanjutan.

3.2.11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual

Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai seberapa banyak rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil pengawasan (audit, inspeksi, evaluasi, dsb.) yang benar-benar ditindaklanjuti dan digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual. Tujuan Indikator Kinerja ini yaitu untuk mendorong tindak lanjut hasil pengawasan agar tidak sekadar formalitas, memastikan bahwa pengawasan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kinerja pelabuhan dan mengukur komitmen pengelola pelabuhan terhadap perbaikan berkelanjutan.

Indikator Kinerja ini mengacu pada Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bap) yang terbit pada Triwulan I Tahun 2025 s.d. Triwulan IV Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan.

Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual Merupakan indikator yang menunjukkan suatu persentase nilai temuan

Inspektorat Jenderal KKP TA 2025 lingkup UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual TA 2025. Sumber data yang akan digunakan sebagai data dukung nantinya bersumber dari Inspektorat Jenderal KKP. Indikator kinerja ini dilaporkan setiap triwulan, capaian realisasi dari indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun berjalan

Tabel 58 Target dan Realisasi IKU Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual Tahun 2025	85	100	117,65

Pada Tahun 2025, indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Tual ditetapkan dengan target sebesar 85%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi yang dicapai mencapai 100%. Dengan demikian, capaian kinerja tercatat sebesar 117,65%, yang menunjukkan bahwa realisasi kinerja melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan serta komitmen unit kerja dalam mendorong perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya atau dengan beberapa tahun terakhir.

Tabel 59 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)
Persentase Rekomendasi Hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual Tahun 2025	80	100	125	85	100	117,65

Berdasarkan indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Tual , pada Tahun 2024 target ditetapkan sebesar 80% dengan realisasi 100% , sehingga capaian kinerja mencapai 125% . Sementara itu, pada Tahun 2025 target meningkat menjadi 85% dan realisasi tetap berada pada angka 100% , dengan capaian kinerja sebesar 117,65%.

3. Membandingkan antara realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdpat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 60 Perbandingan antara realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdpat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indikator Kinerja	Target Renstra DJPT 2025	Realisasi PPN Tual 2025	% Capaian
Rekomendasi Hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	85	117.65	138,41%

Indikator Kinerja Rekomendasi Hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan merupakan IKU turunan dari DJPT yaitu Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan (Persen), dimana taget untuk DJPT tahun 2025 sebesar 85%. PPN Tual berdasarkan data hasil

capaian Hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan pada tahun 2025 tercapai 117.65. Pelaksanaan program pengembangan fasilitas pelabuhan berjalan efektif dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Dengan tercapainya IKU tersebut maka PPN Tual turut berkontribusi dalam tercapainya target IKU DJPT.

4. Membandingkan antara realisasi tahun berjalan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di kementerian (jika ada)

Tabel 61 Perbandingan antara realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

PPN Tual			PPN Ambon		
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
85	100	117,65	85	100	117,65

Jika dibandingkan dengan capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPN Ambon, capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPN Tual 2025 memiliki realisasi yang sama yaitu 100%, yang artinya sudah terselesaikannya seluruh rekomendasi hasil audit oleh Inspektorat Jenderal KKP.

5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Tual, yang realisasinya mencapai 100% dan melampaui target tahunan 85%, dipengaruhi oleh beberapa faktor utama.

- Adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta unit kerja terkait dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan secara tepat waktu dan berkelanjutan.
- Terjalinnya koordinasi dan komunikasi yang efektif antara tim pengawasan dan unit pelaksana, sehingga rekomendasi dapat dipahami dan diimplementasikan dengan baik.

- Meningkatnya pemahaman dan kesadaran unit kerja terhadap pentingnya rekomendasi pengawasan sebagai instrumen perbaikan kinerja dan tata kelola.
- Adanya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap tindak lanjut rekomendasi turut mendorong optimalisasi pemanfaatan hasil pengawasan, sehingga kinerja unit kerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

6. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya.

- Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPN Tual” Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 62 capaian penghitungan lebih detail terkait efisiensi penggunaan anggaran

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AAROxCRO	(AAROxCRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(2)	(6)=(5)-(4)
Rekomendasi Hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	117,65 %	28.372.000	28.371.860	33.379.858	5.007.998

$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AAROI \times CROI) - RAROI)}{\sum_{i=1}^n (AAROI)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$	17,65%
$Nilai Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{17,65\%}{20} \times 50 \right)$	94,125%

S

asi anggaran Tahun 2025 untuk mendukung tercapainya IKM ini sebesar Rp. 28.371.860,- atau 99,9995% yang digunakan untuk menunjang dalam tercapainya IKM ini. Nilai efisiensi penggunaan anggaran sebesar 94,125 %.

- Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian IKM.11 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPN Tual 2025, didukung oleh Seluruh Tim Kerja beserta jajarannya dalam penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan dari Itjen/APIP.

7. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja pada indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Tual didukung oleh pelaksanaan beberapa program dan kegiatan yang berjalan secara efektif dan terintegrasi. Salah satu program utama yang berkontribusi signifikan adalah pelaksanaan kegiatan pengawasan dan evaluasi kinerja secara terencana , yang menghasilkan rekomendasi yang bersifat aplikatif dan relevan dengan kebutuhan perbaikan kinerja unit kerja. Rekomendasi tersebut disusun berdasarkan hasil analisis risiko dan permasalahan aktual, sehingga mudah dipahami dan ditindaklanjuti.

Selain itu, kegiatan pendampingan dan asistensi tindak lanjut hasil

pengawasan turut menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Melalui pendampingan ini, unit kerja memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait langkah-langkah implementasi rekomendasi, sehingga tingkat pemanfaatan hasil pengawasan dapat dioptimalkan. Kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala atas tindak lanjut rekomendasi juga berperan penting dalam memastikan konsistensi pelaksanaan perbaikan kinerja serta mencegah terjadinya pengulangan temuan.

Di sisi lain, potensi kendala yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja relatif dapat diminimalkan melalui koordinasi lintas fungsi yang intensif dan pemanfaatan media pelaporan yang sistematis. Dengan demikian, program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan target kinerja, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas tata kelola dan kinerja PPN Tual secara berkelanjutan.

Secara umum capaian Nilai Rekonsiliasi Kinerja pada tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan, akan tetapi guna peningkatan dan perbaikan pada capaian tahun selanjutnya kami memberikan saran sebagai berikut:

- Melakukan tindak lanjut dengan cepat sehingga dapat menjadi bahan perbaikan kinerja organisasi;
- Mendeteksi lebih dini kemungkinan terjadinya temuan berulang;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait capaian kinerja secara berkala;

3.2.12 Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual

Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu dilakukan evaluasi SAKIP untuk seluruh unit kerja instansi pemerintah. Evaluasi dilakukan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Indikator Kinerja Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual merupakan indikator yang diukur dan dilaporkan setelah diperoleh hasil verifikasi Penilaian Mandiri SAKIP oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Capaian realisasi dari indikator kinerja ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun berjalan

Tabel 63 Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun berjalan.

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian
Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	88	88,80	100,91

Realisasi capaian indikator kinerja Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual pada tahun 2025 sebesar 88,80 dengan persentase realisasi capaian adalah sebesar 100,91%.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya atau dengan beberapa tahun terakhir.

Tabel 64 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya atau dengan beberapa tahun terakhir

Indikator Kinerja	Realisasi 2020-2023				Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	% Capaian 2025
	2020	2021	2022	2023			
Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	70,36	84,45	80,40	95,12	88,14	88,80	100,91

Berdasarkan tabel diatas, Nilai PM SAKIP PPN Tual menjadi Indikator Kinerja pada periode kinerja tahun 2020, 2021 dan 2022. Pada tahun 2023 dan 2024 indikator kinerja tersebut digantikan dengan Nilai Rekonsiliasi Kinerja PPN Tual, kemudian pada tahun 2025 Nilai PM SAKIP PPN Tual kembali menjadi salah satu capaian target indikator kinerja yang harus dicapai. Terjadi peningkatan nilai PM SAKIP PPN Tual dari tahun 2020 hingga tahun 2025 meskipun pada tahun 2022 terjadi penurunan nilai dari tahun sebelumnya. Jadi jika perolehan nilai PM SAKIP PPN Tual tahun 2025 dibandingkan dengan perolehan nilai pada periode sebelumnya yakni pada tahun 2022 maka

perolehan realisasi pada tahun 2025 lebih besar daripada capaian tahun 2022 dengan selisih nilai sebesar 8,40 dengan persentase capaian tahun 2025 sebesar 100,91%.

3. Membandingkan antara realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 65 Perbandingan antara realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indikator Kinerja	Target Renstra DJPT 2025	Ralisasi PPN Tual 2025	% Capaian
Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	88	88,80	100,91

Target Nilai PM SAKIP PPN Tual tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025-2029 yakni sebesar 88. Jika target tersebut dibandingkan dengan capaian realisasi Nilai PM SAKIP PPN Tual pada tahun 2025 yang diperoleh sebesar 88,80 dengan persentase capaiannya 100,91%, maka terdapat selisih 0,91% melampaui dari target capaian 100% yang telah ditetapkan.

4. Membandingkan antara realisasi tahun berjalan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di kementerian (jika ada)

Tabel 66 Perbandingan antara realisasi tahun berjalan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di kementerian

PPN Tual			PPN Ambon		
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
88	88,80	100,91%	88	88,50	100,57

Jika dibandingkan dengan nilai PM SAKIP PPN Ambon, maka capaian nilai PM SAKIP PPN Tual lebih besar dengan selisih 0,30. Sedangkan dari persentase capaian, PPN Tual lebih besar 0,34% dibandingkan dengan persentase capaian PPN Ambon.

5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi IKM Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual sudah mencapai atau melebihi target tahun 2025 dengan nilai perolehan 88,80 predikat “A”. Dalam pelaksanaan pengelolaan kinerja di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual telah diidentifikasi beberapa permasalahan yang ada diantaranya sebagai berikut: 1). Belum semua pegawai berperan aktif, memahami dan peduli dengan pengelolaan kinerja organisasi; dan 2). Beberapa dokumen bukti dukung untuk penyusunan Laporan Kinerja belum disampaikan tepat waktu. Beberapa rekomendasi perbaikan yang perlu ditindak lanjuti atas permasalahan tersebut diantaranya: 1). Pimpinan unit kerja lebih memberi perhatian dan motivasi kepada pegawai agar dapat berperan aktif, memahami dan peduli dengan pengelolaan kinerja organisasi; dan 2). Bukti dukung terkait laporan kinerja agar dapat disampaikan tepat waktu dan berpedoman pada dokumen pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan.

Uraian hasil verifikasi perolehan Nilai PM SAKIP untuk seluruh Satker lingkup Ditjen Perikanan Tangkap terhadap masing-masing komponen manajemen kinerja secara umum dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Seluruh satker telah memiliki dokumen perencanaan kinerja dan telah dipertahankan setidaknya dalam lima tahun terakhir. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu disusun untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound (SMART) dan telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Namun masih terdapat kekurangan berupa dokumen Rencana Strategis Ditjen Perikanan Tangkap periode 2025-2029 yang masih dalam bentuk rancangan (draft) serta perlu penyempurnaan pada pohon kinerja dengan memberikan informasi hubungan kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas antar bidang (crosscutting). Sudah terdapat upaya yang patut dihargai dalam pemenuhan capaian perencanaan kinerja dan upaya inovatif serta layak menjadi percontohan di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap.

2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien, serta telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan yang didukung oleh manual IK sebagai pedoman pengukuran kinerja. Hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien, serta dijadikan sebagai dasar dalam pemberian reward dan punishment pada seluruh satker. Namun masih terdapat hasil pengukuran capaian dan evaluasi rencana aksi belum dilakukan secara mendalam terutama pada pengungkapan progress, hambatan dan rekomendasi.

3. Pelaporan Kinerja

Seluruh Satker telah memiliki laporan yang menggambarkan kinerjanya dan setidaknya dipertahankan dalam lima tahun terakhir. Dokumen Laporan Kinerja (LKj) telah memenuhi standar yang menggambarkan kualitas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya. Perlu didorong pemanfaatan data laporan kinerja sebagai dasar penyesuaian strategi/kebijakan dan anggaran dalam mencapai kinerja berikutnya.

4. Evaluasi Kinerja Internal

Satker lingkup Ditjen Perikanan Tangkap telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas internal secara berkualitas dengan sumber daya memadai melalui penggunaan teknologi informasi berupa Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pada aplikasi Kinerjaku. Pedoman evaluasi AKIP internal Ditjen Perikanan Tangkap juga telah disusun dan telah dilakukan evaluasi AKIP dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.

6. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 67 capaian penghitungan lebih detail terkait efisiensi penggunaan anggaran

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AAROxCRO	(AAROxCRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(2)	(6)=(5)-(4)
Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	126,76%	71.000.000	70.999.518	89.999.600	19.000.082

$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$	1,26%
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{1,26\%}{20} \times 50 \right)$	53,15%

7. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berdasarkan hasil verifikasi Nilai PM SAKIP PPN Tual tahun 2025 untuk meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, Ditjen Perikanan Tangkap merekomendasikan untuk mengambil langkah-langkah perbaikan implementasi SAKIP berupa:

- 1) Menyampaikan tanggapan/saran/masukan terkait perencanaan strategis pembangunan perikanan tangkap periode 2025-2029, melalui identifikasi permasalahan serta usulan program/rencana kerja pada setiap satker;

- 2) Identifikasi pelaksanaan inovasi yang dapat meningkatkan akuntabilitas serta berdampak pada pencapaian kinerja; dan
- 3) Melakukan sosialisasi informasi pengukuran kinerja secara berkala dan berkelanjutan kepada seluruh pegawai.

Beberapa program/kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual diantaranya: 1) Telah dilakukan sosialisasi informasi pengukuran kinerja secara berkala dan berkelanjutan kepada seluruh pegawai di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual; dan 2). Terdapat pelaksanaan inovasi berupa Dashboard Online Pelabuhan Perikanan Tual (Dolpint), dapat diakses pada laman bit.ly/dataharianppntual dan Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) yang dapat meningkatkan akuntabilitas serta berdampak pada pencapaian kinerja.



- (a) Sosialisasi dan evaluasi kinerja lingkup PPN Tual
- (b) Tampilan Dashboard Online PPN Tual
- (c) Gedung Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) PPN Tual

3.2.13 Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Indeks)

Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna pengembangan profesionalitas profesi ASN. Indeks profesionalitas diukur menggunakan standar profesionalitas ASN yang terdiri dari empat dimensi, yaitu :

1. Kualifikasi, merupakan dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan/atau keahlian khusus, sehingga seseorang tersebut mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai tugas jabatannya. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenjang riwayat pendidikan terakhir yang dicapai oleh PNS;
2. Kompetensi, merupakan dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan yang tercermin melalui perilaku kinerja, yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenis diklat yang pernah diikuti (seperti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Kursus-kursus, dan Seminar/Workshop/Magang/Sejenis);
3. Kinerja, merupakan dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kinerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit kerja atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Alat ukur yang digunakan adalah rata-rata kinerja individu pada suatu unit kerja;
4. Disiplin, merupakan dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan kedisiplinan apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan.

Alat ukur yang digunakan persentase jumlah PNS yang memperoleh

hukuman disiplin berdasarkan tingkatan hukuman disiplin.

Indikator Kinerja Indeks profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual merupakan indikator yang diukur dan dilaporkan setiap tahun. Capaian realisasi dari indikator kinerja ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun berjalan

Tabel 68 Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja tahun berjalan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian
Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	87	86,8	99,77

Realisasi capaian indikator kinerja IP ASN PPN Tual pada tahun 2025 sebesar 86,8 dengan persentase realisasi capaian adalah sebesar 99,77% yang ditetapkan oleh Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya atau dengan beberapa tahun terakhir

Tabel 69 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya atau dengan beberapa tahun terakhir

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Capaian	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian
Indeks profesionalitas ASN lingkup PPN Tual	84	81,07	96,51	87	86,8	99,77

Berdasarkan tabel diatas, perolehan realisasi pada tahun 2025 lebih besar daripada capaian tahun 2024 dengan selisih 5,73 atau terjadi peningkatan persentase capaian sebesar 3,26%.

3. Membandingkan antara realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 70 Perbandingan antara realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indikator Kinerja	Target Renstra DJPT 2025	Realisasi PPN Tual 2025	% Capaian
Indeks profesionalitas ASN lingkup PPN Tual	84	86,8	103,33%

Target Nilai IP ASN PPN Tual tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025-2029 yakni sebesar 84. Jika target tersebut dibandingkan dengan capaian realisasi Nilai IP ASN PPN Tual pada tahun 2025 yang diperoleh sebesar 86,8 dengan persentase capaiannya 103,33%, maka terdapat selisih 3,33% melampaui dari target capaian 100% yang telah ditetapkan

4. Membandingkan antara realisasi tahun berjalan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di kementerian (jika ada)

Tabel 71 Perbandingan antara realisasi tahun berjalan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di kementerian

PPN Tual			PPN Ambon		
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
87	86,8	99,77%	87	90,03	103,48%

Jika dibandingkan dengan Capaian Indeks Profesionalitas ASN lingkup PPN Ambon, capaian Indeks Profesionalitas ASN lingkup PPN Tual 2025 lebih kecil dengan selisih 3,23. Sedangkan dari persentase capaian, PPN Tual lebih kecil 3,71% dibandingkan dengan persentase capaian PPN Ambon.

5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi IKM Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual sampai dengan semester II tahun 2025 belum mencapai atau melebihi target semester II tahun 2025 dan juga belum mencapai atau melampaui target tahun 2025 dengan kategori predikat “Tinggi”. Hal tersebut disebabkan karena beberapa kondisi sebagai berikut:

- 1) PPN Tual hanya memperoleh nilai 22.5 dari target 25 bobot maksimal yang bisa dicapai atau persentase capainnya 90% untuk dimensi kualifikasi, hal ini disebabkan karena masih terdapat beberapa pegawai yang tingkat pendidikannya belum memperoleh bobot nilai maksimal;
- 2) Kemudian pada dimensi kompetensi nilai yang diperoleh sebesar 32.06 dari target 40 bobot maksimal yang bisa dicapai atau persentase capainnya sebesar 80,15%, hal ini disebabkan karena tingkat partisipasi keikutsertaan pegawai dalam mengikuti diklat/kursus masih sangat rendah atau belum optimal;
- 3) Dimensi kinerja memperoleh nilai sebesar 27.24 dari target 30 bobot maksimal yang bisa dicapai atau persentase capaiannya sudah 90,8%, hal ini disebabkan karena sampai dengan penilaian kinerja pegawai triwulan IV dan periode final tahun 2024, masih terdapat beberapa pegawai yang berpredikat kinerja “Kurang” dan “Butuh Perbaikan”. Riwayat penilaian kinerja pegawai periode final tahun 2024 merupakan komponen pengukuran IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (dimensi kinerja) pada tahun 2025;
- 4) Masih terdapat pegawai khususnya CPNS dan PPPK belum termasuk dalam perhitungan IP ASN tahun 2025. Padahal pemenuhan dimensi kualifikasi (pendidikan) dan dimensi kompetensi (diklat/kursus) pegawai tersebut secara signifikan dapat berkontribusi meningkatkan capaian IP ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual.

Tidak maksimalnya hasil yang diperoleh dari ketiga dimensi tersebut, menyebabkan beberapa pegawai memperoleh predikat IP ASN pada kategori “Rendah” dan “Sangat Rendah”. Sedangkan predikat tersebut masih bisa ditingkatkan ke kategori “Sedang” ataupun “Tinggi” bahkan masih berpeluang ditingkatkan sampai dengan predikat “Sangat Tinggi”. Hal itu bisa terwujud

seiring dengan upaya optimal dari pegawai untuk memenuhi beberapa dimensi yang bobot nilainya belum mencapai nilai maksimal atau persentase 100% dari setiap dimensi pengukuran IP ASN.

Adapun dimensi disiplin telah memperoleh nilai 5 atau sudah mencapai 100% dari maksimal bobot yang bisa dicapai. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2024 tidak terdapat pegawai yang dikenakan penjatuhan hukuman disiplin, sehingga sampai dengan akhir tahun 2025 riwayat penjatuhan hukuman disiplin tahun 2024 belum termasuk komponen pengukuran IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual tahun 2025.

6. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya

- Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual” Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 72 capaian penghitungan lebih detail terkait efisiensi penggunaan anggaran

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AAROxCRO	(AAROxCRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(2)	(6)=(5)-(4)
Indeks profesionalitas ASN lingkup PPN Tual	99,77%	5,598,849,000	5.579.295.040	5.585.971.647,3	6.676.607,3

$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$	0,12%
--	-------

$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{\text{NO}}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \frac{(0,12\% \times 50)}{20}$	50,3%
--	-------

Realisasi anggaran Tahun 2025 untuk mendukung tercapainya IKM ini sebesar Rp 5,598,849,000,- atau 99,65% yang digunakan untuk menunjang dalam tercapainya IKM ini. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 50,3 %.

- Dalam mendukung pencapaian IKM.13 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual 2025, didukung oleh Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) PPN Tual dalam memberikan data dukung kinerja secara akuntabel.

7. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keterlibatan pimpinan dalam proses internalisasi merupakan kegiatan penunjang untuk tercapainya Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual, diantaranya adalah kegiatan monitoring dan evaluasi serta pembinaan kepegawaian untuk meningkatkan kinerja individu dan kedisiplinan pegawai, mengidentifikasi pemenuhan kualifikasi pendidikan, serta pengembangan kompetensi melalui keikutsertaan dalam kegiatan diklat/kursus atau pelatihan klasikal dan nonklasikal lainnya. Beberapa usaha yang telah dilakukan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual untuk tercapainya indikator kinerja tersebut adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi kepegawaian khususnya terkait presensi, sasaran kinerja pegawai dan pembaruan data diklat/HCDP. Selain itu, dilakukan pembinaan dan memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai untuk mengembangkan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui peningkatan kualifikasi jenjang pendidikan, diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis, kursus-kursus, dan webinar/seminar/workshop/magang/sejenis, serta pelatihan klasikal maupun nonklasikal lainnya. Efisiensi penggunaan anggaran hingga saat ini, sangat berpengaruh terhadap capaian realisasi IP ASN PPN Tual tahun 2025. Hal tersebut mengakibatkan beberapa pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi yang sudah direncanakan tidak terlaksana secara optimal khususnya kegiatan-kegiatan klasikal yang membutuhkan anggaran perjalanan dinas.

Hanya beberapa pegawai yang dapat mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi diakibatkan keterbatasan anggaran, sehingga solusi alternatif yang bisa dilakukan oleh pegawai hanya dengan mengikuti diklat secara daring memanfaatkan e-learning (e-Milea) dari Balai Diklat Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan ataupun melalui kanal diklat/kursus dari instansi/lembaga lain. Selain itu, diharapkan pula peran aktif pegawai untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi seperti diklat/kursus baik klasikal maupun non klasikal lainnya secara mandiri dan melakukan pengisian/pembaruan data riwayat diklat/kursus serta mengupload dokumen bukti dukung keikutsertaan dalam kegiatan pengembangan kompetensi tersebut ke dalam aplikasi MyASN BKN dan Portal Kepegawaian KKP.



3.2.14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Persen)

IKU Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa (PBJ) yang Diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual adalah indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keterbukaan dan kepatuhan pelabuhan terhadap regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya dalam hal mengumumkan RUP melalui sistem resmi yang disebut SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan).

1. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun berjalan

Tabel 73 Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun berjalan.

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian
Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di PPN Tual (Persen)	76	100	131,58%

Capaian indikator kinerja ini didapat melalui hasil penilaian dari Sekretariat Jenderal dengan nilai untuk tahun 2025 adalah 100% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 131,58%. Adapun target untuk indikator kinerja ini adalah 76% dan berlaku untuk seluruh Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya atau dengan beberapa tahun terakhir

Tabel 74 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya atau dengan beberapa tahun terakhir

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di PPN Tual (Persen)	2024	80	96,29	120,36%
	2025	76	100	131,58%

Jika dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 11,22%. Realisasi capaian tahun 2025 sebesar 100%, sedangkan tahun 2024 hanya mencapai 96,29%.

3. Membandingkan antara realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdpat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 75 Perbandingan antara realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdpat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indikator Kinerja	Target Renstra DJPT 2025	Realisasi PPN Tual 2025	% Capaian
Persentase Recana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di PPN Tual (Persen)	76	100%	131,58%

Capaian pada 2025 jika dibandingkan dengan Target Renstra telah tercapai sebesar 131,58 %.

4. Membandingkan antara realisasi tahun berjalan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di kementerian (jika ada)

Tabel 76 Perbandingan antara realisasi tahun berjalan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di kementerian

PPN Tual			PPN Ambon		
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
76	100	131,58%	76	100	131,58%

Perbandingan persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP PPN Tual dan PPN Ambon adalah sebanding, dengan nilai realisasi 100% atau mencapai 131,58% dari target tahunan.

5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tercapainya realisasi IKU Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di PPN Tual ini dipengaruhi oleh :

- Upaya optimal yang dilakukan tim penyusun RUP PBJ PPN Tual dengan terus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan tim Biro PBJ – KKP terkait mekanisme penginputan dan pengumuman RUP.
- Melakukan penyesuaian RUP Terumumkan setiap kali ada revisi DIPA maupun Revisi POK Tahun Anggaran 2025 pada Aplikasi SIRUP <https://sirup.inaproc.id/>
- Melakukan pencatatan realisasi transaksi belanja pengadaan barang/jasa, melalui SPSE INAPROC (menu Tender / Non Tender / Pencatatan Non Tender / Pencatatan Swakelola) dan transaksi e-purchasing melalui E-Katalog INAPROC.

6. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya

- Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di PPN Tual (Persen)” Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 77 capaian penghitungan lebih detail terkait efisiensi penggunaan anggaran

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AAROxCRO	(AAROxCRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(2)	(6)=(5)-(4)
Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di PPN Tual	131,58 %	3.361.390.000	3.352.744.145	4.422.916.962	1.070.172.817

$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AAROI \times CROI) - RAROI)}{\sum_{i=1}^n (AAROI)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$	31,84%
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \frac{(31,84\% \times 50)}{20}$	129,60%

Realisasi anggaran Tahun 2025 untuk mendukung tercapainya IKM ini sebesar Rp3.361.390.000,- atau 99,74% yang digunakan untuk menunjang dalam tercapainya indikator tersebut. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 129,60 %, hal ini menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan anggarannya sangat baik dan perlu dipertahankan di Tahun 2026.

Dalam mendukung pencapaian IKM 14, Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual, didukung oleh Tim Kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang terdiri dari 4 orang anggota dalam tercapainya nilai IKM ini dibutuhkan komitmen dalam ketertiban administrasi dokumen pengadaan barang/jasa.

Komponen kegiatan Perencanaan dan penganggaran Ditjen Perikanan Tangkap yang kegiatannya berupa pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran adalah merupakan kegiatan penunjang untuk tercapainya IKU tersebut, salah satu kegiatannya adalah kontrak jasa outsourcing petugas keamanan (Satpam), pengadaan kendaraan dinas fungsional, pemeliharaan gedung pertemuan, pemeliharaan sarana prasana kantor, pengadaan perangkat pengolah data, dll

7. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk meningkatkan Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan IV, ada beberapa hal yang dilakukan antara lain :

- Mengikuti Sosialisasi pengisian RUP yang diselenggarakan oleh Biro Umum dan PBJ
- Rapat pembahasan penetapan mekanisme pengadaan Barang/Jasa untuk setiap kegiatan
- Melakukan penyesuaian persentase RUP Terumumkan Tahun Anggaran 2025 pada Aplikasi SIRUP <https://sirup.inaproc.id/>
- Melakukan pencatatan realisasi transaksi belanja pengadaan barang/jasa, melalui SPSE INAPROC (menu Tender / Non Tender / Pencatatan Non Tender / Pencatatan Swakelola) dan transaksi e-purchasing melalui E-Katalog INAPROC.

3.2.15 Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual

IKM ini merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup PPN Tual yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Frekuensi pengukuran IKM ini adalah Tahunan. Parameter yang ditetapkan dalam mengukur capaian IKM ini adalah sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN);
- b. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST;
- c. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang;
- d. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal yang didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian;
- e. Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.

Pencapaian target kinerja 2025 adalah sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun berjalan

Tabel 78 Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun berjalan.

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian
Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	81	92	113,58%

Target untuk indikator kinerja ini adalah 80% yang berlaku untuk seluruh Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Capaian indikator kinerja ini diperoleh melalui hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jendral dengan nilai capaian pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk periode tahun 2025 sebesar 92, dengan persentase capaian terhadap target sebesar 113,58%.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya atau dengan beberapa tahun terakhir

Tabel 79 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya atau dengan beberapa tahun terakhir

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	2024	80	90	112,50%
	2025	81	92	113,58%

Jika dibandingkan dengan target dan capaian pada tahun 2024, target tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 1,25%, adapun realisasi tahun 2025 mengalami Kenaikan sebesar 2,22% dibanding tahun 2024.

3. Membandingkan antara realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 80 Perbandingan antara realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indikator Kinerja	Target Renstra DJPT 2025	Realisasi PPN Tual 2025	% Capaian
Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	81	92	113,58%

Indikator Kinerja Presentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan merupakan IKU turunan dari DJPT yaitu Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan (Persen), dimana target untuk DJPT tahun 2025 sebesar 81 PPN Tual berdasarkan data hasil capaian presentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan pada tahun 2025 tercapai 92 Pelaksanaan program Pengelolaan BMN pelabuhan berjalan efektif dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Dengan tercapainya IKU tersebut maka PPN Tual turut berkontribusi dalam tercapainya target IKU DJPT.

4. Membandingkan antara realisasi tahun berjalan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di kementerian (jika ada)

Tabel 81 Perbandingan antara realisasi tahun berjalan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di kementerian

PPN Tual			PPN Ambon		
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
81	92	113,58%	81	90	111,11%

Jika dibandingkan dengan PPN Ambon, PPN Tual memperoleh realisasi sebesar 92 dengan capaian 113,58%, sedangkan PPN Ambon memperoleh realisasi sebesar 90 dengan capaian 111,11%. Terdapat selisih realisasi nilai sebesar 2 dan selisih capaian sebesar 2,47%, dimana PPN Tual mendapatkan nilai lebih tinggi dibandingkan PPN Ambon.

5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Terpenuhinya target IKM ini dipengaruhi oleh pelaksanaan pengelolaan BMN yang dikelola dengan tertib yang diawali sejak penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), pengadaan BMN, pencatatan, penatausahaan serta penghapusan yang mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut juga didukung oleh adanya koordinasi yang baik dan intens dengan tim keuangan Sekretariat DJPT serta APIP melalui kegiatan-kegiatan formal maupun diskusi dan konsultasi.

Dalam mendukung pencapaian IKM tersebut, PPN Tual didukung oleh Tim Kerja Barang Milik Negara yang terdiri dari 3 orang anggota. Dalam tercapainya nilai IKM ini dibutuhkan komitmen dalam ketertiban administrasi dokumen pengelolaan Barang Milik Negara.

6. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPN Tual” Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 82 capaian penghitungan lebih detail terkait efisiensi penggunaan anggaran

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AAROxCRO	(AAROxCRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(2)	(6)=(5)-(4)
Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	113,58%	23.900.000	23.899.880	27.145.620	3.245.740

$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AAROI \times CROI) - RAROI)}{\sum_{i=1}^n (AAROI)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$	13,58%
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \frac{(13,58\% \times 50)}{20}$	83,95%

Realisasi anggaran Tahun 2025 untuk mendukung tercapainya IKM ini sebesar Rp 23.900.000,- atau 99,9995% yang digunakan. Nilai efisiensi penggunaan anggaran sebesar 83,95%.

- Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian IKM.15 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual 2025, didukung oleh Tim Kerja Barang Milik Negara yang terdiri dari 3 orang anggota. Dalam tercapainya nilai IKM ini dibutuhkan komitmen dalam ketertiban administrasi dokumen pengelolaan Barang Milik Negara.

7. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang kinerja adalah penginputan data dan penyelesaian aplikasi SIMAK dan penyusunan Laporan BMN, yang dimana didalamnya ada kegiatan penatausahaan, penghapusan dan lelang BMN.

Terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk peningkatan capaian IKM dimaksud pada tahun berikutnya, antara lain :

- Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan BMN;
- Pemanfaatan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L);
- Penyelesaian Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN;
- Penyelesaian penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi berat;
- Tertib administrasi penggunaan BMN dengan kelengkapan Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara (BA) Pemakaian;

- e. Penyusunan Laporan BMN Tahunan secara tepat waktu.

3.2.16 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup PPN Tual merupakan indikator yang menunjukkan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran lingkup PPN Tual. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah nilai yang menunjukkan kualitas pelaksanaan anggaran belanja suatu organisasi. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dihitung berdasarkan variable-variabel yang menggambarkan kualitas pelaksanaan anggaran. Variable-variabel yang digunakan untuk menghitung nilai IKPA tahun 2025, antara lain :

- Revisi DIPA
- Deviasi Halaman III DIPA
- Penyerapan anggaran
- Belanja kontraktual
- Penyelesaian tagihan 91
- Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP)

Capaian Output Pencapaian target kinerja 2025 adalah sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun berjalan

Tabel 83 Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun berjalan.

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	92	91,85	99,84%

Target kinerja ditetapkan sebesar 92, dengan realisasi yang dicapai sebesar 91,85. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja hampir memenuhi target yang telah ditetapkan, dengan selisih yang sangat kecil yaitu 0,15 dari target.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya atau dengan beberapa tahun terakhir.

Tabel 84 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya atau dengan beberapa tahun terakhir

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	2024	93,76	93,71	99,94%
	2025	92	91,85	99,84%

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan antara realisasi 2024 dengan nilai 93,71 terhadap realisasi 2025 dengan nilai 91,85, mengalami penurunan dengan selisih 1,86.

3. Membandingkan antara realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdpat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 85 Perbandingan antara realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdpat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Target Renstra DJPT 2025	Target Renstra DJPT 2025	Realisasi PPN Tual 2025	% Capaian
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	92	91,85	99,84%

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan merupakan IKU turunan dari DJPT yaitu Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan (Persen), dimana taget untuk DJPT tahun 2025 sebesar 92%. PPN Tual berdasarkan data hasil capaian tahun 2025 tercapai 91,85%. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual berjalan efektif dan sesuai dengan

perencanaan yang telah ditetapkan. Dengan tercapainya IKU tersebut maka PPN Tual turut berkontribusi dalam tercapainya target IKU DJPT.

4. Membandingkan antara realisasi tahun berjalan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di kementerian (jika ada)

Tabel 86 Perbandingan antara realisasi tahun berjalan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di kementerian

PPN Tual			PPN Ambon		
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
92	91,85	99,84%	92	98,01	106,53

Jika dibandingkan dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di PPN Ambon, capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran PPN Tual 2025 lebih rendah dengan selisih 6,16.

5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Usaha-usaha yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran PPN Tual 2025 adalah monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Anggaran melalui Aplikasi SAKTI dan OMSPAN Kementerian Keuangan sebagaimana analisis dibawah ini :

1) Revisi DIPA

Nilai indikator Revisi DIPA sebesar 100 menunjukkan bahwa selama tahun anggaran berjalan tidak terdapat revisi yang bersifat signifikan dan mengganggu pelaksanaan kegiatan. Hal ini mencerminkan kualitas perencanaan awal yang matang serta koordinasi yang baik antara unit teknis dan pengelola keuangan.

2) Deviasi Halaman III DIPA

Nilai deviasi Halaman III DIPA sebesar 71,73 menunjukkan masih terdapat perbedaan antara rencana penarikan dana dan realisasi. Deviasi ini terjadi akibat penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan operasional dan teknis di lapangan. Ke depan, diperlukan peningkatan ketepatan penjadwalan kegiatan agar rencana penarikan dana lebih realistis.

3) Penyerapan Anggaran

Capaian penyerapan anggaran sebesar 99,96 menunjukkan pelaksanaan kegiatan berjalan optimal dan hampir seluruh alokasi anggaran dapat direalisasikan. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi PPN Tual.

4) Belanja Kontraktual

Nilai belanja kontraktual sebesar 93,33 menunjukkan bahwa sebagian besar kontrak telah dikelola dan direalisasikan sesuai ketentuan. Pengendalian kontrak telah berjalan baik, namun tetap diperlukan penguatan monitoring agar realisasi kontrak lebih merata sepanjang tahun.

5) Penyelesaian Tagihan

Nilai 100 pada indikator penyelesaian tagihan menunjukkan bahwa seluruh tagihan telah diselesaikan tepat waktu tanpa menimbulkan tunggakan. Kondisi ini mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi pembayaran dan tata kelola keuangan yang baik.

6) Pengelolaan UP dan TUP

Nilai pengelolaan UP dan TUP sebesar 81,07 menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan telah berjalan sesuai ketentuan, namun masih terdapat keterlambatan dalam pertanggungjawaban. Perlu peningkatan disiplin administrasi dan pengawasan internal agar pengelolaan UP/TUP lebih optimal.

7) Capaian Output

Capaian output sebesar 94,62 menunjukkan bahwa target kinerja kegiatan sebagian besar telah tercapai. Output yang dihasilkan telah mendukung pencapaian sasaran strategis internal KKP, khususnya dalam pengelolaan pelabuhan perikanan.

6. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya

- Anggaran

fisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Nilai IKPA Lingkup PPN Tual ” Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 87 capaian penghitungan lebih detail terkait efisiensi penggunaan anggaran

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AAROxCRO	(AAROxCRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(2)	(6)=(5)-(4)
Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	99,84 %	9.418.599.000	9.105.195.375	9.403.529.241,6	298.333.866,6

$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$	3,17%
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + (3,17\% \times 50)$ 20	57,925%

Realisasi anggaran Tahun 2025 untuk mendukung tercapainya IKM ini sebesar Rp 9.418.599.000,- atau 96,67% yang digunakan untuk menunjang dalam tercapainya IKM ini. Nilai efisiensi penggunaan anggaran sebesar 57,925%.

7. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang kinerja adalah layanan perkantoran yang meliputi gaji dan tunjangan serta operasional pemeliharaan kantor, kontrak kerja dengan pihak ketiga dan adanya kegiatan bimbingan teknis maupun sosialisasi yang

diselenggarakan oleh KPPN Mitra, sehingga dapat memberikan pemahaman dalam melakukan pengisian aplikasi keuangan. Kegiatan ini juga ditunjang oleh koordinasi yang intens dengan admin dan pengelola ditingkat pusat.

3.2.17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup PPN Tual merupakan indikator yang menunjukkan nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup PPN Tual. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yg dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya.

1. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun berjalan

Tabel 88 Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun berjalan.

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Nilai)	71,5	86,57	121,08%

IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual Tahun 2025 merupakan IKU yang frekuensi perhitungannya adalah tahunan serta capaian/realisasi IKU ini berasal dari data input dan output yang dimasukkan setiap satker lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) ke dalam aplikasi Monev Kementerian Keuangan, sehingga dapat kami sampaikan hasil nilai kinerja anggaran PPN Tual tahun 2025 memperoleh capaian/realisasi sebesar 86,57 (Baik) dari target tahunan sebesar 71,5.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya atau dengan beberapa tahun terakhir

Tabel 89 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya atau dengan beberapa tahun terakhir

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Nilai)	2024	71	90	126,76%
	2025	71,5	86,57	121,08%

Jika dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 3,43%. Realisasi capaian tahun 2025 sebesar 86,57%, sedangkan tahun 2024 hanya mencapai 90%.

3. Membandingkan antara realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdpat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 90 Perbandingan antara realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdpat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indikator Kinerja	Target Renstra DJPT 2025	Realisasi PPN Tual 2025	% Capaian
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Nilai)	81,5	86,57	106,22%

Berdasarkan target Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025–2029 sebesar 81,5, dan dibandingkan dengan realisasi nilai yang dicapai pada Tahun 2025 sebesar 86,57, maka diperoleh persentase capaian sebesar 106,22%.

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perencanaan anggaran telah melampaui target yang ditetapkan, dengan selisih capaian sebesar 6,22% di atas target 100%, atau selisih nilai absolut sebesar 5,07 poin (86,57 – 81,5). Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perencanaan anggaran Tahun 2025 pada PPN Tual berada dalam kategori sangat baik, karena mampu melampaui target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis.

4. Membandingkan antara realisasi tahun berjalan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di kementerian (jika ada)

Tabel 91 Perbandingan antara realisasi tahun berjalan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di kementerian

PPN Tual			PPN Ambon		
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
71,5	86,57	121,08%	71,5	96,67	135,20%

Jika dibandingkan dengan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) PPN Ambon, realisasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) PPN Tual 2025 lebih rendah dengan selisih nilai 10,1 atau 14,12%.

5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tercapainya realisasi IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual ini dipengaruhi oleh :

- Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA
- Nilai Revisi DIPA = 100 dan nilai Deviasi Halaman III DIPA = 71,73
- Perencanaan anggaran yang matang
- Penurunan jumlah revisi baik Revisi DIPA & Revisi POK mengalami penurunan jumlah revisi dari tahun sebelumnya.

Faktor kegagalan IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual adalah adanya Deviasi Halaman III DIPA, disebabkan karena Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan pada Halaman III DIPA tidak sesuai dengan realisasi penyerapan anggaran bulanan oleh Bendahara Pengeluaran.

6. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya

- Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) PPN Tual Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 92 capaian penghitungan lebih detail terkait efisiensi penggunaan anggaran

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AAROxCRO	(AAROxCRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(2)	(6)=(5)-(4)
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Nilai)	121,08%	3.800.000	3.800.000	4.601.040	801.040

$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$	21,08%
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \frac{(21,08\% \times 50)}{20}$	102,70%

Realisasi anggaran 2025 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp. 3.800.000 atau 100% telah digunakan. Nilai efisiensi penggunaan anggaran sebesar 102,70 %.

- Sumber daya manusia

Dalam mendukung pencapaian IKU 17 – Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di PPN Tual, didukung oleh semua Tim Kerja di PPN Tual dalam menggunakan anggaran secara akuntabel dan transparan.

7. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk meningkatkan Persentase Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual, ada beberapa hal yang dilakukan antara lain :

- Mengikuti sosialisasi atau pun pelatihan-pelatihan terkait keuangan.
- Agar bendahara pengeluaran selalu memonitor kesesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan pada Halaman III DIPA dengan realisasi penyerapan anggaran bulanan.
- Saling koordinasi antara tim perencanaan dan bendahara pengeluaran agar tidak terjadi deviasi pada Halaman III DIPA.

3.2.18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Indeks)

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (Permen PAN dan RB No.14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik).

Nilai SKM diukur dengan melihat hasil penghitungan 9 (sembilan) unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur, U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5 Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon, U7 Kemudahan Fitur/ Kemampuan Petugas, U8 Kualitas Isi/ Sarana, U9 Layanan Konsultasi). Hasil penghitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindak lanjut pengisian SKM di lingkup KKP. Capaian realisasi dari indikator kinerja ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun berjalan

Tabel 93 Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun berjalan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	88.50	96.39	108.92%

Capaian indikator kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat triwulan tahun 2025 sebesar 96,39 dengan kategori “Sangat Baik” atau 108,92% dari target tahun 2025. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan secara periodik. Pelaksanaan SKM bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan, mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya atau dengan beberapa tahun terakhir

Tabel 94 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya atau dengan beberapa tahun terakhir

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	2023	88,21	92,71	105,10
	2024	88,30	95,77	108,46 %
	2025	88.50	96.39	108.92%

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, terjadi kenaikan realisasi dimana pada tahun 2023 diperoleh realisasi sebesar 92.71

sedangkan pada tahun 2024 diperoleh realisasi sebesar 95.77 dan pada tahun 2025 diperoleh realisasi sebesar 96.39. dari realisasi tersebut dapat disimpulkan bawa Setiap tahun terjadi kenaikan realisasi yaitu sebesar 3,06 poin pada periode 2023–2024 dan sebesar 0,62 poin pada periode 2024–2025.

3. Membandingkan antara realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdpat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 95 Perbandingan antara realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdpat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indikator Kinerja	Target Renstra DJPT 2025	Realisasi PPN Tual 2025	% Capaian
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	88,50	96.39	108.92%

Indikator Kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan merupakan IKU turunan dari DJPT dimana taget pada tahun 2025 sebesar 88,50. berdasarkan data hasil capaian Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual pada tahun 2025 tercapai 96.39.

Pelaksanaan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual berjalan efektif dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Dengan tercapainya IKU tersebut maka PPN Tual turut berkontribusi dalam tercapainya target IKU DJPT.

4. Membandingkan antara realisasi tahun berjalan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di kementerian (jika ada)

Tabel 96 Perbandingan antara realisasi tahun berjalan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di kementerian

PPN Tual			PPN Ambon		
Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
88.50	96.39	108.92%	88.50	91.47	103,36%

Berdasarkan tabel di atas PPN Tual dan PPN Ambon memiliki target kinerja yang sama, yaitu sebesar 88,50%. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa PPN Tual dan PPN Ambon berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.

PPN Tual mencatat nilai realisasi sebesar 96,39 dengan tingkat capaian 108,92%, sementara itu PPN Ambon memperoleh realisasi sebesar 91,47 dengan capaian 103,36%, Apabila dibandingkan, terdapat selisih nilai realisasi sebesar 4,92, yaitu selisih antara realisasi PPN Tual (96,39) dan PPN Ambon (91,47). Selain itu, terdapat selisih capaian kinerja sebesar 5,56%, di mana capaian PPN Tual lebih tinggi dibandingkan capaian PPN Ambon (108,92% – 103,36%).

5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis yang didapat dari survey lapangan dan analisis detail SKM didapatkan faktor yang mempengaruhi rendahnya penilaian adalah:

- 1) Faktor penyebab rendahnya nilai unsur Sarana dan Prasarana disebabkan oleh belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana pada layanan pas masuk, yang diakibatkan oleh kerusakan pada mesin portal. Selain itu, kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh kebijakan Efisiensi Anggaran Tahun 2025, serta merujuk pada Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam rangka efisiensi penggunaan sarana dan prasarana.

- 2) Layanan Konsultasi dan Pengaduan mengalami kendala dikarenakan petugas PPID memiliki rangkap jabatan sehingga dalam pelaksanaan tugas masih sering kendala dalam pembagian tugas dengan jabatan lainnya.

Sedangkan berdasarkan hasil rekapitulasi per unsur analisis yang didapat dari survey lapangan dan analisis detail SKM didapatkan faktor yang mempengaruhi tingginya penilaian adalah:

- 1) Petugas melakukan tindakan preventif sebelum terjadi masalah sehingga hampir setiap masalah yang hendak dilaporkan sudah dilakukan tindakan sebelumnya.
- 2) Petugas pelayanan diinstruksikan oleh setiap ketua Tim Kerja untuk selalu standby pada gadget sehingga mempercepat respon dan mengaplikasikan program program yang sudah terintegrasi melalui system.
- 3) Pemberdayaan Gedung Pelayanan Terpadu dengan sistemnya mempercepat dan mempermudah proses layanan.

6. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya

- Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja “Nilai SKM di PPN Tual” Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 97 capaian penghitungan lebih detail terkait efisiensi penggunaan anggaran

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AAROxCRO	(AAROxCRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(2)	(6)=(5)-(4)
Nilai SKM di PPN Tual	108,92%	-	-	-	-

$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARoi \times CROI) - RARoi)}{\sum_{i=1}^n (AARoi)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$	-
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{-9\%}{20} \times 50 \right)$	-

- Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian IKM.18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPN Tual, didukung oleh 18 (delapan belas) orang anggota yang bertugas untuk menyebarkan kuesioner SKM, menganalisa/ menyeleksi/ menindaklanjuti hasil SKM serta membuat laporannya.

7. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian indikator kinerja ini dengan meningkatkan kualitas pelayanan dengan melakukan peningkatan kompetensi petugas pelayanan serta Penggunaan aplikasi SISUSAN meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan SKM, baik dari segi waktu maupun SDM.

Program yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator kinerja ini yaitu program reformasi birokrasi melalui kegiatan koordinasi terkait peningkatan kualitas pelayanan publik. Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini antara lain adanya perbaikan sarana dan prasarana, perbaikan kualitas pelayanan masyarakat, adanya tindak lanjut monev SKM serta masukan dan/atau saran dari pengguna jasa. Sedangkan faktor penghambat atau kendala dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu petugas pelayanan dinilai kurang cepat dalam memberikan respon serta terdapat beberapa sarana dan prasarana yang rusak.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual pada tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 9.418.599.000,- sesuai dengan DIPA PPN Tual Tangkap TA. 2025 Nomor: SP DIPA-032.03.2.622475/2025 Tanggal 26 November 2024 dan alokasi anggaran tersebut untuk 3 (tiga) kegiatan yakni (1) Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, (2) Pengelolaan Sumber Daya Ikan, (3) Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Blokir anggaran s/d Desember 2025 sebesar Rp.283.928.000, sehingga Total Anggaran bersih yang dapat di kelola PPN Tual adalah **Rp. 9.134.671.000**. Realisasi Anggaran tahun 2025 adalah sebesar **Rp.9.105.195.375** atau sebesar **99,68%** dan Sisa Anggaran **Rp.29.475.625 (0,32%)**.

Tabel 98 Realisasi Penyerapan Anggaran Untuk Pelaksanaan Kegiatan PPN Tual Tahun 2025

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS		PAGU ANGGARAN 2025 (Rp.)	REALISASI	REALISASI (%)
A		Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual			9.134.671.000	9.105.195.375	99,68
1	2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	2338. BGA.002	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar	81.112.000	80.923.350	99,77
2	2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	2341. QGA.001	Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional	2.600.000	2.599.000	99.96
			2341. QKB.001	Laporan data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	2.785.000	2.785.000	100,00
5	2342	Dukungan Manajemen Internal	2342. CAN.955	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	61.890.000	61.878.380	99,98

		Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	2342. EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.500.000	1.500.000	100,00
			2342. EBA.963	Layanan Data dan Informasi	2.000.000	2.000.000	100,00
			2342. EBA.994	Layanan Perkantoran	8.276.187.000	8.248.341.985	99,66
			2342. EBB.951	Layanan Sarana Internal	578.625.000	577.440.000	99,80
			2342. EBB.971	Layanan Prasarana Internal	89.000.000	88.905.800	99,89
			2342. EBC.954	Layanan Manajemen SDM	3.500.000	3.499.500	99,99
			2342. EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	7.100.000	6.950.500	97,89
			2342. EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3.800.000	3.800.000	100,00
			2342. EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	24.572.000	24.571.860	100,00

Pada tahun 2025, PPN Tual juga melaksanakan kegiatan yang bersifat kontraktual, dalam bentuk pengadaan barang/jasa. Total nilai anggaran yang bersifat kontraktual PPN Tual pada tahun anggaran 2025 adalah senilai **Rp.2.035.761.060,- (Dua Milyar Tiga Puluh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Puluh Rupiah)**. Adapun rincian pelaksanaan kegiatan belanja modal di PPN Tual yang bersifat kontraktual, antara lain sebagai berikut:

Tabel 99 Realisasi Penyerapan Anggaran Untuk Pelaksanaan Kegiatan PPN Tual Tahun 2025

No	Uraian Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Realisasi (Rp)	Pelaksanaan
1	Jasa Perorangan Lainnya Pengemudi Pimpinan	40.820.000	40.820.000	100%
2	Jasa Outsourcing Petugas Keamanan (Satpam)	613.219.680	613.219.680	100%

3	Jasa Outsourcing Petugas Kebersihan	268.800.000	268.800.000	100%
4	Jasa Outsourcing Sekretaris Pimpinan	44.480.000	44.480.000	100%
5	Pengadaan Kendaraan Dinas Fungsional	537.300.000	537.300.000	100%
6	Pemeliharaan Gedung Pertemuan	8.135.000	8.135.000	100%
7	Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Tidak Bertingkat Gedung Sekretariat WPP-718 Tual	16.950.000	16.950.000	100%
8	Pemeliharaan Gedung PTSP	2.695.000	2.695.000	100%
9	Pemeliharaan Gapura	49.300.000	49.300.000	100%
10	Pemeliharaan Rumah Dinas Pimpinan	77.150.000	77.150.000	100%
11	Pemeliharaan Atap Kantor Utama & Gedung Arsip	9.460.000	9.460.000	100%
12	Pemeliharaan Mess Operator Tual	69.975.000	69.975.000	100%
13	Pemeliharaan Pos Satpam Tual	5.001.000	5.001.000	100%
14	Pemeliharaan Gedung TPI	8.240.000	8.240.000	100%
15	Pemeliharaan Pos Jaga (Dermaga)	25.359.000	25.359.000	100%
16	Pemeliharaan Drainase	6.507.000	6.507.000	100%
17	Pemeliharaan Jaringan Listrik	17.900.000	17.900.000	100%
18	Pemeliharaan Instalasi Air	7.040.000	7.040.000	100%
19	Pemeliharaan Dermaga	7.450.000	7.450.000	100%
20	Pemeliharaan Gedung Kantor	42.580.000	42.580.000	100%
21	Pakaian Dinas Pegawai ASN	51.101.000	51.101.000	100%
22	Pengadaan Kendaraan Dinas Fungsional Roda 2	40.140.000	40.140.000	100%
23	Pemeliharaan Talud	24.960.p000	24.960.p000	100%
24	Pemeliharaan Musholah	22.950.000	22.950.000	100%
25	Pengadaan Laptop	24.699.720	24.699.720	100%
26	Pengadaan Camera Meeting	5.150.400	5.150.400	100%

27	Pengadaan Printer	8.398.260	8.398.260	100%
	Total	2.305.761.060	2.305.761.060	100%



BAB 4 PENUTUP

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dengan dukungan anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 9.418.599.000,- dengan capaian realisasi sebesar Rp. 9.105.194.459,- atau mencapai 96.67 % pada tahun 2025. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual pada tahun 2025 melalui pencapaian target indikator kinerja yang diinput kedalam Sistem Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KINERJAKU), diperoleh Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) Ditjen Perikanan Tangkap sebesar 116.82 % .

Dari hasil pengukuran kinerja PPN Tual pada tahun 2025 melalui pencapaian target indikator kinerja yang diinput ke dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan KINERJAKU. Hasil dari 18 IKU yang telah ditetapkan, telah terealisasi dan melampaui target tahun 2025, yakni sebagai berikut :

1. **IKU 1 Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Rp. Juta), dengan target 480.597 capaiannya sebesar 907.183 (188.76%)**
2. **IKU 2 Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Ton), dengan target 4900 capaiannya sebesar 6408.27 (130.8%)**
3. **IKU 3 Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/ atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual, dengan target 100 capaiannya sebesar 100 (100%)**
4. **IKU 4 Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual, dengan target 84 capaiannya sebesar 91 (108,3%)**
5. **IKU 5 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual, dengan target 81 capaiannya sebesar 94.6 (116.7%)**
6. **IKU 6 Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual, dengan target 40 capaiannya sebesar 50.62 (126.55%)**
7. **IKU 7 Nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Nilai), dengan target 30,10 capaiannya sebesar 81.35 (270.26%)**
8. **IKU 8 Kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal), dengan target 690 capaiannya sebesar 857 (124.20%)**

9. **IKU 9 Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan**, dengan target **0,26** capaiannya sebesar **0.56 (BAIK)**
10. **IKU 10 Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual**, dengan target **45.5** capaiannya sebesar **72.57 (159.5%)**
11. **IKU 11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Persen)**, dengan target **85%** capaiannya **100% (117,65%)**
12. **IKU 12 Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual**, dengan target **88** capaiannya **88.00 (100.91)**
13. **IKU 14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Persen)**, dengan target **76** capaiannya sebesar **100 (131,58%)**
14. **IKU 15 Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual**, dengan target **95%** capaiannya sebesar **97.5% (102,63%)**
15. **IKU 17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual**, dengan target **71,5** capaiannya sebesar **86.57 (121.08%)**
16. **IKU 18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Indeks)**, dengan target **88,50** capaiannya sebesar **96.39 (108,92%)**

Namun demikian masih terdapat 2 IKU (13 IKU dan 16 IKU) tahun 2025 yang tidak memenuhi target antara lain :

1. **IKU 13 Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual (Indeks)**, dengan target **87**, capaiannya sebesar **86.8 (99,77%)**
2. **IKU 16 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual**, dengan target **92**, capaiannya sebesar **91.85 (99.84%)**

4.2 SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan pencapaian indikator kinerja sebagaimana pada Bab 3, hal – hal yang dapat disarankan untuk peningkatan kinerja guna pencapaian target tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Diperlukan peran aktif pimpinan unit kerja dan partisipasi aktif seluruh sumber daya manusia di PPN Tual dalam meningkatkan kualitas pengukuran kinerja dan LAKIP.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan laporan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis, fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantina ikan, publikasi, penyaluran logistik (BBM, air dan es), perubahan jumlah investor, sehingga dapat memaksimalkan nilai IK Tingkat Kinerja Pelabuhan.
3. Mengoptimalkan pelaksanaan penyusunan LAKIP PPN Tual sehingga dapat disampaikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan
4. Mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan pegawai dan memberikan kesempatan bagi ASN untuk mengembangkan kompetensinya sesuai dengan 109 kebutuhan organisasi melalui peningkatan kualifikasi jenjang pendidikan, Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Kursus-kursus, dan Webinar/Seminar/Workshop/ Magang/Sejenis, serta Pelatihan Klasikal maupun Nonklasikal lainnya.
5. Meningkatkan kualitas IKPA dengan melakukan perencanaan penarikan dana secara cermat, kemudian merealisasikan pelaksanaannya secara proposional. Selain itu diupayakan agar dapat memaksimalkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP).

Sebagai sebuah gambaran kinerja, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menyajikan keseluruhan profil kinerja PPN Tual secara utuh. Namun demikian, karena keterbatasan yang ada, menjadikan penyajian Laporan Kinerja PPN Tual ini masih belum sempurna. Oleh karenanya, perbaikan-perbaikan perlu segera dilakukan, utamanya menyangkut perbaikan terhadap indikator-indikator kinerja dan pengumpulan data yang lebih sistematis dan terstruktur. Sehingga dapat menjadi titik balik bagi perbaikan kinerja PPN Tual pada tahun 2026.

4.3 REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap faktor-faktor penyebab belum optimalnya capaian Indeks Profesionalitas ASN dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2025, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang terencana, sistematis, dan terukur. Rekomendasi tindak lanjut berikut disusun sebagai upaya perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) guna meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya manusia serta optimalisasi pelaksanaan anggaran pada tahun berikutnya.

1. Menyusun rencana pengembangan kompetensi ASN berbasis analisis kebutuhan diklat (training need analysis).
2. Mendorong pemenuhan minimal jam pelajaran pengembangan kompetensi bagi seluruh ASN.
3. Melakukan pemutakhiran data kepegawaian secara berkala dan memastikan kelengkapan dokumen pendukung pada sistem kepegawaian.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan metode pembelajaran daring (e-learning) untuk efisiensi anggaran.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian Indeks Profesionalitas ASN secara triwulanan.
6. Meningkatkan kualitas perencanaan kas dan rencana penarikan dana agar lebih realistis dan terukur.
7. Melakukan monitoring pelaksanaan anggaran secara berkala (bulanan) melalui rapat evaluasi internal.
8. Mempercepat proses pengadaan barang/jasa sejak awal tahun anggaran.
9. Meningkatkan koordinasi antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara, dan operator keuangan.
10. Melaksanakan pendampingan dan asistensi teknis terkait pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan.



LAMPIRAN